SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang.../2

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terrtang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahal Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 7153);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah.../3

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

18. Peraturan Menteri.../4

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah;
4. Kabupaten adalah Kabupaten di Daerah Provinsi Papua Tengah;
5. Bupati adalah Bupati di wilayah Provinsi Papua Tengah;
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah yang selanjutnya disebut Bapperinda adalah Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki tugas pokok melaksanakan perurmusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan pereneanaan pembangunan Daerah Provinsi Papua Tengah;
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah;

9. Rencana Pembangunan.../5

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat isi, misi dan arah Pembangunan Daerah dan mengacu pada RPJP Nasional;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
11. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun;
12. Perubahan Rencana Kerja Pernerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut PRKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.
13. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKAPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah. serta pagu anggaran sementara didasarkan atas kebijakan Umurn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

Pasal 2

PRKPD merupakan:

1. Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah Provinsi untuk periode Tahun 2026, yang dimulai dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Desember 2026; dan

2. Penjabaran dari RPJMD Provinsi dan mengacu pada RPJMN, yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat melalui Musrenbang.

Pasal 3

(1) Maksud penetapan PRKPD yaitu untuk menetapkan perubahan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan sebagai berikut:
   a. penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
   b. penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara, dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
   c. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Perubahan RKPD Tahun 2026.

(2) Tujuan penetapan PRKPD adalah untuk:
   a. mewujudkan pencapaian visi dan misi Daerah;
   b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintahan maupun antartingkat pemerintahan;
   b. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
   c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
   d. mencapai pemanfaatan sumber daya secara efesien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB II
ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1) Isi dan uraian dokumen PRKPD sehagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. BAB I Pendahuluan;
   b. BAB II Evaluasi Capaian Triwulan;
   c. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
   d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026;

e. BAB V.../7

e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2026;
f. BAB VI Penutup.

(2) Isi dan uraian dokumen PRKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran, sebagaimana bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Kepala Badan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan PRKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 11 September 2026

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 11 September 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

SILWANUS ADRIAN SOEMOELE

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah perlu dilakukannya peyusunan dokumen perencanaan yaitu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) sesuai dengan aturan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 25 tahun 2004 Pasal 3, telah mengamanatkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004. Sebagai salah satu dokumen dari perubahan perencanaan pembangunan daerah yang disebut P-RKPD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Pasal 260, juga mengamanatkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

P-RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Secara operasional, P-RKPD memuat arahan untuk mencapai kinerja pemerintahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD).

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2026 juga, disebutkan bahwa dokumen perencanaan RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah. Namun dalam masa peralihan sampai dengan terpilihnya kepala daerah tersebut, pemerintah DOB perlu untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pengganti dokumen RPJMD dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di daerah.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ini juga yang menjadi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Provinsi Papua Tengah Tahun 2026. Lebih khususnya mengacu atau sesuai dengan pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yaitu meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, serta dan atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sejalan dengan hal itu terdapat perubahan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 2026, berdasarkan hal berikut maka perlunya disusunnya dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) tahun 2026, dengan beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan dokumen RKPD Provinsi Papua Tengah sebegai berikut:

1. Terdapat perubahan Arah Kebijakan yang perlu disingkronkan dengan arah kebijakan pemerintah Pusat dan beberapa perubahan prioritas Pembangunan Provinsi yang sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih.
2. Terjadi Efesiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang perlu dilakukan penyesuaian Kembali terhadap kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah, program dan rencana kegiatan Pada RKPD Provinsi papua Tengah.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan P-RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 adalah: (diurutkan sesuai Tingkatan)

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua;
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
22. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua;
23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029;
24. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025–2029;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
30. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 sebagai pedoman arah kebijakan dan prioritas nasional tahunan;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.12.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2005–2025;
34. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013–2033; dan
35. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025–2029.

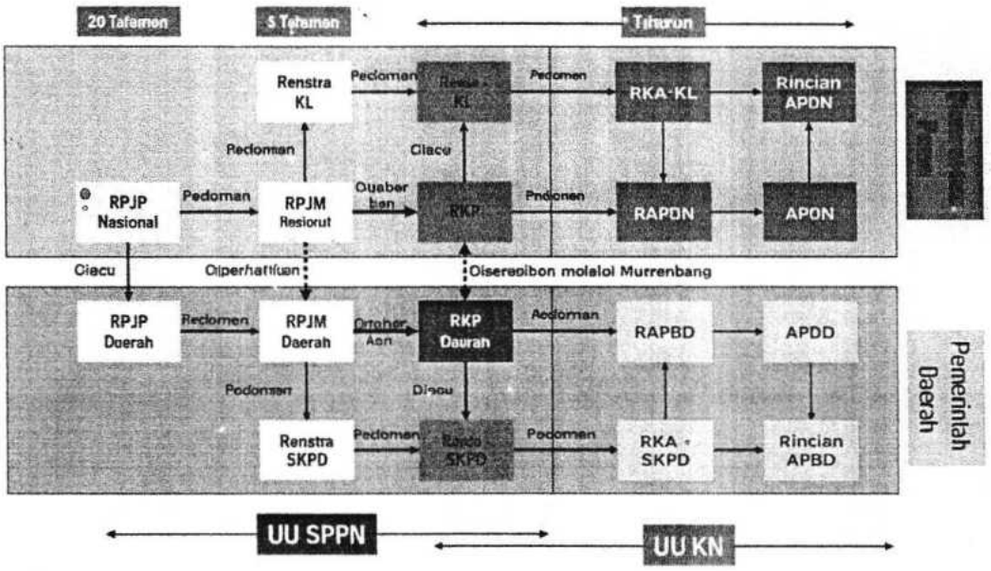
1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen perencanaan daerah memiliki hubungan yang erat antara satu dengan yang lain dalam tahap pelaksanaannya. Sistem perencanaan pembangunan merupakan serangkaian proses perencanaan pembangunan yang digunakan untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dijalankan oleh pemerintah dan juga masyarakat baik di level pusat maupun daerah. Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, keterkaitan antara dokumen perencanaan daerah meliputi dokumen perencanaan jangka panjang 20 tahun, dokumen perencanaan jangka menengah 5 tahun, dan dokumen perencanaan jangka pendek dengan masa 1 tahun. Adanya keterkaitan yang erat antar dokumen perencanaan daerah sangatlah penting, karena tiap dokumen perencanaan saling mempengaruhi satu sama lain. Penjelasan terkait dokumen perencanaan dalam ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional tertuang dalam amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 yang terdiri dari:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD; dan
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Landasan hukum terkait Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, sedangkan terkait Keuangan Negara tercantum pada Undang-Undang 17 Tahun 2003, sebagaimana terlampir pada gambar berikut:

Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen



Pada dasarnya proses penyusunan perubahan P-RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 tetap mengacu pada dokumen RKPD tahun berjalan dan berpedoman pada RPJMD yang berlaku. Perubahan dan penyesuaian terhadap perubahan RKPD dilakukan sesuai dengan kondisi dan keadaan daerah saat ini, dengan tetap memperhatikan hal-hal substantif yang terkandung dalam dokumen RKPD dan dokumen RPJMD tahun berjalan. Berdasarkan pada gambar 1.1 di atas dapat diketahui bahwa hubungan antara P-RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, RPJMN dan RPJMDD merupakan dua dokumen perencanaan yang saling berkaitan.

Hubungan antara RPJMD dan P-RKPD adalah bahwa P-RKPD merupakan rincian dari RPJMD dan penyusunannya mengacu pada rencana kerja pemerintah pusat. P-RKPD mencakup rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat. Meskipun keterlibatan aktif masyarakat penting dalam penyusunan RPJP dan RPJM di tingkat daerah, proses penyusunan P-RKPD dengan kerangka waktu tahunan dan produk perencanaan yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan dinas daerah dalam setahun dan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, sebenarnya tidak diatur atau tidak diwajibkan untuk melibatkan peran aktif masyarakat.

Program pembangunan RPJMD 2025-2029, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan dan rencana Pembangunan menjadi pedoman pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan kewajiban dan fungsi masing-masing perangkat daerah berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2026. Sedangkan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 akan menjadi acuan penyusunan KUPA-PPAS APBD Provnisi PapuaTengah Tahun 2026, yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan draf P-APBD TA. 2026.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dalam penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 yaitu sebagai penyempurna arah kebijakan dalam dokumen induk RPJMD Provinsi papua Tengah Tahun 2026-2029. Maksud lainnya

dalam penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran kinerja dalam proses revisi Perubahan APBD 2026.
2. Sebagai dasar prioritas pembangunan APBD Perubahan Tahun 2026.

Sementara itu, tujuan dari penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 menjadi pedoman untuk :

1. Menjelaskan keadaan dimana asumsi yang mendasari terkait dengan RKPD yang diidentifikasi sebelumnya telah berubah.
2. Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS), dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum penyusunan Dokumen Perubahan RKPD agar isi bab-bab selanjutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Hubungan Antar Dokumen
1.4 Maksud dan Tujuan
1.5 Sistematika Dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD 2026

Bab ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan RKPD dengan memaparkan terkait hasil evaluasi RKPD sampai triwulan kedua tahun berjalan, serta memperhatikan dokumen RPJMD dan RKPD tahun berjalan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan terkait kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan untuk tahun berjalan, termasuk terkait indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang membutuhkan pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, pengeluaran daerah dan pembiayaan daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memperjelas pengaturan prioritas dan tujuan Pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD tahun lalu dan rencana untuk mencapai kinerja dalam RPJMD, mengidentifikasi isu-isu di tingkat regional dan nasional, kerangka ekonomi regional dan kerangka draf dana.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mengartikulasikan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan penilaian pembangunan tahunan, posisi tahun rencana (RKPD) dan pencapaian kinerja program dalam RPJMD. Aspirasi dan kepentingan Masyarakat harus terwakili dalam rencana program dan kegiatan prioritas.

BAB VI PENUTUP

Merupakan bab terakhir, yang pada dasarnya memuat tentang rumusan kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan P-RKPD 2026 yang menjadi komitmen bagi seluruh *stakeholder* baik yang langsung menjadi pelaksana program kegiatan maupun pihak lain yang ikut berperan dalam pembangunan daerah Provinsi Papua Tengah.

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2026

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2026 sampai dengan triwulan II, dilakukan untuk mengukur capaian tiap program, kegiatan, sub kegiatan, dengan melihat Tingkat kemajuan pencapaian target kinerja maupun anggaran sampai dengan bulan juni 2026, adapun penentuan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada PERMENDAGRI No 86 Tahun 2017 halaman 495. Penilaian yang dilakukan untuk kinerja yang dilaksanakan kurang dari 1 (Satu) tahun, maka progress pencapaian kinerja relatif hanya bisa diamati pada tingkat keluaran sub kegiatan dengan interval sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja Kurang dari 1 (satu) Tahun

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	41 % ≤ 50%	Sangat Tinggi
2	36 % ≤ 40 %	Tinggi
3	26 % ≤ 35 %	Sedang
4	11% ≤ 25 %	Rendah
5	≤ 10 %	Sangat Rendah

Sumber data : Bapperida Provinsi Papua Tengah, 2026 (Data diolah)

Secara umum ada beberapa kondisi evaluasi capaian kinerja perangkat daerah pada RKPD tahun 2026 sampai dengan triwulan II tahun 2026. Kondisi tersebut antara lain ada beberapa capaian kinerja yang masih tergolong rendah dan mempengaruhi kinerja Provinsi Papua Tengah. Berikut dijabarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2026 sampai dengan triwulan II tahun 2026.

1.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II

Tabel 2. 2 Rekapitulasi Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

NO	URUSAN	ANGGGARAN	REALISASI	PERSETASE (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1,399,612,239,217	214,282,443,338	15,31
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	219,634,708,850	58,994,725,971	26,86
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	176,128,984,863	34,279,098,147	19,46
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	467,072,743,859	205,394,580,806	43,97
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	716,349,381,687	332,225,038,917	46,38
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	36,999,594,884	14,336,122,926	38,75
7	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	74,124,457,594	27,600,167,298	37,23
8	UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN	88,033,639,117	39,777,015,919	45,18
TOTAL		3,177,955,750,071	926,889,193,322	29,17

1.2 Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib

Tabel 2. 3 Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Periode 31 Juli 2026

KODE			URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI TRIWULAN II
1			*2*	*3*	*4*
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1,399,612,239,217	214,282,443,338
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	527,497,814,434	103,205,099,851
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	527,497,814,434	103,205,099,851
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23,290,640,533	6,503,980,256
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121,200,000	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40,400,000	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	40,400,000	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	40,400,000	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,662,526,773	4,974,232,009

1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11,622,126,773	4,974,232,009
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40,400,000	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40,400,000	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	40,400,000	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	611,512,800	27,208,400
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	69,574,200	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	541,938,600	27,208,400
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7,443,914,960	761,689,729
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	340,509,460	63,933,000
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	764,773,500	16,844,500
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2,564,466,000	235,036,307
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3,774,166,000	445,875,922
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,230,000,000	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,230,000,000	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,966,716,000	720,167,118
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	349,200,000	34,214,118
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,617,516,000	685,953,000
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214,370,000	20,683,000
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49,730,000	17,371,000
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,640,000	3,312,000

1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150,000,000	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	479,146,278,401	96,052,485,538
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000			23,685,543,500	648,634,057
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	23,685,543,500	648,634,057
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah	2,200,000,000	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3,468,825,100	85,200,000
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	960,000,000	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	1,458,737,100	161,601,400
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	4,922,030,000	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	6,277,166,000	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1,111,197,500	401,832,657
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	3,287,587,800	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.3.04	Pengelolaan Akademi Komunitas	11,757,233,400	18,000,000
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.3.04.0001	Pembangunan Gedung Akademi Komunitas	5,350,000,000	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.3.04.0020	Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas	2,421,156,000	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.3.04.0022	Pembinaan Kelembagaan dan ManajemenAkademi Komunitas	259,362,500	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.3.04.0024	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas	506,522,000	18,000,000
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.3.04.0026	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Akademi Komunitas	750,000,000	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.3.04.0028	Pengadaan Perlengkapan Akademi Komunitas	2,000,000,000	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.3.04.0041	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Akademi Komunitas	357,072,500	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.3.04.0042	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Akademi Komunitas	113,120,400	-

1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.3.06	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi OAP	181,845,028,789	32,116,578,093
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.3.06.0002	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Nonformal/Kesetaraan	1,533,000,000	96,000,000
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.3.06.0003	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Dasar	75,021,432,189	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.3.06.0004	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama	25,763,600,000	7,931,790,000
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.3.06.0005	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas	17,312,100,000	6,122,400,000
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.3.06.0006	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan	11,656,500,000	8,752,800,000
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.3.06.0007	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Pendidikan Tinggi	50,558,396,600	9,213,588,093
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.3.07	Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan	282,164,016,212	63,917,907,445
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.3.07.0001	Penyediaan Bantuan fasilitas bagi pendidikan	180,218,404,169	4,400,505,002
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.3.07.0002	Penyediaan Bantuan pembiayaan bagi pendidikan	101,945,612,043	59,517,402,443
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.3.08	Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Tambahan	3,380,000,000	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.3.08.0001	Pelaksanaan Layanan Pendidikan Tambahan yang diprioritaskan bagi OAP Untuk Membantu Penyiapan Memasuki Perguruan Tinggi dan/atau Pendidikan Kedinasan	3,380,000,000	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1,375,352,000	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.3.03	Penjaminan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Sesuai dengan kewenangannya	1,375,352,000	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.3.03.0001	Penjaminan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Sesuai dengan kewenangannya	1,375,352,000	-
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	196,061,784,714	78,876,457,050
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		DINAS KESEHATAN	196,061,784,714	78,876,457,050
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21,658,151,401	7,109,293,191

1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,974,313,901	4,933,910,299
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,974,313,901	4,933,910,299
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7,807,069,500	1,111,169,524
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	334,617,000	4,500,000
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	249,984,000	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	154,651,500	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3,528,035,000	787,020,000
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3,539,782,000	319,649,524
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,526,768,000	1,064,213,368
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	440,376,000	121,068,694
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,086,392,000	943,144,674
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	350,000,000	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	350,000,000	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	160,817,081,695	71,038,332,437
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000			1,320,000,000	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	76,075,194,909	24,753,056,387
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	27,800,000,000	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1,323,888,166	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	12,348,853,463	9,857,705,120
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	5,900,000,000	3,786,988,631
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,	1,786,771,061	1,523,028,648

			Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan		
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	26,915,682,219	9,585,333,988
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	83,741,886,786	46,285,276,050
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1,000,000,000	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1,056,000,000	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2,394,728,000	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1,494,671,800	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	47,024,000	920,000
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,500,000,000	1,218,868,593
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	78,096,200	22,573,724
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	72,178,526,086	45,042,913,733
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	992,840,700	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1,000,000,000	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1,000,000,000	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.3.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1,320,000,000	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.3.01.0042	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis pelayanan pelayanan kesehatan	1,320,000,000	-

			bergerak/ pelayanan kesehatan berbasi masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lain dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan spesialistik pada daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan lintas kabupaten/kota di wilayahnya.		
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	480,000,000	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000			6,612,087,800	728,831,422
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	6,612,087,800	728,831,422
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	5,612,058,800	656,246,049
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,000,029,000	72,585,373
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.3.08	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,Peningkatan Peran Serta OAP	480,000,000	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.3.08.0001	Pemberian stimulan bagi kader kesehatan Kampung yang berasal dari OAP	480,000,000	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5,174,463,818	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	5,174,463,818	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	5,174,463,818	-
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	561,997,284,138	8,886,982,264
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	561,997,284,138	8,886,982,264
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	439,801,958,018	8,633,909,362

1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31,675,000	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,525,000	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4,525,000	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4,525,000	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4,525,000	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4,525,000	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,525,000	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,525,000	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12,590,943,706	6,318,626,692
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12,577,368,706	6,318,626,692
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,525,000	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4,525,000	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4,525,000	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2,173,065,000	10,800,000
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	432,600,000	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1,253,670,000	10,800,000
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	486,795,000	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4,735,825,500	1,727,298,730
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13,602,000	13,602,000
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	185,230,700	185,230,700
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29,803,500	-

1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	637,490,000	307,375,000
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	449,644,000	199,600,000
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	232,442,700	232,206,500
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	381,000,000	109,800,000
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,806,612,600	679,484,530
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	418,268,632,960	17,815,500
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17,815,500	17,815,500
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	418,250,817,460	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,523,839,552	559,368,440
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,930,000	2,000,000
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	191,070,000	62,778,440
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,324,839,552	494,590,000
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	477,976,300	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46,130,000	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29,250,000	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	402,596,300	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	34,750,000,000	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	34,750,000,000	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai	10,600,000,000	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0074	Revitalisasi Danau	400,000,000	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0123	Pembangunan Unit Air Baku	23,750,000,000	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	300,000,000	-

1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	300,000,000	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	300,000,000	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2,200,000,000	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	2,200,000,000	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.05.1.01.0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	1,700,000,000	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	500,000,000	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	20,000,000,000	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.07.3.02	Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemberian bantuan untuk pembangunan layak huni dan kawasan permukiman layak terutama bagi OAP	20,000,000,000	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.07.3.02.0001	Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar	20,000,000,000	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	950,000,000	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	950,000,000	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.08.1.01.0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	950,000,000	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2,000,000,000	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2,000,000,000	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.09.1.01.0017	Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan	2,000,000,000	-

			Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	60,435,659,050	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	60,435,659,050	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	60,235,659,050	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	200,000,000	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	559,667,670	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	559,667,670	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	559,667,670	-
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	999,999,400	253,072,902
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	999,999,400	253,072,902
1.03	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	999,999,400	253,072,902
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1,384,094,400	-
1.04	1.03.1.04.0.00.03.0000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1,384,094,400	-
1.04	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	600,000,000	-
1.04	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	600,000,000	-
1.04	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	600,000,000	-
1.04	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	784,094,400	-
1.04	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	784,094,400	-
1.04	1.03.1.04.0.00.03.0000	1.04.03.1.01.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	784,094,400	-

1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	54,872,017,385	18,356,902,986
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	35,578,592,771	13,448,748,011
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19,116,519,171	7,435,924,011
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	178,225,900	-
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	47,292,500	-
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	73,764,500	-
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	57,168,900	-
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12,352,731,271	5,211,013,366
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12,185,500,671	5,211,013,366
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	54,617,200	-
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	55,337,200	-
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	57,276,200	-
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,071,324,000	-
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	746,928,000	-
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	324,396,000	-
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4,369,055,400	2,116,500,645
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25,393,000	-
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7,270,000	-
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	876,800,000	643,130,000
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	93,200,000	64,000,000
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	62,400,000	-

1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,481,992,400	1,228,887,200
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,822,000,000	180,483,445
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	226,507,600	-
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	226,507,600	-
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	466,755,000	-
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30,000,000	-
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73,155,000	-
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	363,600,000	-
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	451,920,000	108,410,000
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38,700,000	-
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	380,930,000	108,410,000
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32,290,000	-
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16,462,073,600	6,012,824,000
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	15,926,329,500	6,012,824,000
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	363,777,000	-
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.02.1.01.0020	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	346,490,000	-

1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.02.1.01.0021	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	14,032,928,500	6,012,824,000
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.02.1.01.0023	Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi	183,134,000	-
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.02.1.01.0030	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	1,000,000,000	-
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	535,744,100	-
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.02.1.03.0003	Pembentukan Sekretariat PPNS	52,544,100	-
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.02.1.03.0007	Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	483,200,000	-
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000		DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	19,293,424,614	4,908,154,975
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16,762,006,314	3,982,306,375
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	168,609,800	23,795,500
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	55,495,500	23,795,500
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	56,621,800	-
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	56,492,500	-
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,658,467,414	1,321,021,036
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,477,125,914	1,321,021,036
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	63,497,200	-
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	63,497,200	-
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	54,347,100	-

1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	857,492,000	564,321,780
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	565,136,000	564,321,780
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	292,356,000	-
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,672,964,900	305,841,621
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,893,200	433,000
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	184,547,000	184,038,000
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	339,000,000	36,000,000
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53,338,700	2,321,000
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	42,400,000	42,400,000
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	110,500,000	-
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	940,286,000	40,649,621
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,485,127,200	257,278,020
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2,224,530,000	-
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	260,597,200	257,278,020
1.05	1.05.0.00.0.0C.05.0000	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,315,816,000	1,210,513,418
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30,000,000	7,500,000
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	190,593,000	13,544,918
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,095,223,000	1,189,468,500
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,603,529,000	299,535,000
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	202,900,000	-
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	268,130,000	1,935,000

			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,990,000	-
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,112,509,000	297,600,000
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1,827,272,000	499,500,000
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	844,312,000	-
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	844,312,000	-
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	482,960,000	-
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.03.1.03.0009	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	482,960,000	-
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	500,000,000	499,500,000
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	500,000,000	499,500,000
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	704,146,300	426,348,600
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	525,394,300	383,338,600
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.1.01.0024	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	383,527,800	299,356,000
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.1.01.0027	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	141,866,500	83,982,600
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	178,752,000	43,010,000
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.1.02.0002	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan,	178,752,000	43,010,000

			Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	57,799,244,146	4,957,001,187
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000		DINAS SOSIAL	57,799,244,146	4,957,001,187
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16,258,736,246	4,913,801,187
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	299,999,500	-
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49,999,500	-
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	50,000,000	-
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	50,000,000	-
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	50,000,000	-
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	50,000,000	-
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50,000,000	-
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,545,012,746	1,856,836,158
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,245,012,746	1,856,836,158
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,000,000	-
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100,000,000	-
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	100,000,000	-
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,096,620,000	-
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	270,000,000	-
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50,000,000	-
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	50,000,000	-
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	726,620,000	-

1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5,218,361,400	1,832,031,841
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	608,507,200	-
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	99,900,700	45,460,300
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,318,676,000	797,399,800
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	505,368,000	142,000,000
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	50,000,000	40,000,000
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,136,431,500	569,819,200
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,499,478,000	237,352,541
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	614,916,100	200,000,000
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	235,000,000	-
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80,616,100	-
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200,000,000	200,000,000
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99,300,000	-
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,682,280,000	1,024,933,188
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50,000,000	19,300,000
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	156,060,000	13,773,188
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,476,220,000	991,860,000
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,801,546,500	-
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89,570,000	-
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,711,976,500	-
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	613,926,900	-
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000			644,765,000	43,200,000
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	613,926,900	-

1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.02.1.02.0010	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	613,926,900	-
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.02.3.03	Penetapan Lokasi dan Bentuk Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	644,765,000	43,200,000
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.02.3.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan lokasi dan bentuk pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)	644,765,000	43,200,000
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1 06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	13,506,811,000	-
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	249,867,000	-
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	249,867,000	-
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	12,756,944,000	-
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	256,944,000	-
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	10,000,000,000	-
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	2,500,000,000	-
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	500,000,000	-
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	500,000,000	-
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	26,100,000,000	-
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	26,100,000,000	-
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	8,700,000,000	-
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.05.1.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	16,800,000,000	-
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.05.1.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	600,000,000	-
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	675,005,000	-
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	675,005,000	-
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.06.1.01.0016	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	675,005,000	-

KODE			URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA OPERASI		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI
				ANGGARAN	REALISASI		
1			*2*	*3*	*4*	*3*	*4*
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	200,227,931,850	58,369,734,671	219,634,708,850	58,994,725,971
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	7,936,765,148	3,461,949,410	8,225,723,148	3,461,949,410
2.07	2.07.3.32.3.29.07.0000		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	7,936,765,148	3,461,949,410	8,225,723,148	3,461,949,410
2.07	2.07.3.32.3.29.07.0000	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7,936,765,148	3,461,949,410	8,225,723,148	3,461,949,410
2.07	2.07.3.32.3.29.07.0000	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,506,363,148	3,105,737,710	6,506,363,148	3,105,737,710
2.07	2.07.3.32.3.29.07.0000	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,225,723,148	3,105,737,710	6,225,723,148	3,105,737,710
2.07	2.07.3.32.3.29.07.0000	2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	280,640,000	-	280,640,000	-
2.07	2.07.3.32.3.29.07.0000	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70,600,000	70,000,000	70,600,000	70,000,000
2.07	2.07.3.32.3.29.07.0000	2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	70,600,000	70,000,000	70,600,000	70,000,000
2.07	2.07.3.32.3.29.07.0000	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	395,116,000	57,707,700	395,116,000	57,707,700
2.07	2.07.3.32.3.29.07.0000	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115,415,400	57,707,700	115,415,400	57,707,700
2.07	2.07.3.32.3.29.07.0000	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51,833,600	-	51,833,600	-
2.07	2.07.3.32.3.29.07.0000	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	65,604,000	-	65,604,000	-
2.07	2.07.3.32.3.29.07.0000	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	162,263,000	-	162,263,000	-

2.07	2.07.3.32.3.29.07.0000	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	288,958,000	-
2.07	2.07.3.32.3.29.07.0000	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	288,958,000	-
2.07	2.07.3.32.3.29.07.0000	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	964,686,000	228,504,000	964,686,000	228,504,000
2.07	2.07.3.32.3.29.07.0000	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,890,000	-	100,890,000	-
2.07	2.07.3.32.3.29.07.0000	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	863,796,000	228,504,000	863,796,000	228,504,000
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	21,822,919,366	2,167,845,467	22,248,846,766	2,230,926,767
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	21,822,919,366	2,167,845,467	22,248,846,766	2,230,926,767
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5,884,307,866	2,060,403,017	6,310,235,266	2,123,484,317
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78,230,600	40,982,900	78,230,600	40,982,900
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27,094,200	25,834,200	27,094,200	25,834,200
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	15,148,700	15,148,700	15,148,700	15,148,700
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,385,200	-	15,385,200	-
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,602,500	-	20,602,500	-
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,807,235,166	976,046,874	3,807,235,166	976,046,874

2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,765,198,966	961,767,374	3,765,198,966	961,767,374
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8,230,000	-	8,230,000	-
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15,976,700	-	15,976,700	-
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	17,829,500	14,279,500	17,829,500	14,279,500
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	252,000,000	-	252,000,000	-
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	252,000,000	-	252,000,000	-
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,189,582,100	684,937,022	1,615,509,500	748,018,322
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,026,500	12,026,500	12,026,500	12,026,500
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125,854,700	75,187,600	543,201,300	138,268,900
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4,167,000	4,167,000	12,747,800	4,167,000
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300,291,600	300,050,000	300,291,600	300,050,000
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25,000,000	-	25,000,000	-
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	224,862,300	55,045,000	224,862,300	55,045,000
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	497,380,000	238,460,922	497,380,000	238,460,922
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	557,260,000	358,436,221	557,260,000	358,436,221

2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29,760,000	-	29,760,000	-
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90,000,000	20,936,221	90,000,000	20,936,221
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	437,500,000	337,500,000	437,500,000	337,500,000
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	14,145,067,100	107,442,450	14,145,067,100	107,442,450
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	1,812,171,900	107,442,450	1,812,171,900	107,442,450
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.01.0010	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	1,812,171,900	107,442,450	1,812,171,900	107,442,450
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	12,332,895,200	-	12,332,895,200	-
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.02.0006	pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	10,915,565,600	-	10,915,565,600	-
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.02.0009	peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	1,417,329,600	-	1,417,329,600	-
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	991,012,500	-	991,012,500	-

2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	991,012,500	-	991,012,500	-
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.04.1.02.0006	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	991,012,500	-	991,012,500	-
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	802,531,900	-	802,531,900	-
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	802,531,900	-	802,531,900	-
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.06.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	802,531,900	-	802,531,900	-
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	15,792,026,321	4,645,635,962	16,093,105,221	4,946,545,962
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000		DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN	15,792,026,321	4,645,635,962	16,093,105,221	4,946,545,962
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13,131,335,721	4,624,065,962	13,432,414,621	4,924,975,962
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	166,000,000	165,869,000	166,000,000	165,869,000
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35,000,000	34,870,000	35,000,000	34,870,000
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000

2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36,000,000	35,999,000	36,000,000	35,999,000
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,735,521,621	4,115,555,362	11,735,521,621	4,115,555,362
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11,700,521,621	4,093,640,362	11,700,521,621	4,093,640,362
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	35,000,000	21,915,000	35,000,000	21,915,000
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	589,204,000	107,171,100	589,204,000	107,171,100
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40,000,000	39,738,400	40,000,000	39,738,400
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	36,205,000	24,725,000	36,205,000	24,725,000
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	477,999,000	7,707,700	477,999,000	7,707,700
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	690,500	690,000	301,769,400	301,600,000
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	106,681,800	106,600,000
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	690,500	690,000	195,087,600	195,000,000
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	639,919,600	234,780,500	639,919,600	234,780,500
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000	1,980,000	10,000,000	1,980,000

2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90,123,600	9,780,500	90,123,600	9,780,500
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	539,796,000	223,020,000	539,796,000	223,020,000
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2,660,690,600	21,570,000	2,660,690,600	21,570,000
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2,592,583,600	21,570,000	2,592,583,600	21,570,000
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	500,000,000	-	500,000,000	-
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	392,583,600	-	392,583,600	-
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.01.0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1,000,000,000	21,570,000	1,000,000,000	21,570,000
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	700,000,000	-	700,000,000	-
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	68,107,000	-	68,107,000	-
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.02.0008	Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	68,107,000	-	68,107,000	-
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	3,591,000,000	343,307,884	16,700,000,000	343,307,884
2.10	2.11.3.28.2.10.10.0000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	3,591,000,000	343,307,884	16,700,000,000	343,307,884

2.10	2.11.3.28.2.10.10.0000	2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	2,045,324,200	263,440,000	15,154,324,200	263,440,000
2.10	2.11.3.28.2.10.10.0000	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	2,045,324,200	263,440,000	15,154,324,200	263,440,000
2.10	2.11.3.28.2.10.10.0000	2.10.03.1.01.0003	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	2,045,324,200	263,440,000	15,154,324,200	263,440,000
2.10	2.11.3.28.2.10.10.0000	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	187,631,800	31,512,000	187,631,800	31,512,000
2.10	2.11.3.28.2.10.10.0000	2.10.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	187,631,800	31,512,000	187,631,800	31,512,000
2.10	2.11.3.28.2.10.10.0000	2.10.04.1.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	187,631,800	31,512,000	187,631,800	31,512,000
2.10	2.11.3.28.2.10.10.0000	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	1,358,044,000	48,355,884	1,358,044,000	48,355,884
2.10	2.11.3.28.2.10.10.0000	2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1,358,044,000	48,355,884	1,358,044,000	48,355,884
2.10	2.11.3.28.2.10.10.0000	2.10.10.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	1,358,044,000	48,355,884	1,358,044,000	48,355,884
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	7,533,000,000	1,847,792,038	7,533,000,000	1,847,792,038
2.11	2.11.3.28.2.10.10.0000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	7,533,000,000	1,847,792,038	7,533,000,000	1,847,792,038
2.11	2.11.3.28.2.10.10.0000	2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	1,506,600,000	365,292,038	1,506,600,000	365,292,038

2.11	2.11.3.28.2.10.10.0000	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	1,506,600,000	365,292,038	1,506,600,000	365,292,038
2.11	2.11.3.28.2.10.10.0000	2.11.02.1.01.0004	Penyusunan RPPLH Provinsi	1,506,600,000	365,292,038	1,506,600,000	365,292,038
2.11	2.11.3.28.2.10.10.0000	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6,026,400,000	1,482,500,000	6,026,400,000	1,482,500,000
2.11	2.11.3.28.2.10.10.0000	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	6,026,400,000	1,482,500,000	6,026,400,000	1,482,500,000
2.11	2.11.3.28.2.10.10.0000	2.11.11.1.01.0015	Pelaksanaan Penanganan Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	6,026,400,000	1,482,500,000	6,026,400,000	1,482,500,000
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9,991,881,800	775,715,906	11,000,700,000	775,715,906
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000		DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	9,991,881,800	775,715,906	11,000,700,000	775,715,906
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2,391,239,800	705,991,406	3,400,058,000	705,991,406
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	199,200,000	-	199,200,000	-
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49,800,000	-	49,800,000	-
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	49,800,000	-	49,800,000	-
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	49,800,000	-	49,800,000	-
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49,800,000	-	49,800,000	-

2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,560,447,000	690,991,406	1,560,447,000	690,991,406
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,726,000	-	10,726,000	-
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51,000,000	32,853,200	51,000,000	32,853,200
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40,000,000	39,275,000	40,000,000	39,275,000
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50,274,000	30,000,000	50,274,000	30,000,000
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	29,800,000	-	29,800,000	-
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	658,789,000	403,576,000	658,789,000	403,576,000
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	719,858,000	185,287,206	719,858,000	185,287,206
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	538,472,800	-	1,547,291,000	-
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	268,472,800	-	1,277,291,000	-
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	270,000,000	-	270,000,000	-
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93,120,000	15,000,000	93,120,000	15,000,000
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30,000,000	15,000,000	30,000,000	15,000,000
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63,120,000	-	63,120,000	-
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	800,642,000	-	800,642,000	-
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	800,642,000	-	800,642,000	-
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	800,642,000	-	800,642,000	-

2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	535,016,500	69,724,500	535,016,500	69,724,500
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	535,016,500	69,724,500	535,016,500	69,724,500
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.04.1.03.0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	535,016,500	69,724,500	535,016,500	69,724,500
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	6,000,000,000	-	6,000,000,000	-
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000			264,983,500	-	264,983,500	-
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	264,983,500	-	264,983,500	-
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.05.1.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	264,983,500	-	264,983,500	-
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.05.3.01	Penyediaan Profil Kependudukan	6,000,000,000	-	6,000,000,000	-
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.05.3.01.0003	Koordinasi Penyediaan Profil Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	6,000,000,000	-	6,000,000,000	-
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6,194,189,357	2,379,476,865	6,407,703,357	2,379,476,865
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000		DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	6,194,189,357	2,379,476,865	6,407,703,357	2,379,476,865
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4,583,703,357	2,202,039,865	4,583,703,357	2,202,039,865
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,458,203,357	2,202,039,865	4,458,203,357	2,202,039,865

2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,408,403,357	2,202,039,865	4,408,403,357	2,202,039,865
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	49,800,000	-	49,800,000	-
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125,500,000	-	125,500,000	-
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125,500,000	-	125,500,000	-
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	924,000,000	177,437,000	924,000,000	177,437,000
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	924,000,000	177,437,000	924,000,000	177,437,000
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.04.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	924,000,000	177,437,000	924,000,000	177,437,000
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	686,486,000	-	900,000,000	-
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	686,486,000	-	900,000,000	-

2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	686,486,000	-	900,000,000	-
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1,079,780,700	907,443,498	1,079,780,700	907,443,498
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	1,079,780,700	907,443,498	1,079,780,700	907,443,498
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	252,761,000	154,251,321	252,761,000	154,251,321
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	252,761,000	154,251,321	252,761,000	154,251,321
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.02.1.01.0013	Penguatan Pengelolaan Kelompok Kerja Bangga Kencana yang efektif	252,761,000	154,251,321	252,761,000	154,251,321
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	409,912,700	367,656,050	409,912,700	367,656,050
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	409,912,700	367,656,050	409,912,700	367,656,050
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.03.1.01.0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak	409,912,700	367,656,050	409,912,700	367,656,050

			Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal				
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	417,107,000	385,536,127	417,107,000	385,536,127
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	417,107,000	385,536,127	417,107,000	385,536,127
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.04.1.01.0020	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	417,107,000	385,536,127	417,107,000	385,536,127
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	28,893,466,552	7,603,906,478	31,191,700,952	7,864,906,478
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000		DINAS PERHUBUNGAN	28,893,466,552	7,603,906,478	31,191,700,952	7,864,906,478
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11,493,466,552	6,076,351,954	11,791,700,952	6,337,351,954
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	350,000,000	300,000,000	350,000,000	300,000,000
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	50,000,000	-	50,000,000	-
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000

			dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,468,215,852	2,218,147,286	4,468,215,852	2,218,147,286
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,291,943,852	2,117,025,286	4,291,943,852	2,117,025,286
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	75,150,000	-	75,150,000	-
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	51,122,000	51,122,000	51,122,000	51,122,000
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	599,960,000	50,000,000	599,960,000	50,000,000
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	549,960,000	-	549,960,000	-
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,051,272,000	2,103,694,254	3,349,506,400	2,364,694,254
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	298,234,400	261,000,000
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,498,878,000	1,063,001,588	1,498,878,000	1,063,001,588

2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	149,390,000	99,769,000	149,390,000	99,769,000
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	346,990,000	299,578,000	346,990,000	299,578,000
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,056,014,000	641,345,666	1,056,014,000	641,345,666
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,393,076,195	1,204,310,414	2,393,076,195	1,204,310,414
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250,000,000	248,660,940	250,000,000	248,660,940
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	499,215,600	193,978,230	499,215,600	193,978,230
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,643,860,595	761,671,244	1,643,860,595	761,671,244
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	580,942,505	150,200,000	580,942,505	150,200,000
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	499,700,000	150,200,000	499,700,000	150,200,000
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31,060,000	-	31,060,000	-
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50,182,505	-	50,182,505	-
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3,000,000,000	246,473,118	3,000,000,000	246,473,118
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	3,000,000,000	246,473,118	3,000,000,000	246,473,118
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.02.1.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	3,000,000,000	246,473,118	3,000,000,000	246,473,118
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	3,200,000,000	643,854,030	3,200,000,000	643,854,030

2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	250,000,000	30,015,000	250,000,000	30,015,000
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.03.1.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	250,000,000	30,015,000	250,000,000	30,015,000
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2,950,000,000	613,839,030	2,950,000,000	613,839,030
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.03.1.10.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2,950,000,000	613,839,030	2,950,000,000	613,839,030

2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	11,200,000,000	637,227,376	13,200,000,000	637,227,376
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.04.3.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi	700,000,000	369,007,400	2,700,000,000	369,007,400
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.04.3.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara	700,000,000	369,007,400	2,700,000,000	369,007,400
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.04.3.02	Pembangunan Bandar Udara	500,000,000	268,219,976	500,000,000	268,219,976
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.04.3.02.0004	Koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara	500,000,000	268,219,976	500,000,000	268,219,976
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.04.3.05	Penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan	10,000,000,000	-	10,000,000,000	-
2.15	2.15.0.00.0.00.12.0000	2.15.04.3.05.0002	Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	10,000,000,000	-	10,000,000,000	-
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16,454,984,307	3,457,217,443	17,369,359,307	3,457,217,443
2.16	2.16.2.21.2.20.13.0000		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	16,454,984,307	3,457,217,443	17,369,359,307	3,457,217,443
2.16	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7,945,931,307	3,431,114,443	7,945,931,307	3,431,114,443
2.16	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	346,972,000	23,982,000	346,972,000	23,982,000
2.16	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	193,651,000	-	193,651,000	-
2.16	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.16.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	45,600,000	-	45,600,000	-
2.16	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.16.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	23,982,000	23,982,000	23,982,000	23,982,000
2.16	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.16.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	56,400,000	-	56,400,000	-
2.16	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27,339,000	-	27,339,000	-

2.16	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,737,485,307	2,444,292,209	4,737,485,307	2,444,292,209
2.16	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,483,734,307	2,325,732,804	4,483,734,307	2,325,732,804
2.16	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.16.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	193,751,000	118,559,405	193,751,000	118,559,405
2.16	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.16.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	60,000,000	-	60,000,000	-
2.16	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	86,700,000	-	86,700,000	-
2.16	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.16.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	52,800,000	-	52,800,000	-
2.16	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.16.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	33,900,000	-	33,900,000	-
2.16	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	154,026,000	-	154,026,000	-
2.16	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.16.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	22,679,000	-	22,679,000	-
2.16	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.16.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	131,347,000	-	131,347,000	-
2.16	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,380,253,000	613,620,800	1,380,253,000	613,620,800
2.16	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	498,702,000	261,895,300	498,702,000	261,895,300
2.16	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.16.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	159,073,000	-	159,073,000	-
2.16	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125,000,000	124,322,000	125,000,000	124,322,000

2.16	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	200,000,000	86,804,200	200,000,000	86,804,200
2.16	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	397,478,000	140,599,300	397,478,000	140,599,300
2.16	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,240,495,000	349,219,434	1,240,495,000	349,219,434
2.16	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	335,943,000	37,843,434	335,943,000	37,843,434
2.16	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	904,552,000	311,376,000	904,552,000	311,376,000
2.16	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2,143,988,000	-	3,058,363,000	-
2.16	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2,143,988,000	-	3,058,363,000	-
2.16	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.16.02.1.01.0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	506,250,000	-	570,625,000	-
2.16	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik	837,738,000	-	837,738,000	-
2.16	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	800,000,000	-	1,650,000,000	-
2.16	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	6,365,065,000	26,103,000	6,365,065,000	26,103,000
2.16	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	200,000,000	-	200,000,000	-
2.16	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.16.03.1.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	200,000,000	-	200,000,000	-
2.16	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	6,165,065,000	26,103,000	6,165,065,000	26,103,000
2.16	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	4,865,065,000	26,103,000	4,865,065,000	26,103,000

2.16	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.16.03.1.02.0031	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	1,300,000,000	-	1,300,000,000	-
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	16,682,988,880	3,632,981,156	17,029,859,980	3,632,981,156
2.17	2.17.3.31.3.30.14.0000		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	16,682,988,880	3,632,981,156	17,029,859,980	3,632,981,156
2.17	2.17.3.31.3.30.14.0000	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10,009,876,780	3,632,981,156	10,356,747,880	3,632,981,156
2.17	2.17.3.31.3.30.14.0000	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	106,627,000	12,672,000	106,627,000	12,672,000
2.17	2.17.3.31.3.30.14.0000	2.17.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	55,225,000	-	55,225,000	-
2.17	2.17.3.31.3.30.14.0000	2.17.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	22,701,000	12,672,000	22,701,000	12,672,000
2.17	2.17.3.31.3.30.14.0000	2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28,701,000	-	28,701,000	-
2.17	2.17.3.31.3.30.14.0000	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,007,583,580	2,970,220,219	6,007,583,580	2,970,220,219
2.17	2.17.3.31.3.30.14.0000	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,977,889,580	2,970,220,219	5,977,889,580	2,970,220,219
2.17	2.17.3.31.3.30.14.0000	2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	29,694,000	-	29,694,000	-
2.17	2.17.3.31.3.30.14.0000	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,988,411,828	433,433,494	3,144,324,528	433,433,494
2.17	2.17.3.31.3.30.14.0000	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	275,000,028	42,134,500	430,912,728	42,134,500
2.17	2.17.3.31.3.30.14.0000	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	348,471,300	-	348,471,300	-
2.17	2.17.3.31.3.30.14.0000	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	350,676,200	80,529,000	350,676,200	80,529,000

2.17	2.17.3.31.3.30.14.0000	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	691,582,300	167,107,000	691,582,300	167,107,000
2.17	2.17.3.31.3.30.14.0000	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,322,682,000	143,662,994	1,322,682,000	143,662,994
2.17	2.17.3.31.3.30.14.0000	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	190,958,400	-
2.17	2.17.3.31.3.30.14.0000	2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	190,958,400	-
2.17	2.17.3.31.3.30.14.0000	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	673,599,372	216,655,443	673,599,372	216,655,443
2.17	2.17.3.31.3.30.14.0000	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69,999,372	15,775,443	69,999,372	15,775,443
2.17	2.17.3.31.3.30.14.0000	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	603,600,000	200,880,000	603,600,000	200,880,000
2.17	2.17.3.31.3.30.14.0000	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	233,655,000	-	233,655,000	-
2.17	2.17.3.31.3.30.14.0000	2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60,530,000	-	60,530,000	-
2.17	2.17.3.31.3.30.14.0000	2.17.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	173,125,000	-	173,125,000	-
2.17	2.17.3.31.3.30.14.0000	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	6,673,112,100	-	6,673,112,100	-
2.17	2.17.3.31.3.30.14.0000	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6,673,112,100	-	6,673,112,100	-
2.17	2.17.3.31.3.30.14.0000	2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah	6,673,112,100	-	6,673,112,100	-

			Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	18,990,280,787	5,087,570,368	19,490,280,787	5,087,570,368
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	18,990,280,787	5,087,570,368	19,490,280,787	5,087,570,368
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15,198,860,987	4,861,557,669	15,198,860,987	4,861,557,669
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61,813,000	-	61,813,000	-
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16,186,500	-	16,186,500	-
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	15,039,500	-	15,039,500	-
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,143,500	-	15,143,500	-
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,443,500	-	15,443,500	-
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,368,053,925	2,288,242,684	8,368,053,925	2,288,242,684
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,490,282,425	2,288,242,684	4,490,282,425	2,288,242,684
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3,846,000,000	-	3,846,000,000	-
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15,484,500	-	15,484,500	-
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	16,287,000	-	16,287,000	-

			Triwulanan/Semesteran SKPD				
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2,678,890,900	1,397,263,317	2,678,890,900	1,397,263,317
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1,668,291,000	1,340,450,022	1,668,291,000	1,340,450,022
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1,010,599,900	56,813,295	1,010,599,900	56,813,295
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,222,845,000	974,005,344	3,222,845,000	974,005,344
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50,064,000	-	50,064,000	-
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	226,492,100	161,143,100	226,492,100	161,143,100
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26,508,000	26,508,000	26,508,000	26,508,000
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	255,647,800	99,974,000	255,647,800	99,974,000
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	203,127,000	49,589,000	203,127,000	49,589,000
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	127,500,000	-	127,500,000	-
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	190,946,100	77,980,000	190,946,100	77,980,000
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,142,560,000	558,811,244	2,142,560,000	558,811,244
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	778,028,162	189,566,324	778,028,162	189,566,324
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	47,960,000	20,000,000	47,960,000	20,000,000
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109,548,162	27,799,324	109,548,162	27,799,324
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	620,520,000	141,767,000	620,520,000	141,767,000

2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89,230,000	12,480,000	89,230,000	12,480,000
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42,530,000	8,480,000	42,530,000	8,480,000
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46,700,000	4,000,000	46,700,000	4,000,000
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	830,299,000	20,372,220	830,299,000	20,372,220
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	830,299,000	20,372,220	830,299,000	20,372,220
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	830,299,000	20,372,220	830,299,000	20,372,220
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	768,545,900	52,684,400	768,545,900	52,684,400
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	768,545,900	52,684,400	768,545,900	52,684,400
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	768,545,900	52,684,400	768,545,900	52,684,400
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1,971,183,400	77,221,795	1,971,183,400	77,221,795
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1,971,183,400	77,221,795	1,971,183,400	77,221,795

2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	537,203,000	77,221,795	537,203,000	77,221,795
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	1,433,980,400	-	1,433,980,400	-
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	221,391,500	75,734,284	721,391,500	75,734,284
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	221,391,500	75,734,284	721,391,500	75,734,284
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	221,391,500	75,734,284	721,391,500	75,734,284
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	38,526,497,557	20,925,834,825	38,526,497,557	20,925,834,825
2.19	2.19.3.26.0.00.16.0000		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PERIWISATA	38,526,497,557	20,925,834,825	38,526,497,557	20,925,834,825
2.19	2.19.3.26.0.00.16.0000	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7,110,842,557	2,425,834,825	7,110,842,557	2,425,834,825
2.19	2.19.3.26.0.00.16.0000	2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69,083,000	-	69,083,000	-
2.19	2.19.3.26.0.00.16.0000	2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29,974,000	-	29,974,000	-
2.19	2.19.3.26.0.00.16.0000	2.19.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	24,577,000	-	24,577,000	-
2.19	2.19.3.26.0.00.16.0000	2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	14,532,000	-	14,532,000	-

			dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
2.19	2.19.3.26.0.00.16.0000	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,225,709,557	2,041,642,825	4,225,709,557	2,041,642,825
2.19	2.19.3.26.0.00.16.0000	2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,101,209,557	2,041,642,825	4,101,209,557	2,041,642,825
2.19	2.19.3.26.0.00.16.0000	2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	124,500,000	-	124,500,000	-
2.19	2.19.3.26.0.00.16.0000	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,818,072,655	-	1,818,072,655	-
2.19	2.19.3.26.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58,049,000	-	58,049,000	-
2.19	2.19.3.26.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4,877,000	-	4,877,000	-
2.19	2.19.3.26.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	139,000,000	-	139,000,000	-
2.19	2.19.3.26.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40,556,655	-	40,556,655	-
2.19	2.19.3.26.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	575,590,000	-	575,590,000	-
2.19	2.19.3.26.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-
2.19	2.19.3.26.0.00.16.0000	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	997,977,345	384,192,000	997,977,345	384,192,000
2.19	2.19.3.26.0.00.16.0000	2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20,000,000	-	20,000,000	-
2.19	2.19.3.26.0.00.16.0000	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46,633,345	-	46,633,345	-
2.19	2.19.3.26.0.00.16.0000	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	931,344,000	384,192,000	931,344,000	384,192,000
2.19	2.19.3.26.0.00.16.0000	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	5,650,000,000	2,000,000,000	5,650,000,000	2,000,000,000
2.19	2.19.3.26.0.00.16.0000	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda	5,650,000,000	2,000,000,000	5,650,000,000	2,000,000,000

			dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi				
2.19	2.19.3.26.0.00.16.0000	2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	250,000,000	-	250,000,000	-
2.19	2.19.3.26.0.00.16.0000	2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	2,500,000,000	2,000,000,000	2,500,000,000	2,000,000,000
2.19	2.19.3.26.0.00.16.0000	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	2,900,000,000	-	2,900,000,000	-
2.19	2.19.3.26.0.00.16.0000	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	25,515,655,000	16,500,000,000	25,515,655,000	16,500,000,000
2.19	2.19.3.26.0.00.16.0000	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	5,000,000,000	-	5,000,000,000	-
2.19	2.19.3.26.0.00.16.0000	2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	5,000,000,000	-	5,000,000,000	-

2.19	2.19.3.26.0.00.16.0000	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	2,658,502,000	1,500,000,000	2,658,502,000	1,500,000,000
2.19	2.19.3.26.0.00.16.0000	2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	500,000,000	-	500,000,000	-
2.19	2.19.3.26.0.00.16.0000	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	2,158,502,000	1,500,000,000	2,158,502,000	1,500,000,000
2.19	2.19.3.26.0.00.16.0000	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	357,153,000	-	357,153,000	-
2.19	2.19.3.26.0.00.16.0000	2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	357,153,000	-	357,153,000	-
2.19	2.19.3.26.0.00.16.0000	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	17,500,000,000	15,000,000,000	17,500,000,000	15,000,000,000
2.19	2.19.3.26.0.00.16.0000	2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	17,500,000,000	15,000,000,000	17,500,000,000	15,000,000,000
2.19	2.19.3.26.0.00.16.0000	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	250,000,000	-	250,000,000	-
2.19	2.19.3.26.0.00.16.0000	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	250,000,000	-	250,000,000	-
2.19	2.19.3.26.0.00.16.0000	2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	250,000,000	-	250,000,000	-
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1,014,375,000	-	1,014,375,000	-
2.20	2.16.2.21.2.20.13.0000		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	1,014,375,000	-	1,014,375,000	-
2.20	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1,014,375,000	-	1,014,375,000	-

2.20	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	1,014,375,000	-	1,014,375,000	-
2.20	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.20.02.1.01.0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	1,014,375,000	-	1,014,375,000	-
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	519,078,600	-	519,078,600	-
2.21	2.16.2.21.2.20.13.0000		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	519,078,600	-	519,078,600	-
2.21	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	519,078,600	-	519,078,600	-
2.21	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	250,000,000	-	250,000,000	-
2.21	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.21.02.1.01.0006	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	250,000,000	-	250,000,000	-
2.21	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	269,078,600	-	269,078,600	-
2.21	2.16.2.21.2.20.13.0000	2.21.02.1.02.0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	269,078,600	-	269,078,600	-
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	5,204,697,475	1,133,057,371	5,204,697,475	1,133,057,371
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5,204,697,475	1,133,057,371	5,204,697,475	1,133,057,371
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	4,526,973,575	1,005,482,000	4,526,973,575	1,005,482,000
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah	3,907,514,175	989,232,000	3,907,514,175	989,232,000

			Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	3,907,514,175	989,232,000	3,907,514,175	989,232,000
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	228,213,600	16,250,000	228,213,600	16,250,000
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	228,213,600	16,250,000	228,213,600	16,250,000
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	391,245,800	-	391,245,800	-
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.1.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	391,245,800	-	391,245,800	-
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	205,333,700	127,575,371	205,333,700	127,575,371
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	205,333,700	127,575,371	205,333,700	127,575,371
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	205,333,700	127,575,371	205,333,700	127,575,371
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	472,390,200	-	472,390,200	-
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	472,390,200	-	472,390,200	-
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	472,390,200	-	472,390,200	-

KODE			URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI
1			*2*	*3*	*4*
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	176,128,984,863	34,279,098,147
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	32,239,642,433	1,902,740,970
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	32,239,642,433	1,902,740,970
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8,362,517,698	1,533,043,005
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,300,677,116	-
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	101,905,288	-
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	45,000,000	-
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	35,500,000	-
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	35,500,000	-
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44,000,000	-
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,000,000	-
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	350,000,000	-
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	638,771,828	-
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,247,040,142	1,068,224,452
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,107,040,142	1,068,224,452
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	35,000,000	-
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	35,000,000	-
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	35,000,000	-
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	35,000,000	-
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	224,162,000	-
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	24,393,000	-

3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	199,769,000	-
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	555,413,940	36,033,720
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,000,000	-
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71,022,912	-
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35,332,316	-
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30,000,000	-
3.25	3.25.0 00.0.00.17.0000	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	51,899,712	-
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	352,159,000	36,033,720
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	140,796,700	-
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	34,514,100	-
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	106,282,600	-
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	893,255,000	220,430,000
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000	-
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90,125,000	-
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	793,130,000	220,430,000
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,001,172,800	208,354,833
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	251,172,800	-
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	750,000,000	208,354,833
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1,493,199,300	4,456,000
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1,493,199,300	4,456,000
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1,493,199,300	4,456,000
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	11,093,101,127	303,391,965
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10,093,101,127	303,391,965
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.03.1.02.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	10,093,101,127	303,391,965

3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	1,000,000,000	-
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	1,000,000,000	-
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3,740,739,411	41,850,000
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	3,740,739,411	41,850,000
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3,740,739,411	41,850,000
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	78,213,760	-
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	78,213,760	-
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	78,213,760	-
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	7,471,871,137	20,000,000
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.06.3.07	Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan	7,471,871,137	20,000,000
3.25	3.25.0.00.0.00.17.0000	3.25.06.3.07.0001	Fasilitasi Penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha menengah dan besar	7,471,871,137	20,000,000
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	14,000,000,000	5,500,000,000
3.26	2.19.3.26.0.00.16.0000		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PERIWISATA	14,000,000,000	5,500,000,000
3.26	2.19.3.26.0.00.16.0000	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	6,000,000,000	-
3.26	2.19.3.26.0.00.16.0000	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	500,000,000	-
3.26	2.19.3.26.0.00.16.0000	3.26.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	500,000,000	-
3.26	2.19.3.26.0.00.16.0000	3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	5,500,000,000	-
3.26	2.19.3.26.0.00.16.0000	3.26.02.1.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	5,000,000,000	-

3.26	2.19.3.26.0.00.16.0000	3.26.02.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	500,000,000	-
3.26	2.19.3.26.0.00.16.0000	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	8,000,000,000	5,500,000,000
3.26	2.19.3.26.0.00.16.0000	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	8,000,000,000	5,500,000,000
3.26	2.19.3.26.0.00.16.0000	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	8,000,000,000	5,500,000,000
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	41,676,556,701	2,734,957,037
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000		DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN	14,091,936,733	-
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	500,000,000	-
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500,000,000	-
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	500,000,000	-
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	7,614,400,733	-
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	7,614,400,733	-
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.02.0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	5,221,000,000	-
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	2,393,400,733	-
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1,477,536,000	-
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	1,477,536,000	-
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	34,036,000	-
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.1.01.0015	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi	1,443,500,000	-
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	4,500,000,000	-
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	4,500,000,000	-
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	4,500,000,000	-
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000		DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	27,584,619,968	2,734,957,037
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6,982,382,239	1,729,057,037

3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	155,000,000	14,710,000
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35,000,000	-
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	35,000,000	14,710,000
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	35,000,000	-
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25,000,000	-
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,000,000	-
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,644,619,969	663,170,874
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,584,619,969	654,110,874
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25,000,000	-
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	35,000,000	9,060,000
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	152,900,000	-
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	152,900,000	-
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,064,910,500	120,855,363
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,027,700	600,000
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82,485,500	14,811,500
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51,421,700	10,416,500
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50,000,000	-
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	88,633,600	-
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	787,342,000	95,027,363
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,334,781,600	632,400,300
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	632,528,800	632,400,300
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	702,252,800	-
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,603,170,170	296,320,500
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15,000,000	500,000
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47,750,000	1,712,500
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	824,550,770	105,780,000

3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	715,869,400	188,328,000
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27,000,000	1,600,000
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27,000,000	1,600,000
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	11,998,173,562	999,000,000
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	5,542,198,334	-
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.02.1.02.0006	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	5,542,198,334	-
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	455,975,228	-
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.02.1.05.0003	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	455,975,228	-
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	6,000,000,000	999,000,000
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	6,000,000,000	999,000,000
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	6,883,308,100	-
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	6,883,308,100	-
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.03.1.01.0022	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Benih atau Balai Benih Ternak Tingkat Provinsi (BIBD Provinsi)	6,883,308,100	-
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	720,756,067	6,900,000
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	720,756,067	6,900,000
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	720,756,067	6,900,000
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1,000,000,000	-
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	1,000,000,000	-
3.27	3.27.0.00.0.00.18.0000	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	1,000,000,000	-
3.28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	24,841,388,529	7,269,606,047

3.28	2.11.3.28.2.10.10.0000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	24,841,388,529	7,269,606,047
3.28	2.11.3.28.2.10.10.0000	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13,403,468,779	6,570,846,834
3.28	2.11.3.28.2.10.10.0000	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	191,869,400	112,115,000
3.28	2.11.3.28.2.10.10.0000	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90,000,000	90,000,000
3.28	2.11.3.28.2.10.10.0000	3.28.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	91,934,400	16,320,000
3.28	2.11.3.28.2.10.10.0000	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,935,000	5,795,000
3.28	2.11.3.28.2.10.10.0000	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,684,652,779	5,909,070,547
3.28	2.11.3.28.2.10.10.0000	3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11,634,652,779	5,859,105,547
3.28	2.11.3.28.2.10.10.0000	3.28.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	50,000,000	49,965,000
3.28	2.11.3.28.2.10.10.0000	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	34,753,800	24,572,000
3.28	2.11.3.28.2.10.10.0000	3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	34,753,800	24,572,000
3.28	2.11.3.28.2.10.10.0000	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	451,404,600	79,504,200
3.28	2.11.3.28.2.10.10.0000	3.28.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	384,514,600	68,884,200
3.28	2.11.3.28.2.10.10.0000	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	66,890,000	10,620,000
3.28	2.11.3.28.2.10.10.0000	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	210,890,600	169,549,884
3.28	2.11.3.28.2.10.10.0000	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,326,200	11,774,164
3.28	2.11.3.28.2.10.10.0000	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20,042,400	19,929,500
3.28	2.11.3.28.2.10.10.0000	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17,146,000	17,146,000
3.28	2.11.3.28.2.10.10.0000	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161,376,000	120,700,220
3.28	2.11.3.28.2.10.10.0000	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69,587,100	-
3.28	2.11.3.28.2.10.10.0000	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	64,311,400	-
3.28	2.11.3.28.2.10.10.0000	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,275,700	-
3.28	2.11.3.28.2.10.10.0000	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	661,680,500	276,035,203
3.28	2.11.3.28.2.10.10.0000	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88,701,000	52,823,203
3.28	2.11.3.28.2.10.10.0000	3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95,427,500	-

3.28	2.11.3.28.2.10.10.0000	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	477,552,000	223,212,000
3.28	2.11.3.28.2.10.10.0000	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98,630,000	-
3.28	2.11.3.28.2.10.10.0000	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98,630,000	-
3.28	2.11.3.28.2.10.10.0000	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	11,437,919,750	698,759,213
3.28	2.11.3.28.2.10.10.0000	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	400,000,000	77,912,600
3.28	2.11.3.28.2.10.10.0000	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	400,000,000	77,912,600
3.28	2.11.3.28.2.10.10.0000	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	9,737,919,750	9,650,750
3.28	2.11.3.28.2.10.10.0000	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	737,919,750	9,650,750
3.28	2.11.3.28.2.10.10.0000	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	9,000,000,000	-
3.28	2.11.3.28.2.10.10.0000	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1,000,000,000	544,943,063
3.28	2.11.3.28.2.10.10.0000	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1,000,000,000	544,943,063
3.28	2.11.3.28.2.10.10.0000	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	300,000,000	66,252,800
3.28	2.11.3.28.2.10.10.0000	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	300,000,000	66,252,800
3.29			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	60,521,373,200	-
3.29	2.07.3.32.3.29.07.0000		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	60,521,373,200	-
3.29	2.07.3.32.3.29.07.0000	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	5,550,000,000	349,747,136
3.29	2.07.3.32.3.29.07.0000	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	2,050,000,000	-
3.29	2.07.3.32.3.29.07.0000	3.29.03.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan	2,050,000,000	-

			Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		
3.29	2.07.3.32.3.29.07.0000	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	3,000,000,000	349,747,136
3.29	2.07.3.32.3.29.07.0000	3.29.03.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	3,000,000,000	349,747,136
3.29	2.07.3.32.3.29.07.0000	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	500,000,000	-
3.29	2.07.3.32.3.29.07.0000	3.29.03.1.04.0010	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat	500,000,000	-
3.29	2.07.3.32.3.29.07.0000	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	54,971,373,200	-
3.29	2.07.3.32.3.29.07.0000	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	54,971,373,200	-
3.29	2.07.3.32.3.29.07.0000	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	54,971,373,200	-
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	300,012,000	57,600,000
3.30	2.17.3.31.3.30.14.0000		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	300,012,000	57,600,000
3.30	2.17.3.31.3.30.14.0000	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	300,012,000	57,600,000
3.30	2.17.3.31.3.30.14.0000	3.30.04.3.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	300,012,000	57,600,000
3.30	2.17.3.31.3.30.14.0000	3.30.04.3.01.0003	Fasilitasi bantuan peralatan dan sarana perdagangan bagi pelaku usaha OAP	300,012,000	57,600,000
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2,300,012,000	265,632,000

3.31	2.17.3.31.3.30.14.0000		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	2,300,012,000	265,632,000
3.31	2.17.3.31.3.30.14.0000	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2,300,012,000	265,632,000
3.31	2.17.3.31.3.30.14.0000	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	2,300,012,000	265,632,000
3.31	2.17.3.31.3.30.14.0000	3.31.02.1.01.0010	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	2,300,012,000	265,632,000
3.32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	250,000,000	21,200,000
3.32	2.07.3.32.3.29.07.0000		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	250,000,000	21,200,000
3.32	2.07.3.32.3.29.07.0000	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	250,000,000	21,200,000
3.32	2.07.3.32.3.29.07.0000	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	250,000,000	21,200,000
3.32	2.07.3.32.3.29.07.0000	3.32.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	250,000,000	21,200,000

KODE			URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI
1			*2*	*3*	*4*
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	467,072,743,859	205,394,580,806
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	260,344,649,968	133,374,026,089
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000		SEKRETARIAT DAERAH	260,344,649,968	133,374,026,089
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	198,645,207,156	101,601,474,227
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,440,000,000	959,894,570
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300,000,000	217,468,900
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	300,000,000	246,485,380
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	370,000,000	367,280,170
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	370,000,000	128,660,120
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	370,000,000	-
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	360,000,000	-
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	370,000,000	-
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21,888,385,982	10,522,225,099
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19,807,980,882	9,846,472,199
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	330,822,200	329,655,200
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	349,890,900	-
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	349,890,900	-
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	349,933,700	346,097,700
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	349,933,700	-
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1,02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	349,933,700	-
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1,919,594,900	1,179,947,600
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	300,000,000	300,000,000
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	349,851,300	348,816,300

4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	349,851,300	281,131,300
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	349,892,300	-
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	270,000,000	250,000,000
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	300,000,000	-
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8,939,797,400	-
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	699,290,000	-
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	114,703,000	-
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	100,003,000	-
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	519,976,000	-
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2,798,939,200	-
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1,970,430,200	-
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2,736,456,000	-
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33,950,414,500	9,970,189,900
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,997,810,400	-
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2,011,196,900	-
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7,188,094,000	-
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1,193,953,000	-
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2,008,399,000	200,000,000
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,352,950,300	9,645,430,000
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6,599,039,000	-
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	118,559,900	118,559,900
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	480,412,000	6,200,000
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4,497,669,100	1,933,840,000
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	500,000,000	-

4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56,000,000	-
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	144,591,900	-
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	503,839,600	-
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3,293,237,600	1,933,840,000
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18,338,940,450	5,614,782,298
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200,000,000	-
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,462,993,350	524,025,298
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,214,000,000	-
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15,461,947,100	5,090,757,000
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,174,299,000	-
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	869,000,000	-
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50,200,000	-
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	349,750,000	-
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	899,696,000	-
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,005,653,000	-
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	18,346,710,914	10,461,139,160
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	331,901,354	148,427,463
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	96,000,000	-
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	700,000,000	-
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	17,218,809,560	10,312,711,697
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	15,102,378,910	13,721,243,700

4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2,997,779,620	2,378,452,000
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	2,399,949,730	2,376,156,000
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	9,704,649,560	8,966,635,700
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	24,202,866,000	10,467,795,000
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan	9,038,470,000	3,289,550,000
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	9,098,222,000	4,020,240,000
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	6,066,174,000	3,158,005,000
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	45,844,150,000	36,770,416,900
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	34,228,332,900	26,651,706,900
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8,068,167,500	7,293,795,000
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	3,547,649,600	2,824,915,000
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	3,500,000,000	1,026,965,578
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1,403,028,000	277,855,445
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	499,346,400	81,249,000
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	464,328,400	86,139,400
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	439,353,200	110,467,045
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	2,096,972,000	749,110,133
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1,800,000,000	652,463,944
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	296,972,000	96,646,189
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	3,557,328,100	770,038,474
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	2,416,670,600	352,652,925
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	1,271,941,800	228,300,173
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	141,058,800	17,074,768
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	1,003,670,000	107,277,984
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	1,008,995,000	378,213,917
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	198,758,000	86,165,351
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	135,487,000	58,368,200
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	674,750,000	233,680,366
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	131,662,500	39,171,632
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	87,615,000	29,491,332
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	27,276,500	9,680,300
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	16,771,000	-
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	41,042,455,000	26,097,327,517

4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	41,042,455,000	26,097,327,517
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	15,542,455,000	4,538,425,000
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	25,500,000,000	21,558,902,517
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	6,499,618,900	1,972,183,903
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	2,798,440,600	1,384,893,496
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	888,071,900	598,504,709
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	451,494,600	219,150,280
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	289,619,800	89,821,800
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	1,169,254,300	477,416,707
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	3,701,178,300	587,290,407
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	2,383,845,100	349,575,777
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	1,317,333,200	237,714,630
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2,800,000,000	1,129,090,832
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1,298,200,000	758,877,640
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	930,215,500	532,193,026
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	367,984,500	226,684,614
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	151,800,000	57,231,600
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	50,600,000	19,077,200
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	50,600,000	19,077,200
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	50,600,000	19,077,200
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	1,350,000,000	312,981,592
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	200,000,000	60,795,322
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	200,000,000	44,776,759

4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.06.1.03.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	600,000,000	179,655,440
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	150,000,000	-
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.06.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	200,000,000	27,754,071
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	3,499,942,012	359,339,287
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,382,632,000	74,500,000
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	110,345,000	40,500,000
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,167,050,000	-
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	105,237,000	34,000,000
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	992,229,032	215,244,387
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	124,993,000	3,224,346
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	92,803,000	34,000,000
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	774,433,032	178,020,041
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1,125,080,980	69,594,900
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	169,254,680	54,199,900
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	724,743,200	-
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	231,083,100	15,395,000
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	700,000,000	317,507,471
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	400,000,000	194,107,571
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	150,000,000	69,587,745
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	150,000,000	68,129,286
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	100,000,000	56,390,540
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	300,000,000	123,399,900
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	100,000,000	41,474,500

4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100,000,000	41,474,500
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	100,000,000	40,450,900
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.09	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA	100,098,800	100,098,800
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.09.3.02	Pengelolaan dan Koordinasi Otonomi Khusus	100,098,800	100,098,800
4.01	4.01.2.23.2.24.19.0000	4.01.09.3.02.0001	Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus	100,098,800	100,098,800
4.02			SEKRETARIAT DPRD	206,728,093,891	72,020,554,717
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000		SEKRETARIAT DPRD	206,728,093,891	72,020,554,717
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	80,303,160,091	35,784,356,938
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	316,400,000	216,400,000
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,000,000	50,000,000
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	50,000,000	50,000,000
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	50,000,000	-
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	50,000,000	50,000,000
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	50,000,000	-
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50,000,000	50,000,000
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	16,400,000	16,400,000
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,246,317,678	2,067,883,291
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,319,797,678	2,067,883,291
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	626,520,000	-
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50,000,000	-
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	50,000,000	-
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50,000,000	-
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	50,000,000	-
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	50,000,000	-
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	50,000,000	-

4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50,000,000	-
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	50,000,000	-
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2,314,940,000	92,531,531
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50,000,000	50,000,000
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2,264,940,000	42,531,531
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7,006,213,300	4,422,315,828
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	352,001,600	352,001,600
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	695,499,600	45,677,160
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	500,000,000	298,941,000
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2,072,550,000	1,987,720,000
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,787,736,000	1,139,549,968
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	598,426,100	598,426,100
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,366,000,000	834,200,000
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	836,000,000	834,200,000
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	530,000,000	-
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6,317,388,560	3,309,043,243
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200,000,000	200,000,000
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	593,068,560	164,828,243
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5,524,320,000	2,944,215,000
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56,000,000	49,992,000
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28,400,000	24,265,000
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27,600,000	25,727,000
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	54,598,106,853	24,195,368,945

4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	54,598,106,853	24,195,368,945
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	3,031,793,700	596,622,100
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	531,808,900	-
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	1,500,000,000	596,622,100
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.01.1.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	999,984,800	-
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	117,882,447,000	35,143,016,779
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	2,268,908,000	-
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	416,800,000	-
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda	528,268,000	-
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	323,840,000	-
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	500,000,000	-
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	500,000,000	-
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	2,500,000,000	-
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	500,000,000	-
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	500,000,000	-
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD	500,000,000	-
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD	500,000,000	-
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	500,000,000	-
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	3,500,000,000	1,481,623,000
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	500,000,000	285,603,000
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	500,000,000	284,335,000
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	500,000,000	303,415,000
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	500,000,000	304,135,000
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.02.1.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	500,000,000	304,135,000
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	500,000,000	-
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	500,000,000	-
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	7,424,958,000	2,136,969,785
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	2,484,958,000	916,969,785
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3,840,000,000	930,000,000
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	600,000,000	290,000,000

4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	500,000,000	-
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	94,929,413,000	29,628,116,644
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	13,142,952,000	4,124,558,644
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	500,000,000	-
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	81,286,461,000	25,503,558,000
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1,000,000,000	526,596,764
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.02.1.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	500,000,000	301,385,134
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	500,000,000	225,211,630
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.02.1.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	1,000,084,000	-
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.02.1.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	1,000,084,000	-
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	5,259,084,000	1,369,710,586
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2,771,192,000	1,369,710,586
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	500,000,000	-
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1,500,000,000	-
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.02.1.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	487,892,000	-
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.03	PROGRAM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA	8,542,486,800	1,093,181,000
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.03.3.01	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	8,542,486,800	1,093,181,000
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.03.3.01.0001	Dialog dan Koordinasi Pimpinan DPRD dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	6,542,250,000	1,093,181,000
4.02	4.02.0.00.0.00.20.0000	4.02.03.3.01.0003	Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus	2,000,236,800	-

KODE			URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI
1			*2*	*3*	*4*
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	332,225,038,917	332,225,038,917
5.01			PERENCANAAN	33,611,925,335	9,300,396,903
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	33,611,925,335	9,300,396,903
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16,022,400,335	5,592,240,103
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300,000,000	50,000,000
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,000,000	-
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50,000,000	-
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	50,000,000	-
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	50,000,000	50,000,000
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	50,000,000	-
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50,000,000	-
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,411,940,335	2,697,107,142
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,261,940,335	2,697,107,142
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50,000,000	-
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	50,000,000	-
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	50,000,000	-
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2,890,460,000	14,369,597
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	300,000,000	-
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	130,000,000	-
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2,460,460,000	14,369,597

5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5,455,000,000	1,836,241,364
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000	-
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250,000,000	-
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36,384,700	-
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	700,000,000	101,066,300
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2,163,615,300	174,863,500
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,000,000,000	1,560,311,564
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	300,000,000	-
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,950,000,000	979,552,000
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150,000,000	92,636,000
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	400,000,000	-
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,400,000,000	886,916,000
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15,000,000	14,970,000
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,000,000	14,970,000
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	11,389,540,000	2,551,023,000
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5,489,540,000	2,179,960,000
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3,639,540,000	1,645,000,000
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	1,500,000,000	534,960,000
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	350,000,000	-
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	300,000,000	-
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	300,000,000	-
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5,237,755,000	313,302,000
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	537,755,000	196,995,000

5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.02.1.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	3,000,000,000	-
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1,200,000,000	105,507,000
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	500,000,000	10,800,000
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.02.1.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	362,245,000	57,761,000
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.02.1.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	362,245,000	57,761,000
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6,199,985,000	1,157,133,800
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2,499,985,000	634,803,200
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1,099,985,000	-
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1,400,000,000	634,803,200
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	900,000,000	58,716,000
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	200,000,000	58,716,000
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	700,000,000	-
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2,800,000,000	463,614,600
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	370,248,000	207,768,000
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1,559,992,000	-
5.01	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	869,760,000	255,846,600
5.02			KEUANGAN	318,020,502,446	318,020,502,446

5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000		BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	313,638,010,765	313,638,010,765
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	176,352,033,663	176,352,033,663
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,816,476,600	1,437,639,776
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	349,989,400	349,970,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	313,580,200	200,000,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	357,690,000	200,000,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	301,909,000	200,000,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	193,308,000	193,308,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	300,000,000	294,361,776
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	167,049,168,491	167,049,168,491
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	164,896,729,263	164,896,729,263
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	298,049,500	293,640,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	833,380,000	805,291,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	402,787,300	286,500,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	486,229,100	422,355,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	798,088,000	173,821,228
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	211,900,000	170,832,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	210,017,000	210,005,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	210,017,000	210,005,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	887,547,000	518,639,680
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	198,440,000	158,500,000

5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	346,476,000	294,648,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	181,122,000	14,850,080
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	161,509,000	50,641,600
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8,115,479,900	1,738,844,200
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	220,884,000	220,000,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	354,715,500	333,806,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	565,890,000	503,710,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	467,460,000	461,067,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	208,620,000	152,261,200
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5,784,996,400	-
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	512,914,000	68,000,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5,127,715,300	4,633,026,082
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49,847,600	49,000,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,003,600	100,000,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	499,996,100	473,346,673
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	700,000,000	635,000,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	202,294,000	187,000,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2,873,652,000	2,532,500,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	301,704,000	257,047,409
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	400,218,000	399,132,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,626,557,146	-
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,626,557,146	-
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,431,176,000	680,710,434
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	366,600,000	280,000,000

5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,291,756,000	106,927,434
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,772,820,000	293,783,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132,530,000	84,000,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132,530,000	84,000,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	#VALUE!	135,331,054,238
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	6,083,727,500	993,928,746
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	450,000,000	-
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	450,000,000	-
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	100,000,000	-
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	100,000,000	-
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	117,985,000	-
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	262,144,000	-
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1,128,212,000	180,000,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	741,788,000	7,666,100
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.02.1.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1,333,598,800	533,083,770
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	1,399,999,700	273,178,876
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5,244,343,600	762,119,900
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	1,146,403,900	108,099,900

			Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	373,504,800	281,500,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.02.1.02.0008	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	750,000,000	96,125,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.02.1.02.0009	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	1,200,000,000	-
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.02.1.02.0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	766,426,600	-
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	1,008,008,300	276,395,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1,963,090,500	624,628,287
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	675,197,000	407,010,441
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	223,175,000	37,600,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	354,800,500	180,017,846
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	200,000,000	-
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.02.1.03.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	509,918,000	-
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2,078,640,600	212,389,166

5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.02.1.04.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	200,174,000	-
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	189,183,100	112,533,100
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	429,283,500	99,856,066
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.02.1.04.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	200,000,000	-
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.02.1.04.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	200,000,000	-
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	860,000,000	-
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	#VALUE!	132,709,488,139
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	30,706,250,000	-
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	48,500,000,000	500,000,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	#VALUE!	132,209,488,139
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	201,914,000	28,500,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.02.1.06.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	201,914,000	28,500,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2,160,444,000	464,234,124
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2,160,444,000	464,234,124
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga	261,252,000	38,999,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	228,223,000	54,639,097
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	202,368,000	137,788,088
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	275,842,000	64,541,218
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	299,565,000	53,379,721

5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	80,000,000	79,850,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	213,194,000	35,037,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	600,000,000	-
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3,617,153,600	1,490,688,740
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3,617,153,600	1,490,688,740
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	663,018,000	393,874,221
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1,286,564,000	321,613,617
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	285,861,000	152,922,089
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	256,585,000	199,618,700
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	245,480,000	169,763,174
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	228,123,500	107,496,939
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	332,877,000	145,400,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0000	5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	318,645,100	-
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0001		UPT PENDAPATAN NABIRE	2,999,999,934	1,514,234,353
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0001	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2,456,605,934	1,186,696,353
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0001	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55,450,000	-
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0001	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	55,450,000	-
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0001	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	885,455,254	289,041,955
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0001	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,265,100	-
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0001	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96,156,500	96,156,500
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0001	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79,144,654	2,748,396
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0001	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16,155,000	683,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0001	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	72,333,000	-
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0001	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	616,401,000	189,454,059
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0001	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	528,656,178	337,277,500

5.02	5.02.0.00.0.00.22.0001	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	184,665,400	-
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0001	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	343,990,778	337,277,500
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0001	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	796,867,099	371,742,855
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0001	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,040,000	2,500,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0001	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113,855,099	37,784,855
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0001	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	672,972,000	331,458,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0001	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190,177,403	188,634,043
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0001	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	190,177,403	188,634,043
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0001	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	543,394,000	327,538,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0001	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	543,394,000	327,538,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0001	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	543,394,000	327,538,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0002		UPT PENDAPATAN PANIAI	2,500,000,000	1,084,582,545
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0002	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1,635,243,500	911,442,045
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0002	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,268,063,500	733,421,045
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0002	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17,502,000	-
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0002	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	284,335,200	283,048,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0002	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	38,364,300	19,276,300
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0002	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69,020,000	69,018,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0002	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	75,242,000	36,060,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0002	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	361,860,000	223,004,600
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0002	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	421,740,000	103,014,145
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0002	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	322,251,000	133,092,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0002	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20,000,000	-
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0002	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39,315,000	-
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0002	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	262,936,000	133,092,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0002	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44,929,000	44,929,000

5.02	5.02.0.00.0.00.22.0002	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44,929,000	44,929,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0002	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	864,756,500	173,140,500
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0002	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	864,756,500	173,140,500
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0002	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	249,878,000	-
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0002	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	190,898,000	-
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0002	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	223,238,000	-
5.02	5.02 0.00.0.00.22.0002	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	200,742,500	173,140,500
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0003		UPT PENDAPATAN MULIA	2,000,000,000	414,098,342
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0003	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1,442,905,000	398,358,342
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0003	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,013,991,500	210,624,342
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0003	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120,216,400	53,631,900
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0003	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16,301,600	-
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0003	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39,775,500	-
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0003	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	147,000,000	100,000,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0003	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	690,698,000	56,992,442
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0003	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	405,013,500	187,734,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0003	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22,500,000	-
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0003	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36,577,500	-
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0003	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	345,936,000	187,734,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0003	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23,900,000	-
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0003	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10,640,000	-
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0003	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13,260,000	-
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0003	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	557,095,000	15,740,000

5.02	5.02.0.00.0.00.22.0003	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	557,095,000	15,740,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0003	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	148,100,000	-
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0003	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	239,445,000	15,740,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0003	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	169,550,000	-
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0004		UPT PENDAPATAN TIMIKA	4,000,000,000	1,369,576,441
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0004	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2,744,105,000	979,534,441
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0004	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,730,809,000	626,767,179
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0004	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30,597,500	-
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0004	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108,904,500	108,904,500
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0004	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	122,800,000	9,900,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0004	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	397,385,000	276,434,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0004	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	325,650,000	117,325,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0004	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	745,472,000	114,203,679
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0004	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	240,000,000	189,900,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0004	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	240,000,000	189,900,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0004	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	576,786,000	152,575,342
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0004	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	70,000,000	1,000,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0004	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120,050,000	18,483,342
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0004	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	386,736,000	133,092,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0004	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	196,510,000	10,291,920
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0004	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114,860,000	3,576,420
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0004	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	81,650,000	6,715,500
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0004	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1,255,895,000	390,042,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0004	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,255,895,000	390,042,000

5.02	5.02.0.00.0.00.22.0004	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	262,145,000	-
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0004	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	200,870,000	-
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0004	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	235,600,000	136,042,000
5.02	5.02.0.00.0.00.22.0004	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	557,280,000	254,000,000
5.03			KEPEGAWAIAN	17,169,756,162	4,147,634,711
5.03	5.03.5.04.0.00.23.0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	17,169,756,162	4,147,634,711
5.03	5.03.5.04.0.00.23.0000	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8,374,815,162	2,831,265,213
5.03	5.03.5.04.0.00.23.0000	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98,217,800	74,600,000
5.03	5.03.5.04.0.00.23.0000	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70,364,000	46,900,000
5.03	5.03.5.04.0.00.23.0000	5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27,853,800	27,700,000
5.03	5.03.5.04.0.00.23.0000	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,070,804,162	1,978,193,106
5.03	5.03.5.04.0.00.23.0000	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,025,804,162	1,978,193,106
5.03	5.03.5.04.0.00.23.0000	5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45,000,000	-
5.03	5.03.5.04.0.00.23.0000	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	419,991,000	-
5.03	5.03.5.04.0.00.23.0000	5.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	419,991,000	-
5.03	5.03.5.04.0.00.23.0000	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,859,688,200	423,783,878
5.03	5.03.5.04.0.00.23.0000	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111,513,200	-
5.03	5.03.5.04.0.00.23.0000	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,267,146,200	226,646,000
5.03	5.03.5.04.0.00.23.0000	5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	369,626,800	-
5.03	5.03.5.04.0.00.23.0000	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,111,402,000	197,137,878
5.03	5.03.5.04.0.00.23.0000	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	909,700,000	354,688,229
5.03	5.03.5.04.0.00.23.0000	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130,000,000	19,138,229
5.03	5.03.5.04.0.00.23.0000	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	779,700,000	335,550,000
5.03	5.03.5.04.0.00.23.0000	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16,414,000	-
5.03	5.03.5.04.0.00.23.0000	5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	16,414,000	-

			Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
5.03	5.03.5.04.0.00.23.0000	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	8,794,941,000	1,316,369,498
5.03	5.03.5.04.0.00.23.0000	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	2,290,980,300	256,692,627
5.03	5.03.5.04.0.00.23.0000	5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	100,000,000	-
5.03	5.03.5.04.0.00.23.0000	5.03.02.1.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	1,300,000,000	105,570,950
5.03	5.03.5.04.0.00.23.0000	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	400,000,000	9,519,828
5.03	5.03.5.04.0.00.23.0000	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	100,000,000	-
5.03	5.03.5.04.0.00.23.0000	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	390,980,300	141,601,849
5.03	5.03.5.04.0.00.23.0000	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	3,603,960,700	591,483,872
5.03	5.03.5.04.0.00.23.0000	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	750,000,000	210,916,600
5.03	5.03.5.04.0.00.23.0000	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1,044,001,000	85,953,514
5.03	5.03.5.04.0.00.23.0000	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	1,809,959,700	294,613,758
5.03	5.03.5.04.0.00.23.0000	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	2,300,000,000	299,418,268
5.03	5.03.5.04.0.00.23.0000	5.03.02.1.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	2,300,000,000	299,418,268
5.03	5.03.5.04.0.00.23.0000	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	600,000,000	168,774,731
5.03	5.03.5.04.0.00.23.0000	5.03.02.1.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	332,218,000	84,370,566
5.03	5.03.5.04.0.00.23.0000	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	67,782,000	-
5.03	5.03.5.04.0.00.23.0000	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	200,000,000	84,404,165
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	19,150,000,000	636,418,142
5.04	5.03.5.04.0.00.23.0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	19,150,000,000	636,418,142
5.04	5.03.5.04.0.00.23.0000	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	19,150,000,000	636,418,142
5.04	5.03.5.04.0.00.23.0000	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	300,000,000	-
5.04	5.03.5.04.0.00.23.0000	5.04.02.1.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	300,000,000	-
5.04	5.03.5.04.0.00.23.0000	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	350,000,000	-

5.04	5.03.5.04.0.00.23.0000	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	350,000,000	-
5.04	5.03.5.04.0.00.23.0000	5.04.02.1.03	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	18,500,000,000	636,418,142
5.04	5.03.5.04.0.00.23.0000	5.04.02.1.03.0004	Pengelolaan Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	18,500,000,000	636,418,142
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1,900,000,000	120,086,715
5.05	5.01.5.05.0.00.21.0000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	1,900,000,000	120,086,715
5.05	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	1,900,000,000	120,086,715
5.05	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.05.03.1.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	800,000,000	120,086,715
5.05	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.05.03.1.01.0001	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	800,000,000	120,086,715
5.05	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.05.03.1.02	Invensi dan Inovasi	1,100,000,000	-
5.05	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.05.03.1.02.0018	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah	600,000,000	-
5.05	5.01.5.05.0.00.21.0000	5.05.03.1.02.0025	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	500,000,000	-

KODE			URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI
1			*2*	*3*	*4*
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	36,999,594,884	14,336,122,926
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	36,999,594,884	14,336,122,926
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000		INSPEKTORAT	36,999,594,884	14,336,122,926
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24,123,911,884	9,469,717,894
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,249,000,000	342,167,000
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	189,000,000	141,357,000
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	130,000,000	-
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	80,000,000	63,500,000
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	150,000,000	137,310,000
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	700,000,000	-
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,556,056,187	3,282,368,561
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,276,056,187	3,160,103,561
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	80,000,000	-
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	200,000,000	122,265,000
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3,320,632,000	918,975,449
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	504,000,000	-
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1,994,108,000	505,632,253
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	391,000,000	186,004,000
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	431,524,000	227,339,196
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8,536,970,515	3,651,784,283

6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24,784,600	10,750,000
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	701,174,000	498,113,400
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,039,729,915	716,088,130
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1,200,000,000	500,745,000
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	99,890,000	-
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4,000,000,000	1,322,156,600
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,471,392,000	603,931,153
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	861,427,300	-
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	280,000,000	-
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	34,404,600	-
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	547,022,700	-
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,361,492,485	1,175,072,601
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200,000,000	10,000,000
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	211,032,485	61,737,401
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,950,460,000	1,103,335,200
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	238,333,397	99,350,000
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42,530,000	-
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	145,810,000	99,350,000
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49,993,397	-
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	9,620,683,000	4,029,401,032
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	7,168,000,000	2,944,528,000
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1,910,000,000	785,313,000
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1,600,000,000	614,024,000
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	1,300,000,000	522,486,000
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	1,408,000,000	750,045,000
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	350,000,000	-
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	200,000,000	137,975,000

6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	400,000,000	134,685,000
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2,452,683,000	1,084,873,032
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	708,565,000	4,650,000
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1,744,118,000	1,080,223,032
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3,255,000,000	837,004,000
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	310,500,000	-
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	157,500,000	-
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	153,000,000	-
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	2,944,500,000	837,004,000
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	500,000,000	286,919,000
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	500,000,000	-
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1,444,500,000	274,504,000
6.01	6.01.0.00.0.00.24.0000	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	500,000,000	275,581,000

KODE			URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI
1			*2*	*3*	*4*
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	74,124,457,594	27,600,167,298
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	74,124,457,594	27,600,167,298
8.01	8.01.0.00.0.00.25.0000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	74,124,457,594	27,600,167,298
8.01	8.01.0.00.0.00.25.0000	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9,644,732,794	4,622,515,747
8.01	8.01.0.00.0.00.25.0000	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	359,892,089	206,473,000
8.01	8.01.0.00.0.00.25.0000	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	160,787,089	8,184,000
8.01	8.01.0.00.0.00.25.0000	8.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	199,105,000	198,289,000
8.01	8.01.0.00.0.00.25.0000	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,413,670,505	1,614,004,547
8.01	8.01.0.00.0.00.25.0000	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,263,670,505	1,614,004,547
8.01	8.01.0.00.0.00.25.0000	8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	150,000,000	-
8.01	8.01.0.00.0.00.25.0000	8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200,000,000	87,888,000
8.01	8.01.0.00.0.00.25.0000	8.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	200,000,000	87,888,000
8.01	8.01.0.00.0.00.25.0000	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4,149,488,200	2,566,384,200
8.01	8.01.0.00.0.00.25.0000	8.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	200,000,000	199,957,000
8.01	8.01.0.00.0.00.25.0000	8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2,700,000,000	2,046,087,000
8.01	8.01.0.00.0.00.25.0000	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,249,488,200	320,340,200
8.01	8.01.0.00.0.00.25.0000	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,521,682,000	147,766,000
8.01	8.01.0.00.0.00.25.0000	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,521,682,000	147,766,000
8.01	8.01.0.00.0.00.25.0000	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	7,200,000,000	1,563,916,700
8.01	8.01.0.00.0.00.25.0000	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	7,200,000,000	1,563,916,700
8.01	8.01.0.00.0.00.25.0000	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,	1,200,000,000	-

			Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
8.01	8.01.0.00.0.00.25.0000	8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1,999,105,300	-
8.01	8.01.0.00.0.00.25.0000	8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka	2,000,000,000	393,370,000
8.01	8.01.0.00.0.00.25.0000	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	2,000,894,700	1,170,546,700
8.01	8.01.0.00.0.00.25.0000	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2,705,724,800	-
8.01	8.01.0.00.0.00.25.0000	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2,705,724,800	-
8.01	8.01.0.00.0.00.25.0000	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	713,980,000	-
8.01	8.01.0.00.0.00.25.0000	8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	713,980,000	-
8.01	8.01.0.00.0.00.25.0000	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	1,277,764,800	-

			Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
8.01	8.01.0.00.0.00.25.0000	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	26,950,000,000	10,000,000,000
8.01	8.01.0.00.0.00.25.0000	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	26,950,000,000	10,000,000,000
8.01	8.01.0.00.0.00.25.0000	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	650,000,000	-
8.01	8.01.0.00.0.00.25.0000	8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	26,300,000,000	10,000,000,000
8.01	8.01.0.00.0.00.25.0000	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	650,000,000	-
8.01	8.01.0.00.0.00.25.0000	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	650,000,000	-
8.01	8.01.0.00.0.00.25.0000	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	650,000,000	-
8.01	8.01.0.00.0.00.25.0000	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	26,974,000,000	11,413,734,851

8.01	8.01.0.00.0.00.25.0000	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	26,974,000,000	11,413,734,851
8.01	8.01.0.00.0.00.25.0000	8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1,300,000,000	-
8.01	8.01.0.00.0.00.25.0000	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	16,000,000,000	11,413,734,851
8.01	8.01.0.00.0.00.25.0000	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8,000,000,000	-
8.01	8.01.0.00.0.00.25.0000	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1,674,000,000	-

KODE			URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI
1			*2*	*3*	*4*
9			UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN	88,033,639,117	39,777,015,919
9.02			KEKHUSUSAN PAPUA	88,033,639,117	39,777,015,919
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000		MAJELIS RAKYAT PAPUA	88,033,639,117	39,777,015,919
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	29,777,442,951	14,863,043,503
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	600,000,000	-
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,000,000	-
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100,000,000	-
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100,000,000	-
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100,000,000	-
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100,000,000	-
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,000,000	-
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,476,180,701	2,512,081,569
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,076,180,701	2,512,081,569
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100,000,000	-
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,000,000	-
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100,000,000	-
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	100,000,000	-
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5,942,612,000	1,154,957,202
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100,000,000	-
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	240,070,000	-
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100,000,000	-

9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	150,000,000	-
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5,000,000,000	1,152,257,202
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	352,542,000	2,700,000
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6,629,350,600	3,124,765,554
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50,028,000	29,990,900
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	314,481,600	-
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	659,984,000	327,418,000
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	150,000,000	72,220,500
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	160,400,000	-
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2,783,000,000	1,464,341,900
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,511,457.000	1,230,794,254
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,605,000	-
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	92,605,000	-
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10,178,915,430	8,071,239,178
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30,000,000	-
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250,983,450	55,995,178
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9,897,931,980	8,015,244,000
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	857,779,220	-
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	339,840,000	-
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	517,939,220	-
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.02	PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROVINSI PAPUA	58,256,196,166	24,913,972,416
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.02.3.01	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota MRP	23,500,592,400	12,510,626,497
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.02.3.01.0001	Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan	854,000,000	293,044,200

9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.02.3.01.0002	Penyaluran Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	9,650,000,000	6,255,000,000
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.02.3.01.0003	Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	4,500,000,000	2,129,323,790
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.02.3.01.0005	Penyusunan Peraturan MRP	500,000,000	281,862,000
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.02.3.01.0006	Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	2,897,313,000	228,279,000
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.02.3.01.0008	Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP	5,099,279,400	3,323,117,507
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.02.3.02	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban	34,755,603,766	12,403,345,919
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.02.3.02.0001	Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota	22,405,603,766	12,362,787,919
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.02.3.02.0009	Monitoring Pelestarian Penyelenggaraan Kehidupan Adat Budaya Asli Papua	4,000,000,000	40,558,000
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.02.3.02.0010	Monitoring Kerukunan Kehidupan Beragama	4,000,000,000	-
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.02.3.02.0011	Monitoring Pemberdayaan Perempuan	4,000,000,000	-
9.02	9.02.0.00.0.00.26.0000	9.02.02.3.02.0012	Peningkatan Kapasitas MRP	350,000,000	-

Tabel 2. 4 Capaian Realisasi Anggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Papua Tengah s.d Triwulan II Tahun 2026

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
			ANGGARAN	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	532.702.511.909,00	109.049.520.008,00	20,47%
2	DINAS KESEHATAN	196.061.784.714,00	79.387.119.935,00	40,49%
3	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	563.381.378.538,00	120.879.342.829,00	21,46%
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	35.578.592.771,00	13.942.252.502,00	39,19%
5	DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	19.293.424.614,00	5.263.527.808,00	27,28%
6	DINAS SOSIAL	57.799.244.146,00	5.344.557.232,00	9,25%
7	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	68.997.096.348,00	29.931.258.267,20	43,38%
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	23.328.627.466,00	3.450.755.753,00	14,79%
9	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN	30.185.041.954,00	5.168.154.838,00	17,12%
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	49.074.388.529,00	10.131.173.455,00	20,64%
11	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	17.408.403.357,00	3.416.582.234,00	19,63%
12	DINAS PERHUBUNGAN	31.191.700.952,00	7.864.906.478,00	25,21%
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	18.990.280.787,00	5.087.570.368,00	26,79%
14	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	18.902.812.907,00	3.733.718.016,00	19,75%
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	19.629.883.980,00	3.956.213.156,00	20,15%
16	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PERIWISATA	52.526.497.557,00	26.425.834.825,00	50,31%
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	32.239.642.433,00	2.808.677.468,00	8,71%
18	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	27.584.619.968,00	3.618.306.553,00	13,12%
19	SEKRETARIAT DAERAH	260.344.649.968,00	134.813.457.099,00	51,78%
20	SEKRETARIAT DPRD	206.728.093.891,00	63.165.490.083,00	30,55%
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	35.511.925.335,00	11.648.247.429,00	32,80%
22	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	633.017.700.256,45	315.488.859.517,00	49,84%

23	UPT PENDAPATAN NABIRE	2.999.999.934,00	1.696.876.353,00	56,56%
24	UPT PENDAPATAN PANIAI	2.500.000.000,00	1.084.582.545,00	43,38%
25	UPT PENDAPATAN MULIA	2.000.000.000,00	414.098.342,00	20,70%
26	UPT PENDAPATAN TIMIKA	4.000.000.000,00	1.369.576.441,00	34,24%
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	36.319.756.162,00	5.019.900.052,00	13,82%
28	INSPEKTORAT	36.999.594.884,00	14.943.565.455,00	40,39%
29	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	74.124.457.594,00	27.788.921.988,00	37,49%
30	MAJELIS RAKYAT PAPUA	88.033.639.117,00	42.072.347.561,00	47,79%
JUMLAH		3.177.455.750.071,45	1.058.965.394.590,20	33,33%

1.3 Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Adapun Permasalahan yang terkait dengan kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2026 sampai dengan triwulan II (dua) 2026, antara lain

1. Adanya Perubahan alokasi Pendapatan APBD Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 yang perlu direkonsiliasi Kembali;
2. terdapat beberapa Program Kegiatan pada Perangkat Daerah yang akan melakukan efisiensi anggaran;
3. Terdapat kebijakan Daerah yang belum terakomodir dalam RENJA RKPD Murni 2026 pada beberapa Perangkat Daerah
4. Masih rendahnya realisasi anggaran pada beberapa perangkat daerah yang terjadi dikarenakan adanya Program Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena faktor keamanan;
5. Terdapat beberapa Program Kegiatan pada Perangkat Daerah yang perlu disesuaikan kembali terutama pada sumber dana Otsus.

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas, sehingga dokumen RKPD perlu dilakukan perubahan.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah tahun 2026 meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran kondisi ekonomi daerah yang ditunjukkan oleh indikator pembangunan berupa laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, kondisi ketenagakerjaan, dan derajat kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan oleh angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan Indeks Gini. Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi ini, digunakan sebagai dasar bagi penyusunan perubahan proyeksi ekonomi di tahun 2026. Sedangkan kerangka pendanaan daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah meliputi analisis terkait sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2026.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan Pembangunan ekonomi Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 mempertimbangkan evaluasi capaian kinerja Pembangunan ekonomi pada Tahun 2025 dan Kondisi ekonomi pada awal tahun 2026. Selain itu arah kebijakan ekonomi Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029. Kebijakan ekonomi daerah disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan ekonomi makro yang ada.

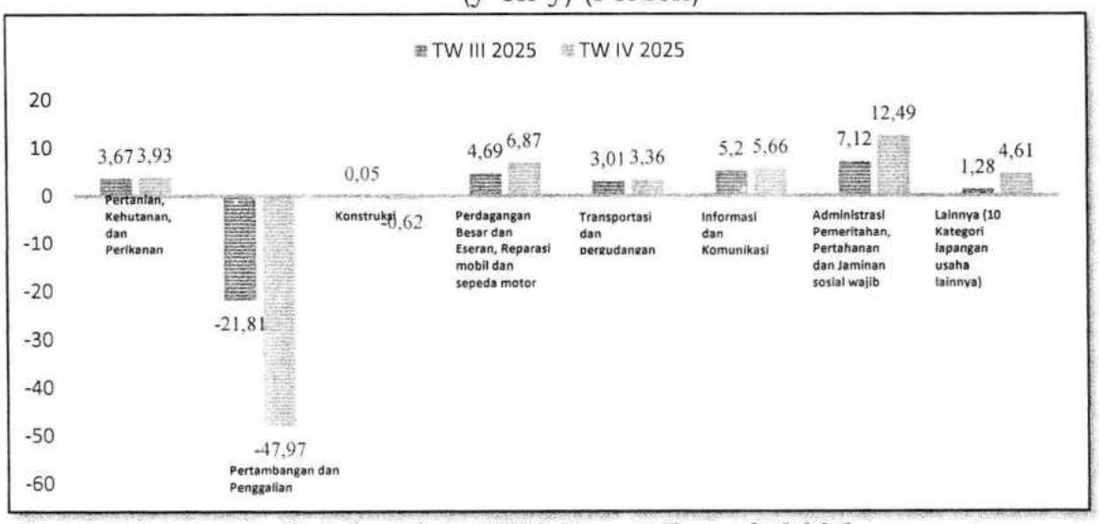
Kebiajakan perekonomian provinsi Papua Tengah di pengaruhi dinamika perkembangan nasional yang mempertimbangkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian nasional dan daerah tahun 2025. Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi Pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah pada tahun 2026.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2025 sampai dengan Tw I Tahun 2026

a) Ekonomi Makro Regional

Kinerja perekonomian Provinsi Papua Tengah pada triwulan IV 2025 dengan lapangan usaha pertambangan dan penggalian tumbuh negative dan mengalami kontraksi sebesar 35,59 % (y-on-y), sedangkan kinerja perekonomian dengan tanpa lapangan usaha pertambangan dan penggalian tumbuh positif sebesar 4,68 % (y-on-y). dari 7 (tujuh belas) lapangan usaha, hamper semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan, kecuali lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi sebesar -47,97 % dan lapngan usaha konstruksi yang mengalami kontraksi sebesar -0,62%. Terdapat tiga lapngan usaha yang mngelami pertumbuhan tertinggi, yitu Lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial wajib sebesar 12,49 %; Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; repasi mobil dan sepeda motor sebesar 6,87 %; serta lapangan usaha industry pengolahan sebesar 6,83%.

Gambar 3. 1 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (Persen)

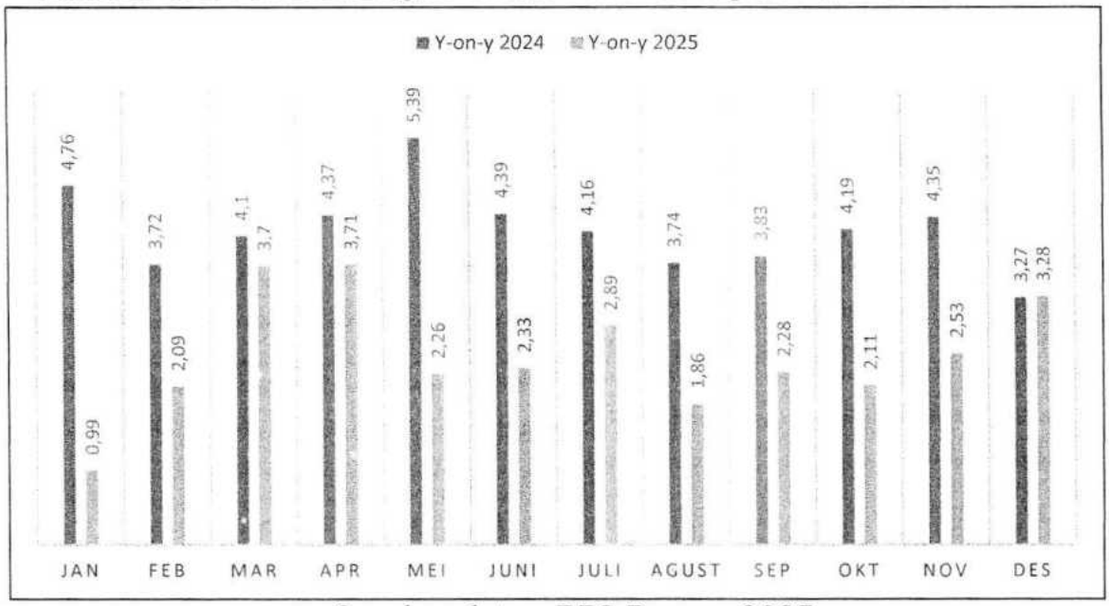


Sumber data: BPS Papua Tengah 2026

b) Perkembangan Inflasi

Tingkat inflasi di Provinsi Papua Tengah pada November 2025 ter jadi inflasi Year on year (y-on-y) sebesar 2,53 % dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebeasr 113,18. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di kabupaten Nabire sebesar 4,05 % dengan IHK sebesar 115,23 dan terendah terjadi di Timika sebesar 1,77 % dengan IHK sebesar 112,16. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran pada: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,22 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,36 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,97 persen; kelompok transportasi sebesar 0,38 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,77 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,88 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 13,57 persen. Sementara itu, kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,29 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,26 persen; serta kelompok pendidikan sebesar 2,28 persen. Adapun kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan adalah kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Adapun Perkembangan Inlfasi papua Tengah 2024-2025 y-on-y dapat dilihat pada table di bawah ini:

Gambar 3. 2 Perkembangan Inflasi Provinsi Papua Tahun 2024 – 2025



Sumber data : BPS Papua, 2025

Adapun Perkembangan harga berbagai komoditas pada November 2025 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan di Provinsi Papua Tengah di dua kabupaten/ kota, pada November 2025 terjadi inflasi y-on-y sebesar 2,53 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 110,39 pada November 2024 menjadi 113,18 pada November 2025. Tingkat inflasi m-to-m sebesar 0,78 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 2,30 persen. Adapun IHK papua Tengah dapat dilihat pada Tebel di bawah ini:

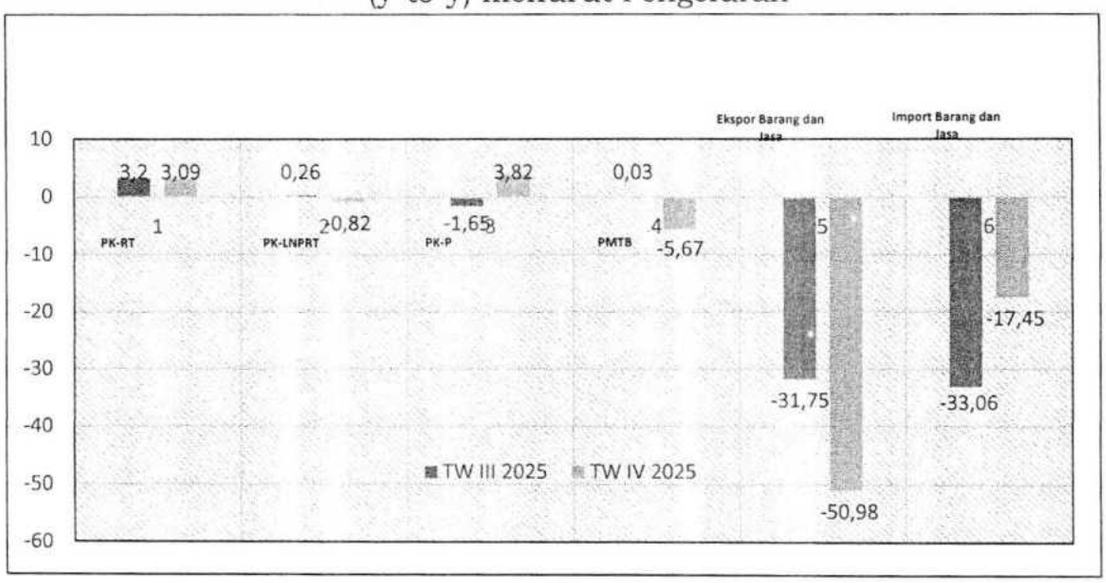
Tabel 3. 1
Perkembangan IKH dan Tingkat Inflasi Papua Tengah 2024-2025 (y-ony)

Kelompok Pengeluaran	IHK November 2024	IHK Desember 2024	IHK November 2025	Tingkat Inflasi *m-to-m* November 2025[1] (%)	Tingkat Inflasi *y-to-d* November 2025[2] (%)	Tingkat Inflasi *y-on-y* November 2025[3] (%)	Andil Inflasi *m-to-m* November 2025 (%)	Andil Inflasi *y-on-y* November 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum	**110,39**	**110,64**	**113,18**	**0,78**	**2,30**	**2,53**	**0,78**	**2,53**
Makanan, Minuman, dan Tembakau	114,43	114,82	118,11	1,20	2,87	3,22	0,54	1,43
Pakaian dan Alas Kaki	101,31	100,95	101,02	0,24	0,07	-0,29	0,01	-0,01
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	104,90	104,90	105,28	-0	0,36	0,36	-0	0,05
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	107,55	107,51	107,27	-0,10	-0,22	-0,26	-0	-0,01
Kesehatan	105,63	106,18	108,77	0,36	2,44	2,97	0,01	0,10
Transportasi	111,22	112,47	111,64	1,67	-0,74	0,38	0,16	0,04
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,98	100,98	100,98	-0	-0	-0	-0	-0
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	105,81	105,83	107,68	0,12	1,75	1,77	-0	0,02
Pendidikan	102,46	102,46	100,12	-0	-2,28	-2,28	-0	-0,08
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	113,87	114,19	117,15	0,07	2,59	2,88	-0	0,12
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	118,11	117,13	134,14	0,90	14,52	13,57	0,06	0,87

3.1.2 PDRB/Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan Nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu tahun. Semakin besar pertumbuhan ekonomi tahunan menunjukkan semakin besar nilai tambah dari output barang dan jasa yang dihasilkan ekonomi daerah dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Tengah pada Tw. IV 2025 mengalami Kontraksi sebesar -35,59% dibandingkan dengan Tw IV 2024 (y-on-y). Kontraksi sangat dalam ini disebabkan oleh kontraksi pada komponan ekspor barang dan jasa yang mencapai -50,98 %. Selain komponen ekspor barang dan jasa, beberapa komponen PMTB sebesar -5,67 % dan PK-LNPRT sebesar -0,82%. Berbanding terbalik, komponen PK-P mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 3,82 % dan Komponen PK-RT Tumbuh sebesar 3,09 %. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa mengalami Kontraksi sebesar -17,45%. Adapun Pertumbuhan Ekonomi Papua Tengah Triwulan IV Tahun 2025 menurut pengeluran dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Gambar 3. 3
Pertumbuhan Ekonomi Papua Tengah Triwulan IV Tahun 2025
(y-to-y) menurut Pengeluran



Sumber Data: BPS Papua Tengah 2026

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah dilakukan secara utuh dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. APBD disusun dengan mempedomani Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan APBD tersebut mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/Public Private Partnership (PPP), swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam Rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Otonomi daerah yang telah digulirkan melalui undang-undang Pemerintahan daerah sebenarnya memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada Pemerintah daerah, untuk melakukan peran yang lebih aktif Dalam penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan Aktifitas lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penetapan Arah kebijakan Keuangan Daerah pada Rencana Kerja Tahun 2026 Perangkat Daerah (PD) di Provinsi Papua Tengah ditetapkan berdasarkan mandatory spending untuk alokasi Pendidikan 20%, Kesehatan 15%, dan Infrastruktur 25%. Penetapan ini dilakukan semata-mata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, dengan program kegiatan pemerataan tingkat pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, dan peningkatan taraf hidup ekonomi masyarakat.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran "horizontal" dan kewajaran "vertikal". Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD menunjukan bahwa daerah mempu melaksanakan desentralisasi dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. PAD diartikan sebagai penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari : (a). Pajak Daerah, (b). Retribusi Daerah, (c). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Sah.

Pada tahun anggaran 2025, dilakukan penyesuaian terhadap struktur anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tengah yang mencakup perubahan pada komponen Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah. Pendaptan Daerah Provinsi Papua Tengah pada tahun 2025.

Tabel 3. 2 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023-2025

No	Uraian	Realisasi		
		2023	*2024*	*2025*
4	PENDAPATAN	2.722.314.216.947,82	4.206.324.912.971,52	4.125.903.885.053,88
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	535.666.746.146,82	644.437.600.762,80	601.701.085.583,88
4.1.01	Pajak Daerah	525.237.697.578,00	609.116.185.732,00	543.381.687.062,40
4.1.02	Retribusi Daerah	2.500.000.000,00	0	3.540.000.000

4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.426.548.568,82	35.321.415.030,80	58.315.858.521,48
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.830.679.615.000,00	2.720.974.213.562,00	2.361.794.444.381,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.830.679.615.000,00	2.720.974.213.562,00	2.361.794.444.381,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0	0	0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	386.634.134.688,00	840.913.098.646,72	1.162.402.267.089,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	386.634.134.688,00	840.913.098.646,72	1.081.088.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			1.161.327.267.089,00

Sumber Data: BPPKAD Provinsi Papua Tengah 2026

Mendasari pada kondisi realisasi Tahun 2025 dan kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah, maka diproyeksikan pendaptan daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 3 Proyeksi Pendapatan Provinsi Papua Tengah Tahun 2026

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2026	
		Sebelum	Sesudah
4	PENDAPATAN	2.430.674.427.061,00	2.392.727.030.731,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	543.070.387.742,00	602.867.352.921,00
4.1.01	Pajak Daerah	527.244.037.742,00	556.261.002.921,00
4.1.02	Retribusi Daerah	76.350.000,00	76.350.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	15.750.000.000,00	46.530.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.047.833.162.000,00	1.063.270.390.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.047.833.162.000,00	1.063.270.390.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0	0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	839.770.877.319,00	726.589.287.810,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.075.000.000,00	6.075.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	838.695.877.319,00	720.514.275.410,00

Sumber Data : BPPKAD Provinsi Papua Tengah, 2026

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pembangunan kedepan membutuhkan suatu perencanaan sistimatis terutama terhadap kerangka pendanaan dan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka

menengah daerah selama empat tahun kedepan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah, belanja, pengeluaran pembiayaan yang wajib/mengikat dan prioritas utama serta belanja tidak mengikat, dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan selama empat tahun ke depan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program, kegiatan maupun sub kegiatan.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulant terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrument pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran, di mana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Kebijakan belanja Provinsi Papua Tengah tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program prioritas pembangunan daerah, dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif.

Tabel 3. 4 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023-2025 (Rupiah)

No	Uraian	Realisasi		
		2023	2024	2025
5	BELANJA	2.144.154.911.867,84	3.725.583.867.579,43	3.780.716.535.424,56
5.1	Belanja Operasi	1.283.302.415.487,84	2.358.755.366.706,24	2.497.808.873.212,07
5.1.01	Belanja Pegawai	145.799.279.700,00	290.399.100.094,00	404.779.585.348,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	893.734.737.251,84	1.600.400.671.607,24	1.712.948.635.598,07
5.1.04	Belanja Subsidi	0	787.181.115,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	132.329.969.336,00	269.618.393.800,00	372.730.652.266,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	111.438.429.200,00	197.550.020.090,00	7.350.000.000,00
5.2	Belanja Modal	620.259.400.072,00	914.393.133.865,19	462.914.175.214,49
5.2.01	Belanja Modal Tanah	154.830.858.865,00	15.550.590.000,00	2.052.632.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.215.173.953,00	261.060.482.102,00	75.162.135.861,00

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	71.364.077.398,00	148.479.525.834,00	75.663.270.418,82
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	260.700.606.847,00	481.889.243.504,19	305.450.854.171,67
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	632.325.157,00	1.747.717.420,00	129.315.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	7.516.357.852,00	5.665.575.005,00	4.455.967.763,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	8.808.933.700,00	22.230.464.433,00	38.867.755.600,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.808.933.700,00	22.230.464.433,00	38.867.755.600,00
5.4	Belanja Transfer	231.784.162.608,00	430.204.902.575,00	781.125.731.398,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	196.784.162.608,00	336.812.585.794,00	265.000.731.398,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	35.000.000.000,00	93.392.316.781,00	516.125.000.000,00
Jumlah Belanja		2.144.154.911.867,84	3.725.583.867.579,43	3.780.716.535.424,56

Sumber Data: BPPKAD Provinsi Papua Tengah 2026

Belanja daerah tahun 2025 diproyeksikan dengan baseline penganggaran tahun 2023-2025 Dengan keterbatasan kapasitas fiskal yang ada, belanja daerah diarahkan untuk: 1) pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), 2) membiayai kewajiban serta belanja wajib dan mengikat, 3) membiayai program yang akan berdampak pada peningkatan PAD. Pemenuhan standar pelayanan minimal dilakukan melalui DAU yang sudah diarahkan, untuk memastikan alokasi anggaran secara konsisten dan kontinyu untuk membiayai SPM. Pemenuhan kewajiban serta belanja wajib dan mengikat seperti pembayaran hutang pinjaman daerah, penyertaan modal, alokasi anggaran untuk menjawab arahan pusat, belanja gaji ASN, membiayai tugas belajar yang sudah berjalan, membiayai operasional kantor selama 1 tahun. Sedangkan anggaran program yang berdampak pada peningkatan PAD diarahkan untuk optimalisasi, rehabilitasi, peremajaan ataupun restocking asset-aset daerah yang akan mendatangkan PAD ataupun pengembangan potensi-potensi PAD. Proyeksi belanja tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 5 Proyeksi Belanja Provinsi Papua Tengah 2026

No	Uraian	Proyeksi 2026	
		Sebelum	Sesudah
5	BELANJA	2.902.320.608.072,45	3.785.179.355.072,85
5.1	Belanja Operasi	1.996.674.645.091,05	2.667.836.978.944,45
5.1.01	Belanja Pegawai	521.514.078.624,05	570.198.688.682,95
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.223.365.327.035,00	1.647.425.140.524,00
5.1.04	Belanja Subsidi	9.800.000.000,00	9.800.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	219.585.239.432,00	421.865.205.337,50
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	22.410.000.000,00	18.547.944.400,00
5.2	Belanja Modal	580.933.678.647,00	794.130.091.794,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	20.109.000.000,00	21.109.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.575.078.922,00	40.950.938.752,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	445.691.768.925,00	435.942.762.604,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	92.598.236.800,00	295.327.390.438,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	259.594.000,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.700.000.000,00	800.000.000,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000,00	48.500.000.000,00

5.3.01	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000,00	48.500.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	274.712.284.334,40	280.030.478.320,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	244.006.034.334,40	249.324.228.320,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	30.706.250.000,00	30.706.250.000,00
Jumlah Belanja		2.902.320.608.072,45	3.785.179.355.072,85

*Sumber Data: BPPKAD Prov Papua Tengah, 2026 (data diolah)***

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam perencanaan anggaran, pemerintah daerah dapat merencanakan anggaran pendapatan dan belanjanya defisit atau surplus. Pada kenyataannya, di dalam perencanaan yang dilakukan seringkali terjadi defisit anggaran daerah. Defisit tersebut harus dapat ditutup dengan pembiayaan daerah. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari dua pos yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pemerintah daerah memiliki kecenderungan untuk menutup defisit daerah dari Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya atau dengan melakukan pinjaman daerah atau obligasi daerah yang berada di pos penerimaan pembiayaan. Dalam perencanaan dokumen rencana jangka menengah, tidak diperkenankan untuk merencanakan apalagi memproyeksi SiLPA. Pos pengeluaran pembiayaan juga memiliki dua komponen utama yang banyak digunakan oleh pemda yaitu penyertaan modal (investasi daerah) dan pembayaran pokok utang. Adapun realisasi pembiayaan Provinsi papua Tengah Tahun 2023-2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3. 6 Realisasi Pembiayaan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023-2025 (Rupiah)

Kode	Uraian	Realisasi		
		2023	2024	2025
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25.392.267.957,00	603.491.573.036,98	1.084.232.618.429,07
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.392.267.957,00	603.491.573.036,98	1.084.232.618.429,07
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-

6.2.01	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;	-	-	-
6.2.02	Penyertaan modal daerah;	-	-	-
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau	-	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.	-		

*Sumber Data: BPPKAD Prov Papua Tengah, 2026 (data diolah)***

Mendasari pada kondisi realisasi Tahun 2025 dan kebijakan pemerintah, maka diproyeksikan pembiayaan daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 7 Realisasi Pembiayaan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 (Rupiah)

Kode	Uraian	Proyeksi 2026	
		Sebelum	Sesudah
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	471.646.181.011,45	1.397.770.518.327,45
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	471.646.181.011,45	1.397.770.518.327,45
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00
6.2.01	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;	-	-
6.2.02	Penyertaan modal daerah;	-	-
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan;	-	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.	-	

*Sumber Data: BPPKAD Prov Papua Tengah, 2026 (data diolah)***

3.2.4 Kebijakan Belanja Daerah yang Bersumber Pada Dana Otonomi Khusus

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi dasar untuk percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua. Untuk itu, dukungan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Tengah perlu dikelola secara akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan tepat sasaran, serta dialokasikan untuk melakukan penguatan penataan

daerah provinsi di wilayah Papua Tengah sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan aspirasi masyarakat.

Rumusan materi muatan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dibangun dengan konstruksi yang bersumber dari dua dasar hukum, yaitu:

1. UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
2. Kristalisasi penggalian aspirasi masyarakat di Provinsi Papua yang menjadi karakter kekhususan dan kebutuhan prioritas bagi masyarakat Papua.

Adapun kebijakan Otsus menurut UU Nomor 21 Tahun 2001 mengamanatkan tiga pilar penting sebagai penyelenggara pemerintahan di Provinsi Papua dan Papua Barat, yaitu :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP);
2. Pemerintah daerah (Gubernur beserta perangkat daerah); dan
3. Majelis Rakyat Papua (MRP).

Dua (2) Formulasi Kebijakan Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 pasal 34 ayat (3) huruf e dan f, yaitu :

1. Dana Otsus *Block Grant* (setara 1% dari DAU Nasional) yang digunakan untuk:
   - Pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelaksanaan pelayanan publik;
   - Peningkatan kesejahteraan orang asli Papua (OAP), penguatan kelembagaan adat; dan
   - Hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dana Otsus *Specific Grant* (setara 1,25% dari DAU Nasional) digunakan untuk:
   - Belanja pendidikan paling sedikit 30%;
   - Belanja kesehatan paling sedikit 20%; dan
   - Belanja pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Dana Tambahan Insfrastruktur Papua Tengah ditujukan untuk :
   - Pendanaan pembangunan infrastruktur Perhubungan;
   - Insfrastruktur energi listrik;
   - Insfrastruktur air bersih;
   - Insfrastruktur telekomunikasi; dan
   - Insfrastruktur Sanitasi lingkungan.

Selanjutnya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, serta Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tengah sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua. Adapun Alokasi Dana Otonomi Khusus yang telah di bagi ke beberapa Perangkat Daerah dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3. 8 Alokasi Belanja Daerah yang Bersumber Dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tengah Tahun 2026

No	Uraian	Alokasi 2026	
		Sebelum	Sesudah
A	Total Dana Otsus	305.239.491.000,00	839.599.607.814,00
1	Provinsi	305.239.491.000,00	839.599.607.814,00
B	OTSUS Penerimaan Umum (1%)	92,903.936.000,00	224.905.751.964,00
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	29.973.458.400,00	29.973.458.400,00
2	Dinas Sosial	16.800.000.000,00	16.800.000.000,00
3	Inspektorat	600.000.000,00	600.000.000,00
4	Dinas Kesehatan	44.930.936.000,00	44.930.477.600,00
5	Badan Pendapatan,Pengelolaan Keuangan,	600.000.000,00	600.000.000,00
6	Dinas Pendidikan	0	132.001.815.964,00
C	OTSUS Berbasis Kinerja (1,25 %)	119.907.122.000,00	273.341.261.212,00
1	Dinas Pendidikan	35.265.886.600,00	67.265.886.600,00
2	Dinas Kesehatan	23.981.424.400,00	56.481.424.400,00
3	Dinas Peternakan dan Perkebunan	9.984.520.334,00	37.834.520.334,00
4	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan	9.984.520.333,00	10.634.520.333,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.984.520.333,00	22.484.520.333,00
6	Dinas Sosial	0	6.000.000.000,00
7	Badan Pendapatan,Pengelolaan Keuangan,	0	30.706.250.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Esdm	0	8.059.612.008,00
9	Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	0	4.750.000.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak,Keluarga Berencana	0	1.500.000.000,00
11	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Dan Menengah,Perindustrian Dan Perdagangan	0	27.624.527.204,00
D	Dana Tambahan Insfrastruktur	92.428.433.000,00	341.352.594.638,00
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perubahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	55.457.059.800,00	254.381.221.438,00
2	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi dan Sumber Daya Mineral	36.971.373.200,00	86.971.373.200,00
E	SiLPA OTSUS Penerimaan Umum (1%)		132.001.815.964,00
	Dinas Pendidikan	0	132.001.815.964,00
F	SiLPA OTSUS Berbasis Kinerja (1,25 %)		153.434.139.212,00
	Dinas Pendidikan	0	32.000.000.000,00
	Dinas Kesehatan	0	32.500.000.000,00
	Dinas Sosial	0	6.000.000.000,00
	Dinas Kelautan Perikanan	0	12.500.000.000,00
	Dinas Tanaman Pangan,Holikultura Dan Ketahanan Pangan	0	650.000.000,00
	Dinas Peternakan Perkebunan	0	27.850.000.000,00
	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Esdm	0	8.059.612.008,00

	Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	0	4.750.000.000,00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak,Keluarga Berencana	0	1.500.000.000,00
	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Dan Menengah,Perindustrian Dan Perdagangan	0	27.624.527.204,00
G	SiLPA Dana Tambahan Insfrastruktur		248.924.161.638,00
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perubahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0	198.924.161.638,00
	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Esdm	0	50.000.000.000,00
H	Tambahan Otsus 1%		63.191.179.000,00
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perubahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0	28.841.291.126,00
	Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0	2.205.887.874,00
	Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung	0	550.000.000,00
	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0	9.700.000.000,00
	Sekretariat Daerah	0	5.394.000.000,00
I	Tambahan Otsus 1,25%		101.536.922.000,00
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	14.600.000.000,00
	Dinas Kesehatan	0	33.098.094.578,00
	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan	0	4.180.588.957,00
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	0	10.000.000.000,00
	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0	1.600.000.000,00
	Dinas Kelautan dan Perikanan	0	27.460.030.428,00
	Dinas Peternakan dan Perkebunan	0	10.598.208.037,00
J	Tambahan DTI		191.317.886.000,00
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perubahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0	91.417.886.000,00
	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi dan Sumber Daya Mineral	0	12.000.000.000,00
	Dinas Perhubungan	0	87.900.000.000,00

Sumber Data: Data diolah Bapperida Prov Papua Tengah, 2026

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada Perubahan RKPD tahun 2026 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target Tujuan, Sasaran dan Isu Strategis Provinsi Papua Tengah sebagaimana yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029. Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2026.

Perubahan RKPD Provinsi Papua Tengah merupakan bagian tahapan RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 - 2045, dengan tujuan untuk memperkuat Papua Tengah yang mandiri secara sosial, budaya, ekonomi dan politik sudah terbentuk dan tertanam di dalam setiap individu orang asli Papua. Meskipun sudah berdiri sebagai daerah otonom yang berbeda, namun arahan provinsi induk dapat dipertimbangkan untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan bila memiliki kesamaan muatan dengan upaya penyelenggaraan urusan di Provinsi Papua Tengah. Pada dasarnya, prioritas pembangunan daerah dimaksudkan untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional sebagaimana yang dimuat dalam RKP Tahun 2026.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan diartikan sebagai sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang ditentukan, sedangkan sasaran merupakan gambaran terhadap pencapaian tujuan. Rumusan terhadap tujuan dan sasaran Daerah telah tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dimana dokumen tersebut merupakan dokumen transisi, yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen tahunan Provinsi Papua Tengah. Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah harus sejalan dengan memperhatikan Arah Kebijakan Tahunan atau Tema Pembangunan Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 yaitu "Penguatan SDM dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bermartabat dan Efektif". Berkenaan dengan perwujudan tema pembangunan Provinsi Papua Tengah maka telah menghasilkan dan menetapkan 9 (Sembilan) Tujuan dan 17 (tujuh belas) Sasaran Pembangunan Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 dengan penjelasan sebagai berikut.

1. T1 Mewujudkan Potensi Individu dan komunitas melalui pendidikan yang berpotensi dan kompeten:
   - S1 Papua Tengah Cerdas;
2. T2 Mewujudkan inisiatif kesehatan yang inovatif:
   - S2 Papua Tengah Sehat;
3. T3 Meningkatkan Potensi Sumber daya alam dengan Mengedepankan Prinsip-Prinsip Keadilan dan Kesetaraan:
   - S3 Perlindungan sosial yang adaptif ketahanan energi;
   - S4 Terwujudnya Iptek, Inovasi dan produktivitas Ekonomi Papua Tengah;
4. T4 penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan transparan dengan mengimplementasikan sistim administrasi publik berbasis digitalisasi teknologi:
   - S5 Terwujudnya Regulasi dan Tata kelola yang Berintegrasi dan Adaptif di Papua Tengah;
   - S6 Terwujudnya Transformasi Digital Papua Tengah;
   - S7 Terwujudnya Ketangguhan Kepemimpinan daerah Papua Tengah
5. T5 Memantapkan lingkungan yang aman, tentram, damai dan tertib:
   - S8 Terwujudnya Hukum Berkeadilan, Keamananan DaerahTangguh, dan Demokrasi;
6. T6 Meningkatkan kelestarian kekayaan adat, budaya dan kearifan lokal sebagai fondasi ketahanan sosial yang mantap;

- S9 Terwujudnya Beragama maslahat dan berkebudayaan maju;
- S10 Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif;

7. T7 Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan

- S11 Terwujudnya Integritas Ekonomi Domestik dan Global di papua Tengah;
- S12 Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Daerah Papua Tengah;

8. Tercapainya peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah sebagai pilar utama melalui pembangunan jaringan transportasi dan komunikasi yang lebih baik dan merata;

- S13 Perkotaan dan Pedesaan sebagai pusat Pertumbuhan Ekonomi di papua Tengah;

9. Tercapainya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang ramah lingkungan melalui pemanfaatan teknologi hijau dan inovasi lokal dengan memprioritaskan pembangunan di daerah tertinggal, pinggiran dan terisolir.

- S14 Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau di Papua Tengah;
- S15 Terwujudnya Lingkungan hidup berkualitas;
- S16 Terwujudnya berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan;
- S17 Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

Penguatan SDM dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bermartabat dan Efektif sudah menjadi prioritas dan tetap akan menjadi prioritas utama dalam pembangunan periode 2026, dengan fokus pada pembangunan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Papua Tengah serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di Provinsi Papua Tengah, maka dapat dirumuskan tujuan, sasaran, program, indikator serta target kinerja pembangunan sebagai upaya pembangunan Provinsi Papua Tengah seperti pada **Error! Reference source not found.** :

Tabel 4. 1 Tujuan, Sasaran, Program, Indikator dan Target Kinerja RPJMD Papua Tengah pada Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan Indikator	Target 2026
Tujuan 1: Mewujudkan Potensi Individu dan komunitas melalui pendidikan yang berpotensi dan kompeten.		Indeks Pembangunan manusia	(%)	61,3
	Sasaran 1 : Papua Tengah Cerdas	Hasil Pembelajaran : Presentase Kabupaten/Kota yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen tingkat nasional untuk : - Literasi Membaca - Numerasi	Persen (%) Persen (%)	12,50-12,50 0,00-12,50
		Persentase satuan		

		pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi Membaca - Numerasi	 Persen (%) Persen (%)	 21,24-23,74 15,68-18,18
		Rata-rata Lama Sekolah Penduduk usia diatas 15 tahun (tahun)	(%)	6,17
		Harapan Lama Sekolah	(%)	9,76
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	(%)	9,49
		Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi	(%)	77,99
Tujuan 2 : Mewujudkan inisiatif kesehatan yang inovatif		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,53
	Sasaran 2 : Papua Tengah Sehat	Usia harapan Hidup (UHH) (Tahun)	Tahun	69,2
		Kesehatan Ibu dan Anak: Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup)	Jiwa	410
		Pravelensi Stunting (pendek dan Sangat Pendek) Pada balita (%)	Persen (%)	30,67
		Penanganan Tuberkolosis : Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	Persen (%)	85
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	Persen (%)	85
		Eliminasi Malaria Per Kabupaten	Persen (%)	65
		Jumlah Infeksii Baru HIV per 1000	Jiwa	3671

		Penduduk di daerah terinveksi		
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan Provinsi (%)	Persen (%)	99
Tujuan 3 : Meningkatkan Potensi Sumber daya alam dengan Mengedepankan Prinsip-Prinsip Keadilan dan Kesetaraan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen (%)	7,9
		Pendapatan Perkapita (juta Rupiah)	(juta Rupiah)	141,7
	Sasaran 3 : Perlindungan sosial yang adaptif ketahanan energi	Tingkat Kemiskinan (%)	Persen (%)	26,50 - 27,00
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	Persen (%)	26,18
		Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	Persen (%)	15
		Jumlah Penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitas dari unit layanan disabiitas bidang ketenagakerjaan dan/atau dari dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	orang	200
		Jumlah Unit Layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan di Tingkat kab/kota/provinsi	unit	3
	Sasaran 4 : Terwujudnya Iptek, Inovasi dan produktivitas Ekonomi Papua Tengah	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Rasio	2,17
		Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen (%)	4,32
		Pengembangan Pariwisata : Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	Rasio	0,222
		Presentase Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (orang)*	Rasio	4,67
		Proporsi PDRB	Persen	0,1

		Ekonomi Kreatif (%)	(%)	
		Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD : Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	Persen (%)	0,367
		Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	Persen (%)	1,63*
		Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	Persen (%)	0,46
		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	Persen (%)	1,172
		Return on Aset (ROA) BUMD (%)	Persen (%)	2,03
		Penciptaan Lapangan Kerja yang baik : Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen (%)	2,65 – 3,12
		Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	Persen (%)	21,5
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	Persen (%)	53,45 – 65,00
		Tingkat Penguasaan Iptek (%)	Persen (%)	20
Tujuan 4 : penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan transparan dengan mengimplementasi kan sistim administrasi publik berbasis digitalisasi teknologi.		Indeks Reformasi Birokrasi	Persen (%)	55
	Sasaran 5 : Terwujudnya Regulasi dan Tata kelola yang Berintegrasi dan Adaptif di Papua Tengah	Indeks Reformasi Hukum	Persen (%)	70,3
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persen (%)	2,12
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	1,12
		Indeks Integritas Nasional	Indeks	63,65
	Sasaran 6 : Terwujudnya Transformasi Digital Papua Tengah	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Indeks	3,6
		Rasio Elektrifikasi RT (%)	Rasio	47,36
	Sasaran 7 : Terwujudnya Ketangguhan Kepemimpina n daerah Papua Tengah	Indeks Kepemimpinan Daerah	Indeks	Tinggi
		Presentase Penurunan Konfilk Sara	Persen (%)	40
Tujuan 5 : Memantapkan		Penurunan Angka Kriminalitas	Persen (%)	10

lingkungan yang aman, tentram, damai dan tertib				
	Sasaran 8 : Terwujudnya Hukum Berkeadilan, Keamananan DaerahTangguh, dan Demokrasi Substansi pada Provinsi Papua Tengah	Usulan Proksi : Presentase penegakan Hukum Peraturan Daerah	Persen (%)	71,4
		Presentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Persen (%)	62,5
		Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya (%)	Persen (%)	74,7
		Indeks Demokrasi Daerah	Indeks	60,00-63,25
Tujuan 6 : Meningkatkan kelestarian kekayaan adat, budaya dan kearifan lokal sebagai fondasi ketahanan sosial yang mantap		Indeks Kohesi Sosial	Skor	2,5
	Sasaran 9: Terwujudnya Beragama maslahat dan berkebudayaan maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	49,54-49,61
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	81,18-81,22
	Sasaraan 10 : Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	52,36
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	82,05-82,17
Tujuan 7 : Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan		Presentase Luas Hutan yang dikelola Masyarakat	Persen(%)	6,50
	Sasaran 11 : Terwujudnya Integritas Ekonomi Domestik dan Global di papua Tengah	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	Indeks	19,8
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Persen (%)	24,64-25,48
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	Persen (%)	48,82-49,14
	Sasaran 12 : Terwujudnya Stabilitas Ekonomi	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	Persen (%)	0,45
		Tingkat Inflasi (%)	Persen (%)	3,6-5,3

	Daerah Papua Tengah	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan: Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	Persen (%)	17,59
		Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	Persen (%)	0,30
		Nilai Transaksi saham per Provinsi Berupa Nilai rata-Rata Tahunan	Nilai	984.209
		Total Kredit/PDRB (%)	Persen (%)	13,18
		Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD)	Persen (%)	2,76
		Inklusi Keuangan (%)	Persen (%)	87,29
Tujuan 8 : Tercapainya peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah sebagai pilar utama melalui pembangunan jaringan transportasi dan komunikasi yang lebih baik dan merata		Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)	Indeks	1,89
	Sasaran 13 : Perkotaan dan Pedesaan sebagai pusat Pertumbuhan Ekonomi di papua Tengah	Kota Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan: Proporsi Kontribusi PDRB wilayah Provinsi Terhadap Nasional	Persen	0,74
		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	Persen	23,47
		Presentase Desa mandiri	Persen	2,82
		Presentase Mantap Jalan	Persen	35
Tujuan 9 : Tercapainya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang ramah lingkungan melalui pemanfaatan teknologi hijau dan inovasi lokal dengan memprioritaskan pembangunan di		Presentase Penurunan Jumlah Desa Bersattus Tertinggal	Persen (%)	0,43

daerah tertinggal, pinggiran dan terisolir.				
	Sasaran 14 : Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau di Papua Tengah	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau : Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	62,23
		Indeks Ekonomi Biru	Indeks	23,52
		Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	Persen (%)	26,6
	Sasaran 15 : Terwujudnya Lingkungan hidup berkualitas	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks	0,389
		Kualitas Lingkungan Hidup: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	82,56
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	Persen (%)	5,89
		A. Pengelolaan Sampah - Timbunan sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Persen (%)	18,00
		- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	Persen (%)	39
	Sasaran 16 : Terwujudnya berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan: Ketahanan Energi		
		Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	(Kwh)	334
		Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	Persen (%)	90
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen (%)	33
		Ketahanan Air		
		Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	Persen (%)	1,5
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum	Persen (%)	20

		Perpipaan (%)		
	Sasaran 17 : Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana	Indeks	191,94 - 185,88
		Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		
		Kumulatif	Persen (%)	11,5
		Tahunan	Persen (%)	30,4

Sumber : RPJMD Provinsi Papua Tengah 2025-2029

Perumusan Tujuan, Sasaran, Program, Indikator dan Target Kinerja mengacu pada hasil rumusan RPJMD Papua Tengah Tahun 2025-2029. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan pembangunan di Provinsi Papua Tengah dengan Dokrenda jangka menengah, sehingga penyelenggaraan urusan tetap dilakukan dalam koridor yang sama.

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2026

Tema pembangunan tahunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD). Dalam hal ini, tema pembangunan daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 disusun dengan berpedoman kepada kebijakan nasional yang tertuang dalam RKP 2026, juga dengan internalisasi aspek-aspek perencanaan pembangunan daerah lainnya seperti Otonomi Khusus Papua dan dokumen Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (RIPPP) yang merupakan amanat PP Nomor 107 Tahun 2021. Adapun tema Perubahan RKPD Provinsi Papua Tengah adalah : "Penguatan SDM dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bermartabat dan Efektif". Yang merupakan akselerasi atau perpaduan arah kebijakan tahunan antara RPJPD dan RPJMD Provinsi Papua Tengah.

1. Penyelarasan dengan RPJPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 - 2045

Sebagai bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Perubahan RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 perlu mempertimbangkan arahan pada RPJPD Provinsi Papua Tengah. Penyelarasan yang dilakukan mempertimbangkan visi, misi, dan tema pembangunan tahap I (tahun 2025 – 2045) yang memiliki lokus di dalam Provinsi Papua Tengah. Adapun visi, misi, dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Papua Tengah adalah sebagai berikut.

Visi RPJPD: "Terwujudnya Papua Tengah yang Adil, Berdaya Saing, Maju dan Berkelanjutan"

Misi RPJP:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial dengan Memantapkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Mewujudkan Trasnformasi Ekonomi dengan Pemberdayaan Ekonomi Lokal;
3. Mewujudkan Transformasi tata Kelola dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
4. Memantapkan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban umum serta stabilitas daerah
5. Memantapkan Ketahanan sosial budaya dan Ekologi yang Berkelanjutan
6. Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang adil dan merata dengan Meningkatkan Aksesibilitas Infrastuktur Wilayah

7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan Terutama Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu.
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan daerah

Pada periode pembangunan Tahap I, visi pembangunan Papua Tengah yaitu Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Responsif, Efektif, dan Efisien serta peningkatan Akses Pelayanan Dasar bagi Masyarakat.

Pada tahap I ini, Provinsi Papua Tengah diharapkan untuk dapat mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi serta kemapaman ekonomi lokal yang berdaya saing, serta dari sisi infrastruktur Provinsi Papua Tengah perlu menyiapkan Infrastruktur Pemerintahan dan Infrastruktur dasar yang memadai dalam rangka Pemenuhan kebutuhan Pemerintah Daerah. Selain itu, Provinsi Papua Tengah juga diarahkan untuk menangani penurunan presentase penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, ketersediaan dan kemapaman pranata hukum yang didukung oleh ketahanan dan keamanan, serta sikap hidup toleran. Efisiensi dan efektifitas pembangunan dapat terus diukur melalui ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam dan fungsi lingkungan yang menjamin terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

2. Penyelarasan dengan RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 - 2029
Adapun Tema pembangunan Tahun 2026 Papua Tengah pada RPJMD yaitu "Penguatan SDM dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bermartabat dan Efektif". dengan Fokus utama pembangunan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Papua Tengah serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Adapun beberapa arah kebijakan Pembangunan Provinsi Papua Tengah sesuai RPJMD Provinsi Papua Tengah 2025-2029 yang harus diperhatikan dalam perumusan Perubahan RKPD yaitu :

3. Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM
   - Fokus : Meningkatkan akses dan mutu pendidikan serta keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pembangunan daerah.
   - Arah Kebijakan:
     1) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dengan fokus pada pendidikan vokasi berbasis potensi daerah;
     2) Penguatan kurikulum berbasis kearifan lokal dan kebutuhan pasar kerja guna meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan ekonomi;
     3) Peningkatan pelatihan keterampilan tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan program sertifikasi kompetensi berbasis industri;
     4) Perluasan program beasiswa bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk menempuh pendidikan tinggi di bidang sains, teknologi, ekonomi, dan pemerintahan;
     5) Peningkatan literasi digital bagi pelajar, mahasiswa, dan tenaga kerja untuk mendukung transformasi digital Penguatan UMKM, Koperasi, dan Ekonomi Kreatif.

4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
   - Fokus : Meningkatkan profesionalisme ASN, efektivitas layanan publik, serta transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
   - Arah Kebijakan:
     1) Penyederhanaan regulasi dan proses birokrasi untuk meningkatkan efektivitas layanan publik;

2) Penguatan kapasitas dan integritas ASN melalui pelatihan kepemimpinan, anti-korupsi, serta pengembangan kompetensi berbasis meritokrasi;
3) Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik;
4) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kinerja pemerintahan;
5) Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah berbasis data dan evidence-based policy.

5. Penguatan Layanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
   - Fokus : Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan serta kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Papua Tengah.
   - Arah Kebijakan:
     1) Peningkatan akses layanan kesehatan bagi daerah terpencil dan tertinggal melalui pembangunan Puskesmas, rumah sakit rujukan, dan tenaga medis yang memadai;
     2) Penguatan program pencegahan dan penanganan stunting, gizi buruk, dan penyakit menular (TBC, malaria, HIV/AIDS);
     3) Peningkatan cakupan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Papua Tengah;
     4) Peningkatan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui insentif dan program pengembangan kapasitas;
     5) Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak serta program kesehatan reproduksi untuk menekan angka kematian ibu dan bayi.

6. Peningkatan Tata Kelola Keuangan Daerah dan Efisiensi Anggaran
   - Fokus : Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan mencegah kebocoran anggaran.
   - Arah Kebijakan:
     1) Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui digitalisasi sistem perpajakan dan peningkatan kesadaran wajib pajak;
     2) Efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran daerah untuk mencegah pemborosan dan meningkatkan dampak pembangunan;
     3) Penguatan sistem audit dan pengawasan keuangan daerah guna mencegah penyalahgunaan anggaran;
     4) Mendorong tata kelola BUMD yang profesional dan berorientasi pada peningkatan ekonomi daerah;
     5) Meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta dan dunia usaha dalam pengelolaan keuangan dan investasi daerah.

7. Penguatan Demokrasi dan Penegakan Hukum yang berkeadilan
   - Fokus : Meningkatkan kualitas demokrasi dan supremasi hukum untuk menciptakan stabilitas dan keadilan di Papua Tengah.
   - Arah Kebijakan:
     1) Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan;
     2) Penguatan sistem penegakan hukum yang adil dan inklusif, khususnya dalam menangani konflik sosial dan politik;
     3) Peningkatan indeks demokrasi daerah melalui pendidikan politik dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pembangunan daerah;
     4) Mendorong penyelesaian konflik secara damai dan berbasis budaya lokal guna memperkuat stabilitas daerah;
     5) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan pengadilan

dalam menangani berbagai kasus hukum yang adil dan transparan.

8. Peningkatan Partisipasi Perempuan, Pemuda, dan Masyarakat Insklusif dalam Pembangunan
   - Fokus : Memberdayakan kelompok rentan dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pembangunan.
   - Arah Kebijakan:
     1) Meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan, politik, dan dunia usaha;
     2) Mendorong peran aktif pemuda dalam inovasi dan Pembangunan daerah melalui program kewirausahaan dan startup digital;
     3) Peningkatan layanan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik;
     4) Penguatan program perlindungan sosial untuk kelompok rentan, termasuk anak-anak dan lansia;
     5) Mendorong nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan harmoni sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Arah kebijakan tahun kedua (2026) akan menitikberatkan pada Penguatan SDM dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bermartabat dan Efektif, dengan fokus pada: (1). Meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan kerja, dan keterampilan SDM; (2). Meningkatkan efektivitas dan transparansi birokrasi serta reformasi tata kelola pemerintahan; (3). Memperkuat layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat; (4). Meningkatkan efisiensi tata kelola keuangan daerah dan optimalisasi pendapatan daerah; (5). Memperkuat demokrasi, supremasi hukum, dan penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal; (6). Mendorong partisipasi perempuan, pemuda, dan kelompok rentan dalam pembangunan.

Tabel 4. 2 Arah Kebijakan Provinsi Papua Tengah dalam RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 – 2029

Tujuan / Sasaran				Strategi		Arah Kebijakan
M1	T1	S1	Papua Tengah Cerdas	S1	Meningkatkan Capaian Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Nasional : 1. Penguatan kapasitas guru melalui pelatihan berbasis Teaching at The Right Level (TaRL) dan Merdeka Belajar; 2. Implementasi model pembelajaran berbasis teknologi dan digitalisasi sekolah; 3. Penyediaan dan distribusi buku bacaan berkualitas serta bahan ajar berbasis budaya lokal; 4. Peningkatan kualitas infrastruktur sekolah, termasuk akses listrik dan internet di daerah terpencil; 5. Mendorong kolaborasi dengan mitra pendidikan seperti universitas, NGO, dan lembaga internasional.	1. Meningkatkan kualitas asesmen dan evaluasi pendidikan berbasis data; 2. Memperkuat supervisi dan pendampingan kepada sekolah yang belum mencapai standar minimum; 3. Memberikan insentif bagi guru yang berprestasi dalam meningkatkan capaian literasi dan numerasi siswa. 4. Meningkatkan kualitas Infrastruktur layanan umum dalam mendukung pendidikan
				S2	Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas : 1. Program wajib belajar 12 tahun dengan insentif bagi siswa dari keluarga kurang mampu; 2. Beasiswa dan subsidi pendidikan bagi siswa berprestasi, khususnya dari daerah terpencil; 3. Program pendidikan kejar paket untuk masyarakat putus sekolah; 4. Penyediaan sekolah berbasis asrama di daerah sulit akses (Pembangunan Pendidikan Berpola Asrama).	1. Menjamin akses pendidikan yang inklusif dan merata; 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka; 3. Memperluas akses pendidikan berbasis vokasi untuk menarik minat anak-anak melanjutkan sekolah.
				S3	Meningkatkan Harapan Lama Sekolah: 1. Perluasan akses pendidikan menengah dan tinggi di seluruh kabupaten/kota; 2. Penguatan program pendidikan vokasi dan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja;	1. Mendorong program afirmasi bagi daerah dengan angka putus sekolah tinggi; 2. Meningkatkan kapasitas pendidikan tinggi dengan membuka

					3. Meningkatkan peran sekolah dan komunitas dalam mencegah putus sekolah; 4. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.	program studi yang relevan dengan kebutuhan daerah; 3. Penguatan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi untuk mendukung keberlanjutan pendidikan. 4. SD yang Mendapatkan Pambinaan Program Afirmasi
				S4	Meningkatkan Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi: 1. Penyediaan beasiswa pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah; 2. Mendorong pembangunan Perguruan Tinggi Negeri (Universitas Negeri Papua Tengah) akan menjadi Pusat Pengembangan SDM berkualitas di Papua Tengah; 3. Peningkatan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri; 4. Peningkatan kualitas dosen dan tenaga pengajar melalui program *capacity building.*	1. Mengembangkan kebijakan afirmatif bagi lulusan SMA/SMK agar dapat melanjutkan ke perguruan tinggi; 2. Memberikan insentif bagi mahasiswa Papua Tengah yang berkuliah dan kembali mengabdi di daerah; 3. Meningkatkan akses terhadap pendidikan tinggi berbasis digital untuk menjangkau daerah terpencil; 4. Membangun Fakultas yang sesuai dengan potensi daerah; 5. Afirmasi Bantuan biaya Pendidikan Program Studi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan Wajib penempatan Pada DTPK 6. Menciptakan SDM unggul dan meningkatkan daya saing Papua Tengah.
M1	T2	S2	Papua Tengah Sehat	S5	Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak : 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak di fasilitas kesehatan, termasuk Pembangunan Rumah Sakit Bertaraf Internasional,	1. Memastikan layanan kesehatan ibu dan anak dapat diakses oleh seluruh masyarakat di Papua

					peningkatan jumlah tenaga kesehatan dan bidan di daerah terpencil; 2. Penguatan program *ANC (Antenatal Care)* dan layanan persalinan aman dengan mendorong persalinan di fasilitas kesehatan; 3. Penyediaan rumah tunggu kelahiran (RTK) bagi ibu hamil di daerah sulit akses; 4. Pemberian suplemen gizi dan tablet tambah darah bagi ibu hamil serta imunisasi lengkap bagi bayi; 5. Program edukasi bagi ibu hamil dan keluarga terkait gizi, ASI eksklusif, serta pencegahan stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif; 6. Pembangunan Rumah Sakit Provinsi.	Tengah, terutama di daerah pedalaman; 2. Memperkuat sistem rujukan ibu hamil berisiko tinggi ke rumah sakit dengan fasilitas yang memadai; 3. Integrasi program pengentasan stunting dengan program pemberdayaan ekonomi keluarga agar anak mendapatkan asupan gizi yang cukup; 4. Memastikan Layanan Kesehatan bisa di nikmati oleh seluruh masyarakat Papua Tengah.
				S6	Penanganan Tuberkulosis (TBC): 1. Memperluas layanan deteksi dini TBC di puskesmas, rumah sakit, dan klinik kesehatan; 2. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam diagnosis dan pengobatan TBC; 3. Mendorong kepatuhan pengobatan pasien TBC dengan sistem pemantauan berbasis teknologi (*digital adherence monitoring*); 4. Program pendampingan bagi pasien TBC untuk mencegah putus obat dan resistensi obat (TBC RO); 5. Penyuluhan kepada masyarakat tentang cara penularan dan pencegahan TBC.	1. Mewajibkan skrining TBC secara berkala di daerah dengan angka kejadian tinggi; 2. Penyediaan obat TBC yang gratis dan memastikan ketersediaannya di seluruh fasilitas kesehatan; 3. Mendorong kerja sama dengan komunitas dan NGO untuk mendukung program eliminasi TBC.
				S7	Eliminasi Malaria di Seluruh Kabupaten : 1. Penyediaan kelambu berinsektisida dan obat anti-malaria di daerah endemis; 2. Penguatan surveilans malaria dengan skrining rutin di daerah rawan; 3. Peningkatan cakupan dan kualitas pengobatan malaria sesuai standar WHO;	1. Memastikan setiap kabupaten memiliki program eliminasi malaria yang berkelanjutan; 2. Menjalin kerja sama dengan sektor swasta, universitas, dan organisasi internasional dalam penelitian dan penanganan malaria;

					4. Program pemberantasan nyamuk melalui penyemprotan rumah dan pengelolaan lingkungan; 5. Edukasi masyarakat mengenai pencegahan malaria, terutama di daerah pedalaman.	3. Mengintegrasikan program eliminasi malaria dengan layanan kesehatan dasar di puskesmas dan posyandu.
				S8	Penanggulangan HIV/AIDS: 1. Meningkatkan akses terhadap layanan tes dan konseling HIV (VCT) secara gratis; 2. Penyediaan obat ARV (Antiretroviral) secara berkelanjutan bagi ODHA; 3. Edukasi tentang pencegahan HIV/AIDS melalui kampanye yang melibatkan pemuda, kelompok masyarakat, dan gereja; 4. Peningkatan layanan kesehatan bagi ibu hamil dengan HIV untuk mencegah penularan ke bayi.	1. Memperkuat layanan kesehatan khusus HIV/AIDS di puskesmas dan rumah sakit; 2. Mendorong kebijakan nol stigma bagi ODHA di lingkungan kerja dan sosial; 3. Integrasi program penanggulangan HIV/AIDS dengan program kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
				S9	Meningkatkan Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Provinsi (%) : 1. Optimalisasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan; 2. Mempermudah akses administrasi bagi masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan; 3. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pembiayaan premi JKN bagi masyarakat tidak mampu; 4. Penyediaan layanan kesehatan berbasis digital untuk mempercepat klaim dan layanan JKN.	1. Mewajibkan perusahaan dan institusi untuk mendaftarkan pekerjanya dalam JKN; 2. Mengembangkan program subsidi bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan; 3. Memastikan fasilitas kesehatan daerah terintegrasi dengan sistem JKN untuk memberikan pelayanan maksimal bagi peserta.
M2	T3	S3	Perlindungan Sosial yang Adaptif Ketahanan energi	S10	Menurunkan Tingkat Kemiskinan (%): 1. Penguatan program pemberdayaan ekonomi berbasis lokal, seperti pengembangan pertanian, perikanan, dan UMKM berbasis komoditas unggulan Papua Tengah; 2. Bantuan sosial yang tepat sasaran, termasuk program perlindungan sosial berbasis keluarga	1. Mempercepat penyediaan data kemiskinan berbasis digital untuk penyaluran bantuan yang lebih akurat; 2. Mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas dalam program pengentasan kemiskinan;

					seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan BLT (Bantuan Langsung Tunai); 3. Peningkatan akses pendidikan dan keterampilan melalui program pelatihan kerja dan sekolah vokasi bagi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah; 4. Meningkatkan akses ke layanan keuangan dan permodalan, termasuk kredit usaha rakyat (KUR) dan koperasi berbasis komunitas; 5. Penyediaan infrastruktur dasar yang memadai, seperti akses air bersih, listrik, dan perumahan layak huni bagi masyarakat miskin.	3. Mengembangkan kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial. 4. Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL)
				S11	Meningkatkan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%) : 1. Sosialisasi dan edukasi kepada pekerja formal dan informal tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan); 2. Memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan mendorong perusahaan dan pekerja sektor informal untuk mendaftar; 3. Penyediaan subsidi bagi pekerja informal dan masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan; 4. Peningkatan kerja sama dengan perusahaan, koperasi, dan BUMDes untuk menjamin pekerja sektor informal mendapatkan perlindungan sosial; 5. Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam pengawasan agar perusahaan mematuhi regulasi terkait jaminan sosial tenaga kerja.	1. Mewajibkan perusahaan skala menengah dan besar untuk mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan; 2. Mengembangkan regulasi daerah yang mempermudah akses pekerja informal ke jaminan sosial; 3. Meningkatkan insentif bagi perusahaan yang menerapkan standar perlindungan tenaga kerja.
				S12	Meningkatkan Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (%): 1. Peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas melalui pelatihan vokasi, keterampilan digital, dan wirausaha;	1. Mengembangkan regulasi daerah yang mengharuskan perusahaan dan instansi pemerintah menyediakan minimal 2% tenaga kerja dari kelompok disabilitas;

					2. Mendorong kebijakan afirmasi bagi penyandang disabilitas dalam rekrutmen di sektor formal, termasuk kuota khusus di instansi pemerintah dan BUMN/BUMD; 3. Penyediaan fasilitas dan lingkungan kerja yang inklusif, seperti aksesibilitas fisik di tempat kerja dan kebijakan kerja fleksibel bagi disabilitas; 4. Memperkuat kerja sama dengan dunia usaha dan sektor swasta untuk membuka lebih banyak lapangan kerja bagi penyandang disabilitas; 5. Meningkatkan insentif bagi perusahaan yang merekrut tenaga kerja disabilitas, seperti potongan pajak dan subsidi pelatihan kerja.	2. Mendorong kolaborasi dengan organisasi penyandang disabilitas untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif; 3. Mengoptimalkan peran balai latihan kerja (BLK) untuk menyediakan program pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas. 4. Revitaslisasi Fasilitas Pendidikan dan Balai Latihan Kerja (BLK) 5. Peningkatan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mengikuti Upskilling dab Reskillin berstandar Industri
M2	T4	S4	Terwujudnya Iptek, Inovasi dan produktivitas Ekonomi Papua Tengah	S13	Meningkatkan Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB : 1. Pengembangan kawasan industri berbasis komoditas unggulan Papua Tengah (seperti pengolahan kayu, perikanan, pertanian, dan hasil hutan non-kayu); 2. Mendorong investasi dalam industri hilir agar produk lokal memiliki nilai tambah; 3. Penyediaan insentif bagi industri yang mengadopsi teknologi ramah lingkungan; 4. Pelatihan tenaga kerja industri untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing; 5. Peningkatan infrastruktur pendukung industri seperti listrik, jalan, dan konektivitas logistik.	1. Mengembangkan regulasi yang mendukung kemudahan investasi industri pengolahan; 2. Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri dalam pengembangan teknologi pengolahan; 3. Memastikan industri kecil dan menengah memiliki akses terhadap bahan baku, pasar, dan pendanaan.
				S14	Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan : 1. Penguatan branding dan promosi destinasi wisata unggulan Papua Tengah, termasuk ekowisata dan wisata budaya; 2. Pengembangan infrastruktur pariwisata seperti akses jalan, bandara, dan fasilitas akomodasi;	1. Penyusunan regulasi yang mendukung pariwisata berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal; 2. Mendorong kemitraan antara masyarakat lokal dan investor dalam pengembangan pariwisata;

					3. Meningkatkan kapasitas SDM pariwisata melalui pelatihan bagi pemandu wisata, pelaku usaha hotel dan restoran; 4. Mendorong investasi di sektor perhotelan, restoran, dan atraksi wisata berbasis komunitas; 5. Digitalisasi layanan wisata, termasuk pemasaran online dan sistem reservasi berbasis teknologi.	3. Mengembangkan program insentif bagi UMKM yang terlibat dalam sektor pariwisata.
				S15	Meningkatkan Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif : 1. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif berbasis seni budaya, kuliner, dan kriya khas Papua Tengah; 2. Mendorong digitalisasi ekonomi kreatif melalui e-commerce, pemasaran digital, dan teknologi finansial; 3. Pemberdayaan komunitas kreatif lokal melalui pelatihan dan pendampingan usaha; 4. Peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku industri kreatif melalui kredit usaha kreatif dan hibah modal.	1. Penguatan regulasi yang mendukung hak kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif; 2. Peningkatan promosi dan event ekonomi kreatif, seperti festival seni dan budaya; 3. Penguatan jejaring dan kolaborasi antara ekonomi kreatif dan sektor pariwisata.
				S16	Peningkatan Produktivitas UMKM, Koperasi, dan BUMD : 1. Penguatan program inkubasi bisnis dan akses permodalan bagi UMKM dan koperasi; 2. Digitalisasi UMKM dan koperasi untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional; 3. Peningkatan peran BUMD dalam mendukung sektor strategis daerah, seperti distribusi pangan dan energi; 4. Optimalisasi kemitraan antara UMKM dan industri besar dalam rantai pasok lokal; 5. Penyederhanaan perizinan bagi UMKM untuk mendorong pertumbuhan usaha baru.	1. Penyusunan regulasi daerah yang memudahkan UMKM dan koperasi berkembang; 2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMD untuk mendukung ekonomi daerah; 3. Mengembangkan program pelatihan dan pendampingan bagi wirausahawan baru. 4. Fasilitasi Sosialisasi Pembentukan Koperasi dari Kelompok Strategis
				S17	Penciptaan Lapangan Kerja yang Berkualitas : 1. Peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis industri;	1. Menyusun kebijakan afirmatif untuk memastikan tenaga kerja

					2. Mendorong industri padat karya dan sektor kreatif untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja formal; 3. Penguatan sistem informasi pasar kerja agar tenaga kerja dapat terhubung dengan peluang kerja yang sesuai; 4. Penyediaan insentif bagi perusahaan yang membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal.	lokal mendapatkan prioritas dalam rekrutmen; 2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri; 3. Mempermudah regulasi ketenagakerjaan agar mendukung pertumbuhan sektor formal.
				S18	Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan : 1. Meningkatkan akses perempuan terhadap pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi; 2. Mendorong kebijakan ramah keluarga di tempat kerja, seperti fleksibilitas jam kerja dan cuti melahirkan yang lebih baik; 3. Penyediaan fasilitas pendukung seperti tempat penitipan anak di tempat kerja; 4. Program kewirausahaan perempuan berbasis komunitas dan UMKM.	1. Penyusunan regulasi daerah yang mendukung kesetaraan gender di dunia kerja; 2. Memberikan insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan lebih banyak perempuan; 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran perempuan dalam ekonomi.
				S19	Meningkatkan Tingkat Penguasaan Iptek : 1. Penguatan ekosistem inovasi daerah melalui kolaborasi antara pemerintah, universitas, dan industri; 2. Penyediaan pusat riset dan teknologi untuk mendukung industri lokal; 3. Mendorong adopsi teknologi digital di sektor UMKM, pertanian, dan industri; 4. Peningkatan investasi dalam pendidikan dan riset berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics).	1. Mengembangkan kebijakan daerah yang mendorong inovasi dan riset berbasis lokal; 2. Meningkatkan peran lembaga pendidikan dalam riset dan pengembangan teknologi; 3. Menyediakan insentif bagi perusahaan dan startup yang berinvestasi dalam inovasi.
M3	T5	S5	Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif di papua Tengah	S20	Meningkatkan Indeks Reformasi Hukum: 1. Penyederhanaan regulasi dan perizinan guna menciptakan kepastian hukum yang mendukung investasi dan pelayanan publik;	1. Mendorong percepatan revisi dan harmonisasi regulasi yang belum sesuai dengan kebutuhan daerah; 2. Meningkatkan pengawasan terhadap implementasi kebijakan

					2. Penguatan kapasitas aparatur hukum dan peradilan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum di tingkat daerah; 3. Peningkatan transparansi dan aksesibilitas regulasi daerah dengan digitalisasi dokumen hukum dan kebijakan; 4. Optimalisasi peran masyarakat dalam penyusunan kebijakan melalui konsultasi publik dan partisipasi masyarakat sipil; 5. Sinergi antara regulasi nasional dan daerah untuk menghindari tumpang tindih kebijakan serta memastikan keselarasan hukum.	hukum daerah guna mencegah; penyalahgunaan wewenang. 3. Memperkuat lembaga bantuan hukum bagi masyarakat untuk memastikan akses keadilan yang merata.
				S21	Meningkatkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE): 1. Digitalisasi administrasi pemerintahan dengan mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara menyeluruh; 2. Pengembangan layanan publik berbasis digital, seperti e-government, e-budgeting, dan e-procurement untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi; 3. Peningkatan keamanan data dan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung transformasi digital pemerintahan; 4. Pelatihan aparatur sipil negara (ASN) dalam penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan kapasitas dan adaptasi terhadap sistem digital; 5. Integrasi layanan digital antarinstansi pemerintah guna menciptakan sistem pelayanan terpadu yang lebih efisien.	1. Mewajibkan setiap OPD mengimplementasikan SPBE secara bertahap sesuai dengan roadmap digitalisasi daerah; 2. Meningkatkan kolaborasi dengan lembaga pusat dan swasta dalam pengembangan infrastruktur digital daerah; 3. Menyediakan kebijakan perlindungan data yang ketat untuk menjamin keamanan informasi pemerintahan dan masyarakat. 4. Pengembangan Platform digital Managemen ASN
				S22	Meningkatkan Indeks Pelayanan Publik: 1. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pelayanan publik melalui pelatihan berorientasi pada pelayanan prima;	1. Menyusun regulasi daerah yang mengatur standar pelayanan publik dan mekanisme evaluasi kinerja pelayanan;

					2. Penerapan standar pelayanan publik yang jelas, cepat, dan transparan sesuai dengan prinsip *good governance*; 3. Penguatan mekanisme pengaduan masyarakat yang cepat dan responsif, seperti layanan *hotline*, aplikasi pengaduan digital, dan kanal media sosial resmi; 4. Mendorong inovasi dalam pelayanan publik, seperti layanan keliling, sistem layanan berbasis aplikasi, dan *one-stop service center*; 5. Penyediaan fasilitas layanan publik yang ramah disabilitas dan inklusif, untuk memastikan semua kelompok masyarakat mendapatkan akses yang setara.	2. Menyediakan sistem pemantauan dan penilaian layanan publik berbasis data; 3. Mewajibkan setiap instansi pemerintah daerah memiliki *customer service* yang aktif untuk menangani keluhan masyarakat.
				S23	Meningkatkan Indeks Integritas Nasional: 1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah guna mencegah korupsi dan penyalahgunaan anggaran; 2. Penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi seperti *e-audit* dan *e-monitoring* terhadap anggaran dan proyek pemerintah; 3. Penguatan sistem meritokrasi dalam rekrutmen ASN untuk memastikan penempatan pejabat berdasarkan kompetensi dan integritas; 4. Mendorong peran aktif masyarakat dalam pengawasan pemerintahan, melalui sistem pelaporan yang mudah diakses; 5. Peningkatan edukasi anti-korupsi bagi aparatur negara dan masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan etika birokrasi.	1. Mewajibkan pejabat daerah untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) secara berkala; 2. Mendorong sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi ASN berdasarkan kinerja dan tingkat integritasnya; 3. Membangun sistem whistleblower yang aman bagi masyarakat dan pegawai pemerintah yang ingin melaporkan praktik korupsi.
M3	T5	S6	Terwujudnya Trasnformasi Digital Papua Tengah	S24	Meningkatkan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) : 1. Pembangunan infrastruktur digital yang merata, termasuk penyediaan jaringan internet hingga ke daerah terpencil;	1. Menyusun regulasi daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur TIK, termasuk kebijakan insentif bagi penyedia layanan internet;

					2. Penguatan literasi digital masyarakat dan aparatur pemerintah guna meningkatkan adopsi teknologi dalam kehidupan sehari-hari; 3. Mendorong digitalisasi sektor publik dan ekonomi, seperti layanan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), e-commerce untuk UMKM, dan digitalisasi layanan kesehatan serta pendidikan; 4. Peningkatan kerja sama dengan operator telekomunikasi dan penyedia layanan internet untuk memperluas cakupan jaringan dan meningkatkan kualitas layanan; 5. Pengembangan pusat inovasi digital dan startup teknologi lokal guna mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis digital.	2. Mewajibkan instansi pemerintah daerah mengadopsi sistem digital dalam layanan publik guna meningkatkan efisiensi dan transparansi; 3. Menyediakan program pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam pemanfaatan teknologi digital; 4. Meningkatkan investasi daerah dalam pengembangan pusat data dan keamanan siber guna mendukung transformasi digital yang aman dan berkelanjutan. 5. Perluasan Layanan Penyiaran Digital
				S25	Meningkatkan Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga (RT) (%) : 1. Percepatan pembangunan infrastruktur listrik dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, hidro, dan biomassa untuk menjangkau daerah terpencil; 2. Peningkatan investasi dalam jaringan distribusi listrik guna memastikan stabilitas pasokan listrik bagi rumah tangga dan industri; 3. Mendorong pemanfaatan teknologi smart grid dan digitalisasi manajemen energi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan listrik; 4. Program subsidi listrik untuk masyarakat kurang mampu agar seluruh rumah tangga memiliki akses listrik yang terjangkau;	1. Menyusun kebijakan insentif bagi investasi energi terbarukan guna mendukung elektrifikasi daerah terpencil; 2. Mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan energi berkelanjutan guna memastikan pemerataan akses listrik; 3. Meningkatkan kolaborasi dengan PLN dan sektor swasta untuk percepatan penyediaan listrik berbasis teknologi modern dan ramah lingkungan; 4. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan

					5. Pengembangan desa mandiri energi dengan pemanfaatan teknologi mikrogrid untuk daerah dengan akses listrik terbatas.	program elektrifikasi berjalan sesuai target yang ditetapkan.
M3	T5	S7		S26	Meningkatkan Indeks Kepemimpinan Daerah: 1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi kepemimpinan kepala daerah serta ASN melalui pelatihan kepemimpinan yang berbasis inovasi, tata kelola yang baik, dan keberpihakan pada masyarakat; 2. Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan daerah; 3. Peningkatan komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat untuk memastikan kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan daerah; 4. Pemberdayaan kepemimpinan berbasis data dan digitalisasi guna meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan; 5. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan daerah agar kebijakan lebih partisipatif dan inklusif.	1. Menetapkan standar kompetensi kepemimpinan daerah yang berorientasi pada hasil dan pelayanan publik yang lebih baik; 2. Mewajibkan pemimpin daerah dan ASN mengikuti program kepemimpinan berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas dalam menjalankan tugas; 3. Memperkuat mekanisme evaluasi kinerja kepemimpinan daerah berbasis indikator yang jelas dan terukur.
				S27	Menurunkan Persentase Konflik SARA: 1. Penguatan dialog antaragama dan antarsuku melalui forum komunikasi yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda guna membangun kesepahaman dan solidaritas sosial; 2. Peningkatan peran pemerintah daerah dalam mediasi dan resolusi konflik dengan menyediakan mekanisme penyelesaian yang cepat, adil, dan berbasis kearifan lokal;	1. Mengembangkan kebijakan daerah yang berfokus pada pencegahan dan penanganan konflik berbasis kearifan lokal; 2. Mengalokasikan anggaran khusus untuk program penguatan kohesi sosial dan toleransi di masyarakat; 3. Meningkatkan koordinasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam

					3. Pendidikan multikultural dan toleransi sejak dini di sekolah dan komunitas untuk menanamkan nilai keberagaman dan persatuan; 4. Penerapan sistem deteksi dini konflik sosial dengan membentuk tim khusus yang memantau potensi konflik dan melakukan intervensi sebelum terjadi eskalasi; 5. Optimalisasi peran media dalam menyebarkan narasi damai dan mengurangi provokasi berbasis SARA melalui regulasi dan kampanye anti-hoaks.	menjaga stabilitas sosial di Papua Tengah.
M4	T6	S8	Terwujudnya Hukum Berkeadilan, Keamananan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansi pada Provinsi Papua Tengah	S28	Meningkatkan Penegakan Hukum Peraturan Daerah : 1. Penguatan kapasitas aparatur penegak hukum dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam menegakkan peraturan daerah (Perda); 2. Sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha agar memahami dan mematuhi Perda yang berlaku; 3. Optimalisasi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Perda dengan membentuk sistem pemantauan dan mekanisme pelaporan masyarakat; 4. Peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat adat untuk memastikan Perda diterapkan secara efektif dan berkeadilan.	1. Memperkuat regulasi dan peraturan daerah yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan; 2. Meningkatkan transparansi dalam penyusunan dan implementasi Perda guna mencegah penyalahgunaan kewenangan; 3. Menyediakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa hukum yang cepat dan berbasis digital untuk mempermudah akses keadilan bagi masyarakat.
				S29	Meningkatkan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM : 1. Memastikan kebijakan daerah selaras dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), terutama dalam perlindungan hak-hak kelompok rentan (perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat); 2. Mendorong edukasi HAM kepada aparatur pemerintahan dan masyarakat melalui sosialisasi dan program pelatihan;	1. Menetapkan program aksi daerah yang mengedepankan prinsip HAM dalam pelayanan publik dan kebijakan daerah; 2. Mengembangkan sistem pelaporan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM secara transparan dan akuntabel;

					3. Memperkuat peran Komisi Nasional HAM atau lembaga HAM daerah dalam memantau, mengevaluasi, dan menangani pelanggaran HAM; 4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum dan keadilan, termasuk penyediaan bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu.	3. Menyusun kebijakan afirmatif untuk meningkatkan inklusivitas dan kesejahteraan kelompok rentan.
				S30	Meningkatkan Proporsi Penduduk yang Merasa Aman di Tempat Tinggalnya : 1. Meningkatkan keamanan dan ketertiban melalui optimalisasi peran kepolisian, TNI, dan satuan keamanan masyarakat (Satkamling); 2. Penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah; 3. Pemanfaatan teknologi dalam pemantauan keamanan daerah, seperti pemasangan CCTV di area publik dan penggunaan sistem laporan kejadian berbasis digital; 4. Meningkatkan program patroli keamanan di daerah rawan kejahatan dan konflik; 5. Membangun mekanisme penyelesaian konflik berbasis komunitas yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil.	1. Menyediakan sistem pengaduan keamanan yang mudah diakses oleh masyarakat; 2. Memperkuat sistem perlindungan bagi kelompok rentan dari ancaman kekerasan dan kriminalitas; 3. Meningkatkan kehadiran aparat keamanan di daerah rawan konflik guna memberikan rasa aman bagi masyarakat.
				S31	Meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Papua Tengah : 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan kebijakan daerah melalui keterbukaan informasi dan keterlibatan publik dalam penyusunan kebijakan; 2. Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu serta pemilihan kepala daerah guna memastikan demokrasi yang jujur dan adil;	1. Memastikan keterbukaan informasi publik melalui regulasi yang mendukung akses masyarakat terhadap kebijakan pemerintah; 2. Mendorong dialog terbuka antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk membangun demokrasi yang lebih substansial; 3. Menyediakan mekanisme pengaduan dan perlindungan bagi

					3. Menguatkan peran media dan kebebasan pers untuk mendukung kebebasan berekspresi serta mengawasi jalannya pemerintahan; 4. Meningkatkan kapasitas partai politik dan organisasi masyarakat sipil dalam menjalankan peran demokrasi yang sehat; 5. Membangun budaya politik yang inklusif dan bebas dari praktik politik uang, diskriminasi, serta tekanan politik.	masyarakat yang menghadapi diskriminasi politik atau intimidasi.
M5	T7	S9	Terwujudnya Beragama maslahat dan berkebudayaan maju	S32	Meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Indeks Pembangunan Kebudayaan mencerminkan kemajuan dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan di suatu daerah : 1. Pelestarian dan revitalisasi budaya lokal Papua Tengah melalui dukungan terhadap seni, bahasa, tradisi, dan kearifan lokal; 2. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan budaya dengan memasukkan muatan budaya lokal ke dalam kurikulum sekolah; 3. Penguatan lembaga budaya, sanggar seni, dan komunitas kreatif guna memperluas ruang ekspresi dan inovasi budaya; 4. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui industri kreatif, pariwisata budaya, dan produk berbasis kearifan lokal; 5. Peningkatan infrastruktur kebudayaan seperti museum, galeri seni, rumah adat, dan pusat kebudayaan guna mendukung kegiatan budaya; 6. Mendorong digitalisasi dan dokumentasi budaya untuk menjaga warisan budaya agar dapat diakses oleh generasi mendatang.	1. Menetapkan kebijakan daerah untuk melindungi warisan budaya tak benda dan benda di Papua Tengah; 2. Menyediakan dana hibah atau insentif bagi komunitas budaya dan pelaku seni untuk mengembangkan dan mempromosikan budaya lokal; 3. Menyelenggarakan festival budaya dan seni secara rutin guna memperkuat identitas budaya Papua Tengah dan menarik wisatawan; 4. Mendorong kerja sama dengan perguruan tinggi dan peneliti untuk mendokumentasikan, mengembangkan, dan mempromosikan budaya lokal.
				S33	Meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Indeks Kerukunan Umat Beragama mengukur	1. Menyusun regulasi daerah yang melindungi kebebasan beragama

					harmoni antarumat beragama, toleransi, dan kerja sama dalam kehidupan sosial : 1. Memperkuat dialog antaragama melalui forum komunikasi yang melibatkan tokoh agama, pemuda lintas agama, dan pemerintah daerah; 2. Mengembangkan program pendidikan multikultural dan toleransi di sekolah dan masyarakat guna menanamkan nilai-nilai persaudaraan dan harmoni sosial; 3. Mendorong peran aktif tokoh agama dalam membangun narasi damai dan menangkal penyebaran ujaran kebencian serta ekstremisme; 4. Optimalisasi peran media dalam menyebarkan pesan-pesan kerukunan dan mencegah hoaks yang berpotensi memicu konflik keagamaan; 5. Meningkatkan kerja sama antarumat beragama dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan pembangunan untuk memperkuat solidaritas sosial; 6. Menyediakan mekanisme penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal dengan melibatkan tokoh adat dan tokoh agama dalam mediasi konflik keagamaan.	dan mencegah diskriminasi berbasis agama; 2. Menyediakan insentif dan fasilitas bagi kegiatan yang mendorong toleransi dan kerja sama antarumat beragama; 3. Mengintegrasikan program pembangunan sosial dan ekonomi berbasis lintas agama untuk memperkuat persaudaraan di tengah masyarakat; 4. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam menangani isu-isu sensitif terkait keberagaman agama melalui pendekatan yang inklusif dan humanis.
M5	T7	S10	Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	S34	Meningkatkan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPK). Indeks ini mencerminkan kesejahteraan keluarga dalam aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan perlindungan sosial : 1. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak, termasuk layanan gizi, imunisasi, dan kesehatan reproduksi untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak; 2. Peningkatan literasi dan pendidikan keluarga dalam pola asuh anak, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan kesejahteraan psikososial keluarga;	1. Menyediakan program bantuan sosial dan layanan konsultasi keluarga berbasis komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga; 2. Mengembangkan kebijakan ketahanan keluarga yang mengintegrasikan aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan perlindungan sosial; 3. Mengalokasikan anggaran khusus untuk program penguatan

					3. Penguatan program pemberdayaan ekonomi keluarga melalui peningkatan keterampilan kerja, akses permodalan bagi usaha mikro, dan pelatihan kewirausahaan berbasis keluarga; 4. Mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak guna menciptakan keseimbangan peran dalam keluarga; 5. Meningkatkan akses terhadap perumahan layak huni dan lingkungan yang mendukung kesejahteraan keluarga; 6. Memperkuat peran lembaga sosial dan komunitas dalam mendampingi keluarga rentan, seperti keluarga miskin, keluarga dengan anak berkebutuhan khusus, dan keluarga yang terdampak konflik.	ketahanan keluarga, termasuk layanan kesehatan dan pendidikan keluarga; 4. Mengembangkan pusat layanan keluarga dan rumah aman bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
				S35	Mengurangi Ketimpangan Gender (IKG). Indeks Ketimpangan Gender mengukur kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi politik: 1. Mendorong kesetaraan akses pendidikan bagi perempuan dan anak perempuan, termasuk beasiswa dan program afirmatif untuk kelompok rentan; 2. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia kerja, terutama di sektor formal, serta memberikan pelatihan keterampilan untuk memperkuat kapasitas perempuan; 3. Meningkatkan peran perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan di sektor pemerintahan, politik, dan ekonomi; 4. Memastikan akses layanan kesehatan reproduksi dan perlindungan terhadap perempuan, termasuk	1. Mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan pembangunan daerah untuk memastikan kesetaraan akses dan peluang bagi semua warga; 2. Mengalokasikan anggaran khusus untuk program pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dari kekerasan; 3. Mendorong keterlibatan laki-laki dalam upaya kesetaraan gender, termasuk dalam peran domestik dan pengasuhan anak; 4. Memastikan kebijakan daerah terkait layanan publik, pendidikan, dan ketenagakerjaan berpihak pada perempuan dan kelompok rentan.

					pencegahan pernikahan anak dan kekerasan berbasis gender; 5. Mendorong kesetaraan dalam kebijakan ketenagakerjaan, seperti upah yang adil, cuti melahirkan, serta fasilitas penitipan anak di tempat kerja; 6. Membangun mekanisme pengaduan dan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami diskriminasi atau kekerasan.	
M5	T8	S11	Terwujudnya Integritas Ekonomi Domestik dan Global di papua Tengah	S36	Menjaga Stabilitas Harga Antarwilayah (Koefisien Variasi Harga). Variasi harga antarwilayah menunjukkan tingkat kesenjangan harga di berbagai daerah di Papua Tengah. Ketidakseimbangan ini bisa terjadi akibat infrastruktur yang belum merata, biaya distribusi yang tinggi, atau keterbatasan pasokan barang dan jasa : 1. Penguatan konektivitas dan infrastruktur logistik, termasuk peningkatan akses jalan, pelabuhan, dan bandara guna mempercepat distribusi barang antarwilayah; 2. Pengembangan sistem distribusi yang lebih efisien, seperti pemanfaatan rantai pasok berbasis teknologi dan gudang logistik terpadu; 3. Penguatan peran BUMD dan koperasi dalam distribusi bahan pokok dan kebutuhan strategis untuk mengurangi fluktuasi harga; 4. Mendorong peningkatan produksi dan stok pangan lokal guna mengurangi ketergantungan pada barang dari luar daerah; 5. Memperkuat kerja sama antarwilayah dalam perdagangan dan distribusi barang untuk memastikan pasokan merata di seluruh Papua Tengah.	1. Mengembangkan kebijakan pengendalian harga barang pokok dan memantau disparitas harga antarwilayah; 2. Menyediakan subsidi transportasi bagi daerah terpencil agar harga barang tetap terjangkau; 3. Mengalokasikan investasi dalam infrastruktur logistik untuk mempercepat arus barang dan mengurangi biaya distribusi.

				S37	Meningkatkan Investasi dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (% PDRB). PMTB menggambarkan tingkat investasi yang masuk ke dalam pembangunan infrastruktur, peralatan, dan modal usaha di Papua Tengah : 1. Meningkatkan daya tarik investasi daerah melalui penyederhanaan perizinan dan kepastian hukum bagi investor; 2. Peningkatan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha lokal, termasuk UMKM dan koperasi, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi; 3. Mendorong kemitraan antara swasta dan pemerintah (Public-Private Partnership/PPP) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis; 4. Memperkuat insentif bagi investasi hijau dan berkelanjutan, terutama di sektor energi terbarukan dan industri ramah lingkungan.	1. Menyusun regulasi daerah yang mendukung iklim investasi yang kondusif dan transparan; 2. Memberikan insentif pajak dan kemudahan administrasi bagi investor yang berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah; 3. Meningkatkan peran Bank Pembangunan Daerah dan lembaga keuangan mikro dalam mendukung investasi sektor produktif.
				S38	Memperkuat Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB). Ekspor barang dan jasa menjadi indikator integrasi ekonomi Papua Tengah dengan pasar nasional dan global : 1. Pengembangan industri berbasis sumber daya lokal, seperti perikanan, hasil hutan, kopi, kakao, dan produk pertambangan, untuk meningkatkan daya saing ekspor; 2. Meningkatkan kualitas dan standar produk ekspor, termasuk sertifikasi produk yang sesuai dengan standar internasional; 3. Mendorong hilirisasi industri guna meningkatkan nilai tambah sebelum produk diekspor; 4. Memperluas akses pasar ekspor dengan kerja sama perdagangan antarprovinsi dan internasional;	1. Menyediakan kebijakan insentif bagi industri yang berorientasi ekspor; 2. Meningkatkan kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait guna memperluas pasar ekspor dan memperkuat diplomasi ekonomi; 3. Mengembangkan pusat logistik ekspor untuk mempercepat pengiriman dan menekan biaya ekspor. 4. Pengembangan kawasan kopi

					5. Memanfaatkan teknologi digital dan platform e-commerce untuk mempromosikan produk Papua Tengah ke pasar global.	
M5	T8	S12	Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Daerah Papua Tengah	S39	Meningkatkan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%). Pendapatan daerah yang kuat akan mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program ekonomi yang berkelanjutan: 1. Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui digitalisasi sistem pajak untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi; 2. Ekstensifikasi sumber pajak daerah, misalnya dengan memperluas basis pajak dari sektor-sektor potensial seperti industri, pariwisata, dan ekonomi digital; 3. Peningkatan kesadaran wajib pajak melalui sosialisasi dan insentif bagi pelaku usaha yang taat pajak; 4. Menerapkan kebijakan insentif fiskal untuk menarik investasi baru sambil tetap menjag keseimbangan pendapatan daerah.	1. Penguatan regulasi pajak daerah yang lebih adil dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi; 2. Digitalisasi layanan pajak untuk mengurangi kebocoran dan meningkatkan kemudahan pembayaran pajak; 3. Pengawasan dan evaluasi berkala terhadap penerimaan pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
				S40	Menjaga Tingkat Inflasi (%) Tetap Stabil. Inflasi yang terkendali akan menjaga daya beli masyarakat dan mendukung stabilitas ekonomi daerah : 1. Memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia dalam mengelola kebijakan harga dan ketersediaan barang pokok; 2. Penguatan ketahanan pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan menjaga harga tetap stabil; 3. Peningkatan efisiensi distribusi barang dan jasa, termasuk pembangunan pasar induk dan gudang logistik untuk mengurangi biaya distribusi;	1. Menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan barang kebutuhan pokok; 2. Penguatan infrastruktur logistik untuk mengurangi hambatan distribusi; 3. Meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta dalam menjaga stabilitas harga.

					4. Intervensi harga secara selektif melalui kebijakan subsidi atau operasi pasar untuk komoditas strategis.	
				S41	Memperkuat Pendalaman Sektor Keuangan dan Intermediasi. Pendalaman sektor keuangan menunjukkan seberapa besar sektor keuangan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah: 1. Meningkatkan jumlah simpanan masyarakat dalam sistem keuangan formal dengan mendorong inklusi keuangan; 2. Mendorong investasi jangka panjang, termasuk penguatan dana pensiun dan instrumen investasi lainnya; 3. Meningkatkan akses kredit produktif bagi UMKM dan industri lokal melalui skema pembiayaan berbunga rendah; 4. Mendorong pasar modal daerah agar lebih aktif dengan memperkenalkan berbagai instrumen investasi seperti obligasi daerah.	1. Memperkuat regulasi keuangan daerah untuk mendukung stabilitas perbankan dan lembaga keuangan mikro; 2. Meningkatkan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah; 3. Mendorong digitalisasi sektor keuangan guna memperluas jangkauan layanan keuangan.
				S42	Meningkatkan Inklusi Keuangan (%). Inklusi keuangan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, terutama bagi masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan: 1. Meningkatkan akses layanan keuangan digital melalui pengembangan fintech dan bank digital di daerah terpencil; 2. Memperkuat peran koperasi dan lembaga keuangan mikro dalam memberikan pembiayaan bagi masyarakat kecil dan pelaku UMKM; 3. Mendorong program edukasi keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan dan pemuda;	1. Mendorong kebijakan bank inklusif yang mewajibkan bank untuk melayani masyarakat berpenghasilan rendah; 2. Meningkatkan kerja sama dengan fintech untuk mempercepat akses keuangan digital di daerah terpencil; 3. Mengembangkan skema kredit mikro berbunga rendah untuk mendukung UMKM dan wirausaha lokal.

					4. Memfasilitasi pembukaan rekening bank untuk masyarakat tidak terlayani (unbanked population) guna meningkatkan akses terhadap layanan keuangan formal.	
				S43	Meningkatkan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%). Pendapatan daerah yang kuat akan mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program ekonomi yang berkelanjutan : 1. Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui digitalisasi sistem pajak untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi; 2. Ekstensifikasi sumber pajak daerah, misalnya dengan memperluas basis pajak dari sektor-sektor potensial seperti industri, pariwisata, dan ekonomi digital; 3. Peningkatan kesadaran wajib pajak melalui sosialisasi dan insentif bagi pelaku usaha yang taat pajak; 4. Menerapkan kebijakan insentif fiskal untuk menarik investasi baru sambil tetap menjag keseimbangan pendapatan daerah.	1. Menyediakan kebijakan insentif bagi investasi di sektor unggulan yang dapat mendorong PDRB daerah; 2. Meningkatkan efisiensi tata kelola ekonomi daerah untuk mempercepat pertumbuhan usaha lokal; 3. Memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mengelola potensi ekonomi wilayah.
M6	T9	S13	Perkotaan dan Pedesaan sebagai pusat Pertumbuhan Ekonomi di papua Tengah	S43	Meningkatkan Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Provinsi terhadap Nasional. Papua Tengah harus mendorong sektor unggulan di perkotaan dan pedesaan agar berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi nasional: 1. Pengembangan sektor industri berbasis sumber daya lokal, seperti perikanan, pertanian, kehutanan, dan pertambangan, dengan pendekatan hilirisasi; 2. Peningkatan daya saing sektor jasa dan pariwisata di kota dan desa untuk menarik lebih banyak investasi;	1. Mengalokasikan dana APBD dan kerja sama dengan sektor swasta untuk pengembangan hunian terjangkau; 2. Meningkatkan regulasi tata ruang agar pembangunan perumahan sesuai dengan prinsip keberlanjutan; 3. Memfasilitasi program CSR perusahaan untuk mendukung penyediaan rumah bagi masyarakat kurang mampu.

					3. Pembangunan infrastruktur ekonomi seperti kawasan industri, pusat logistik, dan pasar modern di kota dan desa; 4. Peningkatan konektivitas antara kota dan desa melalui jalur transportasi yang lebih efisien guna memperlancar distribusi hasil produksi.	
				S44	Meningkatkan Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%). Hunian yang layak menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong produktivitas ekonomi : 1. Program pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah; 2. Penguatan skema kredit perumahan terjangkau, seperti KPR subsidi bagi masyarakat kurang mampu; 3. Peningkatan infrastruktur permukiman, termasuk penyediaan air bersih, listrik, dan sanitasi; 4. Pengembangan kota hijau dan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek lingkungan dan tata ruang yang ramah penduduk.	1. Mengalokasikan dana APBD dan kerja sama dengan sektor swasta untuk pengembangan hunian terjangkau; 2. Meningkatkan regulasi tata ruang agar pembangunan perumahan sesuai dengan prinsip keberlanjutan; 3. Memfasilitasi program CSR perusahaan untuk mendukung penyediaan rumah bagi masyarakat kurang mampu. 4. Pembangunan Rumah Swadaya
				S45	Meningkatkan Persentase Desa Mandiri. Desa mandiri adalah desa yang memiliki ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga mampu berkembang secara berkelanjutan: 1. Penguatan ekonomi desa berbasis komoditas unggulan, seperti pertanian, perikanan, dan ekowisata; 2. Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menggerakkan perekonomian lokal dan meningkatkan kemandirian desa;	1. Memberikan insentif bagi desa yang berhasil meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya; 2. Meningkatkan alokasi Dana Desa untuk program-program yang bersifat produktif; 3. Mendorong transformasi digital di desa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi. 4. Pengembangan Desa Wisata

					3. Pengembangan infrastruktur desa, termasuk jalan desa, listrik, jaringan internet, dan air bersih untuk mendukung aktivitas ekonomi; 4. Peningkatan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa.	5. Pengembangan Sarana Angkutan Perintis Laut, Darat, dan Udara
				S46	Meningkatkan Persentase Mantap Jalan. Kondisi jalan yang baik akan mempercepat mobilitas penduduk dan distribusi barang, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah: 1. Percepatan pembangunan dan perbaikan jalan provinsi, kabupaten, dan desa untuk memastikan aksesibilitas yang lebih baik; 2. Penggunaan teknologi jalan yang lebih tahan lama guna mengurangi biaya perawatan dan meningkatkan kualitas infrastruktur; 3. Peningkatan anggaran pembangunan jalan dari APBD, Dana Desa, dan kerja sama dengan swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP); 4. Integrasi perencanaan infrastruktur jalan dengan pengembangan kawasan ekonomi untuk memastikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.	1. Menyediakan regulasi yang mendukung pembangunan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan; 2. Mempercepat implementasi program pembangunan jalan di daerah terpencil dan pedesaan; 3. Memastikan keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur jalan agar lebih berkelanjutan. 4. Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong ruas Jalan Wagete- Timika, Mulia–Sinak, Ilu–Mulia–Enarotali,Karubaga–Ilu–Mulia
M7	T10	S14	Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau di Papua Tengah	S47	Meningkatkan Indeks Ekonomi Hijau Daerah. Indeks ini mengukur sejauh mana praktik ekonomi di daerah telah memperhitungkan keberlanjutan lingkungan: 1. Pengembangan sektor ekonomi berbasis sumber daya alam yang lestari, seperti ekowisata, perikanan berkelanjutan, dan pertanian organik; 2. Penguatan kebijakan konservasi hutan dan ekosistem, dengan memanfaatkan skema karbon kredit dan insentif bagi perusahaan yang menerapkan prinsip ramah lingkungan;	1. Mengembangkan kebijakan fiskal hijau, seperti insentif pajak untuk industri hijau dan denda bagi perusahaan yang mencemari lingkungan; 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan daerah dalam menerapkan ekonomi hijau melalui perencanaan pembangunan berkelanjutan;

					3. Meningkatkan peran UMKM hijau yang berfokus pada produk ramah lingkungan dan ekonomi sirkular (reduce, reuse, recycle); 4. Implementasi regulasi pembangunan rendah karbon, termasuk pembatasan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali; 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi.	3. Mendorong kerja sama dengan lembaga internasional dan swasta dalam program investasi hijau. 4. Penyaluran bantuan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan 5. Penyaluran benih ikan air laut ke masyarakat 6. Peningkatan fasilitas tempat pelelangan Ikan (TPI) 7. Pengembangan kampung nelayan dan desa perikanan cerdas (*smart fisheries village*) 8. Penguatan kelembagaan ekonomi nelayan 9. Hilirisasi produk akuakultur 10. Produk hilirisasi pangan hasil laut 11. Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan
				S48	Meningkatkan Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Primer (%). Energi Baru Terbarukan (EBT) adalah kunci utama dalam menurunkan emisi karbon dan menciptakan ketahanan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan : 1. Pengembangan energi surya, hidro, dan biomassa sebagai sumber energi utama di Papua Tengah, terutama untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik konvensional; 2. Mendorong penggunaan biodiesel dan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif bagi sektor transportasi dan industri;	1. Menyusun regulasi daerah yang mewajibkan penggunaan energi hijau dalam proyek-proyek pembangunan besar; 2. Memberikan insentif pajak dan subsidi bagi investasi di sektor energi terbarukan; 3. Mempercepat transisi dari bahan bakar fosil ke energi hijau melalui kebijakan energi yang adaptif dan berorientasi jangka panjang; 4. Mendorong BUMD dan swasta untuk berinvestasi dalam proyek

					3. Meningkatkan investasi dalam teknologi energi terbarukan, termasuk penelitian dan pengembangan (R&D) energi bersih; 4. Membangun infrastruktur energi hijau, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah pedesaan; 5. Mendorong program konversi energi di sektor rumah tangga dan industri dari energi fosil ke energi hijau.	energi hijau melalui skema Public-Private Partnership (PPP).
M7	T10	S15	Terwujudnya Lingkungan hidup berkualitas	S49	Meningkatkan Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah. Keanekaragaman hayati Papua Tengah yang kaya harus dikelola dengan pendekatan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan: 1. Penguatan kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem melalui penegakan hukum dan patroli hutan; 2. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pelestarian keanekaragaman hayati, seperti pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan ekowisata; 3. Pengurangan deforestasi dan degradasi hutan melalui skema karbon kredit dan perhutanan sosial; 4. Kolaborasi dengan lembaga riset dan NGO dalam upaya pelestarian flora dan fauna khas Papua.	1. Menetapkan zonasi perlindungan dan restorasi ekosistem hutan serta perairan; 2. Memberikan insentif bagi industri yang menerapkan praktik berkelanjutan dan ramah lingkungan; 3. Memperkuat peran pemerintah daerah dalam pemantauan dan penegakan hukum terhadap eksploitasi ilegal.
				S50	Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah. Indeks ini mencerminkan tingkat pencemaran air, udara, dan tanah di suatu wilayah: 1. Peningkatan pengawasan industri dan pertambangan untuk mengurangi pencemaran air dan tanah; 2. Penghijauan perkotaan dan restorasi ekosistem kritis, seperti hutan mangrove dan daerah aliran sungai (DAS);	1. Menyusun regulasi daerah yang lebih ketat terhadap pencemaran lingkungan; 2. Mewajibkan industri untuk memiliki analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang transparan dan dapat dipantau masyarakat;

					3. Peningkatan program pengendalian polusi udara, termasuk regulasi terhadap emisi kendaraan dan industri; 4. Penyediaan sistem peringatan dini bencana lingkungan, seperti banjir dan tanah longsor.	3. Mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam aktivitas industri dan perkotaan. 4. Reklamasi Pasca Tambang
				S51	Meningkatkan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%). Sanitasi yang baik berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan : 1. Pembangunan sistem sanitasi terpadu di permukiman dan pedesaan, seperti septic tank komunal dan pengolahan limbah domestik; 2. Program penyediaan air bersih dan sanitasi aman di sekolah serta fasilitas umum; 3. Edukasi masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang baik untuk kesehatan dan lingkungan.	1. Mengalokasikan dana khusus untuk pembangunan fasilitas sanitasi di daerah yang belum memiliki akses memadai; 2. Mengintegrasikan program sanitasi dalam kebijakan perencanaan pembangunan daerah; 3. Menyediakan insentif bagi rumah tangga yang menerapkan sanitasi berbasis ekologi (eco-sanitation). 4. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
				S52	Meningkatkan Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%). Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan. Sampah yang tidak terkelola dapat mencemari tanah, air, dan udara, sehingga harus dikelola dengan sistem yang baik : 1. Pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu, termasuk daur ulang dan pemanfaatan limbah organik; 2. Mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengolahan sampah, seperti refuse-derived fuel (RDF) dan biogas; 3. Kolaborasi dengan sektor swasta dalam investasi fasilitas pengolahan sampah.	1. Mewajibkan setiap kabupaten/kota memiliki fasilitas pengolahan sampah skala regional; 2. Memberikan insentif bagi industri yang menggunakan bahan baku dari limbah daur ulang.
				S53	Meningkatkan Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%): 1. Perluasan layanan pengumpulan sampah berbasis komunitas, terutama di daerah terpencil;	1. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam penyediaan layanan pengumpulan sampah;

					2. Penerapan sistem retribusi sampah berbasis jumlah produksi limbah untuk mendorong masyarakat mengurangi sampah; 3. Penyediaan fasilitas dropbox sampah di titik-titik strategis perkotaan dan pedesaan.	2. Mengembangkan regulasi daerah tentang pemilahan dan pengolahan sampah di tingkat rumah tangga; 3. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas.
M7	T10	S16	Terwujudnya berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	S54	Ketahanan Energi: 1. Peningkatan akses listrik ke seluruh wilayah Papua Tengah, termasuk daerah pedalaman dan terpencil melalui pembangunan infrastruktur jaringan listrik dan solusi energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Mikrohidro; 2. Diversifikasi sumber energi dengan mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti bioenergi, tenaga air, dan tenaga surya; 3. Peningkatan efisiensi energi dalam industri, rumah tangga, dan transportasi melalui penerapan teknologi hemat energi; 4. Mendorong investasi swasta dalam sektor energi hijau untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil; 5. Edukasi dan insentif penggunaan peralatan hemat energi di sektor industri dan rumah tangga.	1. Memperluas jaringan listrik ke daerah terpencil dengan memanfaatkan energi terbarukan; 2. Menerapkan regulasi efisiensi energi untuk sektor industri dan transportasi; 3. Memberikan insentif bagi investor dan masyarakat yang menggunakan energi bersih dan hemat energi.
				S55	Ketahanan Pangan: 1. Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan dengan modernisasi alat pertanian dan pendampingan petani/peternak; 2. Diversifikasi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada beras dan meningkatkan konsumsi pangan bergizi berbasis komoditas lokal seperti sagu, ubi-ubian, dan pisang; 3. Pengembangan rantai pasok pangan yang efisien	1. Mewujudkan Papua Tengah sebagai daerah mandiri pangan dengan optimalisasi potensi pertanian dan perikanan lokal; 2. Menyediakan program bantuan pangan bagi kelompok rentan serta edukasi gizi bagi masyarakat; 3. Meningkatkan infrastruktur distribusi pangan agar harga tetap

					dengan memperkuat infrastruktur logistik dan penyimpanan hasil pertanian; 4. Meningkatkan ketahanan pangan berbasis komunitas dengan membangun lumbung pangan desa dan meningkatkan peran koperasi pangan; 5. Penyediaan subsidi dan insentif bagi petani dan nelayan untuk memastikan keberlanjutan usaha mereka.	stabil dan terjangkau. 4. Optimalisasi Lahan Termasuk Revitalisasi Lahan rusak Menjadi Profuktif 5. Pengendalian Organime Pengangu Tumbuhan (OPT) tanaman 6. Fasilitasi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani 7. Penyediaan Alat dan Mesin Pretanian Pra Panen 8. Pengembangan Model Percontohan Pertanian Modern 9. Peningkatan makanisasi Pertanian 10. Percontohan Penerapan Teknologi Pertanian, Termasuk Digital Farming
				S56	Ketahanan Air: 1. Penguatan infrastruktur air baku dan air bersih melalui pembangunan waduk, embung, dan sistem perpipaan yang efisien; 2. Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dengan konservasi daerah aliran sungai (DAS) dan reboisasi kawasan hulu; 3. Peningkatan layanan akses air bersih bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan melalui pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM); 4. Penerapan teknologi pengolahan air modern seperti sistem filtrasi dan desalinasi untuk daerah pesisir; 5. Edukasi dan sosialisasi efisiensi penggunaan air di sektor rumah tangga dan industri.	1. Mempercepat pembangunan infrastruktur air bersih di daerah yang masih memiliki akses terbatas; 2. Mewajibkan industri dan pertambangan untuk memiliki sistem pengolahan limbah air agar tidak mencemari sumber air bersih; 3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam konservasi sumber daya air dan pemanfaatan teknologi hemat air.
M7	T10	S17	Terwujudnya	S57	Mitigasi Perubahan Iklim dan Penurunan Emisi GRK :	1. Implementasi kebijakan nol

			Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		1. Pengurangan deforestasi dan degradasi hutan melalui perlindungan kawasan hutan serta penguatan regulasi terhadap aktivitas ilegal seperti pembalakan liar dan alih fungsi lahan; 2. Pengembangan energi bersih dan rendah karbon, seperti penggunaan energi surya, bioenergi, dan tenaga air untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil; 3. Penerapan pertanian dan peternakan berkelanjutan dengan teknik agroforestri, pertanian rendah emisi, serta efisiensi dalam penggunaan pupuk dan pestisida; 4. Pengelolaan sampah dan limbah secara berkelanjutan, termasuk pengurangan sampah plastik, peningkatan daur ulang, dan pemanfaatan limbah organik sebagai sumber energi terbarukan; 5. Mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik dan sistem transportasi berbasis energi hijau.	deforestasi dan peningkatan peran masyarakat adat dalam menjaga kelestarian lingkungan; 2. Penyusunan regulasi yang mendorong industri di Papua Tengah untuk menerapkan produksi rendah karbon; 3. Meningkatkan investasi dalam sektor energi terbarukan dan transportasi rendah emisi; 4. Penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam aksi mitigasi perubahan iklim.
				S58	Adaptasi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim: 1. Penguatan sistem peringatan dini terhadap bencana alam dengan membangun pusat informasi bencana dan memperkuat sistem pemantauan cuaca dan iklim; 2. Pembangunan infrastruktur tahan bencana, seperti tanggul, waduk pengendali banjir, dan rumah tahan gempa di daerah rawan bencana; 3. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk pelatihan kesiapsiagaan bencana dan penanggulangan darurat berbasis komunitas; 4. Pengelolaan tata ruang berbasis risiko bencana, memastikan pembangunan tidak dilakukan di zona rentan bencana seperti daerah rawan banjir dan	1. Memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, BPBD, dan lembaga kebencanaan nasional dalam penanggulangan bencana; 2. Mewajibkan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan standar ketahanan bencana dan adaptasi iklim; 3. Meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana dan perubahan iklim; 4. Mendorong investasi dalam penelitian dan teknologi adaptasi iklim untuk sektor pertanian,

					longsor; 5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan anggaran untuk penanganan bencana, termasuk dana cadangan bencana yang memadai.	perkebunan, dan perikanan.

Sumber : RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 – 2029 diolah

9. Penyelarasan dengan RKP 2026

Tema RKP Tahun 2026 sesuai dokumen Rencana Kerja Pemerintah adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tema tersebut menekankan pentingnya kegiatan ekonomi yang memiliki dua komponen yaitu inklusif dan berkelanjutan. Adapun fokus pembangunan provinsi dapat dilihat dari arah kebijakan RKP, yaitu :

a. Kedaulatan Pangan dan energi:
- Optimalisasi peran bulog dan pelaksanaan program lumbung pangan;
- Peningkatan Pengungaan energi terbarukan, seperti campuran etanol dan biodiesel;
- Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terintegrasi dari hulu ke hilir;
- Pengelolaan Sampah.

b. Ekonomi yang Produktif dan Inklusif:
- Peningkatan Produktivitas Industri melalui hilirisasi Sumber Daya Alam;
- Percepatan transformasi digital;
- Peningkatan Investasi Produktif, terutama investasi asing yang berorientasi ekspor;
- Penguatan daya saing melalui deregulasi perizinan.

Selanjutnya, target indikator sasaran pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 dapat diacu sesuai dengan indikator berikut.

Tabel 4. 3 Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2026

No	Indikator Sasaran Pembangunan	Target Tahun 2026	Satuan
1	*2*	*3*	*4*
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,7-7,2	(%)
2	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	138,2 – 143,6	(%)
3	Kontribusi PDRB provinsi (%)	0,8	(%)
4	Tingkat Kemiskinan (%)	24,50 – 25,50	Nilai
5	Gini Rasio	0,343-0,350	Rasio
6	Indeks Modal m anusia	0,43	Indeks
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	59,28	(%)
8	IKLH Daerah	82,72	(%)
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,31-2,36	(%)

Sumber: RKP Nasional Tahun 2026

10. Penyelarasan dengan RIPPP Tahun 2022 - 2041

Dokumen Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022 – 2041 perlu diperhatikan dalam penyelarasan arah Pembangunan Perubahan RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2026, sebagai salah satu acuan dokumen rencana pembangunan dalam skala yang lebih makro. Adapun visi pembangunan Papua tahun 2041 adalah adalah "*Papua yang Mandiri, Adil, dan Sejahtera*", yang menekankan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta peningkatan kualitas SDM. Upaya perwujudan visi Papua di atas ditempuh melalui 3 misi dan sasaran indikator, yaitu:

1. Misi 1: memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator umur harapan hidup (UHH) dan prevalensi stunting.

2. Misi 2: memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter dan mampu bekerjasama, menuju Papua Cerdas, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS).
3. Misi 3: meningkatkan kompetensi, kreativitas dan inovasi dengan pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju Papua Produktif, dengan sasaran tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk, yang diukur melalui indikator tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan realiasasi investasi (penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri).

Berdasarkan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan otonomi khusus bagi Provinsi papua sebelumnya, Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua tahap I (RAPPP I) tahun 2023-2025 ditujukan untuk penataan kembali pembangunan wilayah papua di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pengembangan ekonomi berbasis sektor unggulan wilayah. Adapun arahan pembangunan wilayah Papua dapat dijabarkan menjadi :

Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kesehatan yang diarahkan pada:

1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, dengan strategi:
   a. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan primer maupun pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar dan akreditasi.
   b. Peningkatan pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan kuantitas dengan mengutamakan tenaga kesehatan orang asli Papua (OAP).
2. Penataan budaya perilaku hidup sehat dan tata kelola pelayanan kesehatan yang dilakukan dengan strategi :
   a. Peningkatan kemauan dan kemampuan masyarakat dalam gerakan perilaku hidup bersih dan sehat melalui peningkatan komitmen/dukungan kebijakan kabupaten/kota dan implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
   b. Peningkatan kualitas tata kelola program pembangunan bidang kesehatan dan tata kelola pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan.
3. Penataan budaya dan peningkatan prestasi olahraga, dengan strategi:
   a. Peningkatan pembudayaan olahraga di masyarakat.
   b. Peningkatan tata kelola dalam rangka peningkatan budaya dan prestasi olahraga.
   c. Peningkatan kualitas pembinaan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi.

Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pendidikan yang diarahkan pada penataan budaya belajar serta menjamin akses dan kualitas pelayanan pendidikan papua secara merata dengan strategi:

a. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
b. Peningkatan kompetensi, pengelolaan, pemenuhan dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan Pembangunan ekonomi yang diarahkan pada:
   1. Penataan kesempatan kerja dan daya saing tenaga kerja, dengan strategi:

a. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.
b. Peningkatan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (*skill development center*).

2. Penataan pelaksanaan perlindungan sosial untuk kehidupan yang adil dan merata, dengan strategi:
   a. Peningkatan jangkauan pendataan registrasi sosial ekonomi (Regsosek) dan pemanfaatannya dalam penyusunan dan pelaksanaan program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat, termasuk data terpilah OAP.
   b. Peningkatan dukungan dan afirmasi perlindungan sosial terhadap penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

11. Hasil Penyelarasan terhadap Dokumen Perencanaan

Melalui hasil telaah dokumen-dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman, dan dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis dan permasalahan pembangunan antara lain:

1. Prioritas pembangunan tahap I (pertama) RPJP Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045;
2. Fokus pembangunan tahun II (periode kedua) RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029;
3. Isu aktual Pembangunan Provinsi Papua Tengah saat ini;
4. Tema, arah kebijakan dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2026;
5. Visi, Misi dan Fokus Pembangunan Papua dalam dokumen RIPPP;

Maka dapat dirumuskan beberapa fokus pembangunan yang selaras dengan masing-masing dokumen rujukan, seperti pada tabel berikut.

Tabel 4. 4 Fokus Pembangunan Setiap Dokumen Rujukan RKPD Tahun 2026

No	Dokumen Perencanaan Rujukan	Fokus Pembangunan Tahun 2026
1	*2*	*3*
1	RPJP Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045	Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Responsif, Efektif, dan Efisien serta peningkatan akses Pelayanan Dasar bagi Masyarakat.
2	RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029	Penguatan SDM dan Tata kelola Pemerintahan yang bermartabat dan efektif
3	RKP Tahun 2026	Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif
4	RIPPP	Papua yang Mandiri, Adil, dan Sejahtera

Sumber : RPJPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045, dan RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2026

Berdasarkan keterkaitan tema arahan pembangunan 2026 dari beberapa dokumen rujukan, dirumuskan tema Peruabahn RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 yaitu:

" Penguatan SDM dan Tata kelola Pemerintahan yang bermartabat dan efektif"

Tema tersebut mengandung makna bahwa di tahun 2026 pembangunan Provinsi Papua Tengah fokus utama pembangunan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Papua Tengah serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini sesuai

dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 yang mendorong akselerasi pembangunan di berbagai bidang, ditambah adanya urgensi pembangunan infrastruktur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dengan demikian, dapat dijabarkan beberapa poin penting dalam kalimat tema Perubahan RKPD Provinsi Papua Tengah tahun 2026, yaitu:

1. Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM.

Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM adalah upaya meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat melalui pendidikan formal, nonformal, dan pelatihan kerja sehingga SDM menjadi lebih kompeten, produktif, dan siap menghadapi kebutuhan pembangunan serta pasar kerja.

2. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Dengan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan adalah proses pembenahan sistem pemerintahan agar lebih efisien, transparan, akuntabel, dan responsif, sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat, tepat, dan berkualitas.

3. Penguatan Layanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan

Dengan Penguatan Layanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan antara lain terciptanya masyarakat yang lebih sehat melalui akses layanan kesehatan yang lebih baik, pencegahan penyakit yang lebih efektif, serta penanganan kesehatan yang lebih cepat dan berkualitas. Upaya ini juga meningkatkan produktivitas karena masyarakat yang sehat dapat bekerja dan beraktivitas dengan optimal. Selain itu, peningkatan kesejahteraan memperkuat kondisi sosial-ekonomi keluarga, mengurangi beban biaya kesehatan, serta mendorong kualitas hidup yang lebih layak dan berkelanjutan.

4. Peningkatan Tata Kelola Keuangan Daerah dan Efisiensi Anggaran

Peningkatan Tata Kelola Keuangan Daerah dan Efisiensi Anggaran, berfokus pada upaya memperbaiki sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan daerah agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Fokus utama termasuk penerapan prinsip akuntabilitas dalam setiap siklus keuangan, optimalisasi pendapatan daerah, pengurangan pemborosan belanja, serta memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memberikan manfaat maksimal untuk pembangunan. Upaya ini juga menekankan penguatan pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen keuangan, serta peningkatan kapasitas aparatur agar proses pengelolaan anggaran menjadi lebih efisien, efektif, dan sesuai regulasi.

5. Penguatan Demokrasi dan Penegakan Hukum yang berkeadilan

Dengan Penguatan Demokrasi dan Penegakan Hukum yang Berkeadilan berfokus pada upaya memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses politik, meningkatkan transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dan memastikan setiap warga memperoleh perlindungan hukum yang setara.

6. Peningkatan Partisipasi Perempuan, Pemuda, dan Masyarakat Inklusif dalam Pembangunan

Peningkatan Partisipasi Perempuan, Pemuda, dan Kelompok Inklusif dalam Pembangunan bertujuan memastikan seluruh kelompok masyarakat memiliki kesempatan setara untuk terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Upaya ini mendorong pemberdayaan melalui peningkatan kapasitas, akses informasi, dan ruang partisipasi publik yang ramah serta nondiskriminatif. Dengan keterlibatan yang lebih luas, kebijakan dan program pembangunan menjadi lebih responsif, berkeadilan, dan mampu menjawab kebutuhan beragam kelompok masyarakat.

4.3 Prioritas Pembangunan Tahun 2026

Berdasarkan Tema Perubahan RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 yang telah dirumuskan diatas yaitu: "Penguatan SDM dan Tata kelola Pemerintahan yang bermartabat dan efektif"

Maka dirumuskan 5 (Lima) Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tengah tahun 2026 yaitu sebagai berikut :

Prioritas1:Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM
Prioritas2:Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Prioritas3:Penguatan Layanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyrakat
Prioritas4:Peningkatan Tata Kelola Keuangan Daerah dan Efisiensi Anggaran
Prioritas5:Penguatan Demokrasi dan Penegakan Hukum yang berkeadilan
Prioritas6:Peningkatan Partisipasi Perempuan, Pemuda, dan Masyarakat Inklusif dalam Pembangunan

Prioritas pembangunan dan program pembangunan daerah sebagaimana tersebut diatas akan menjadi petunjuk terhadap penentuan program prioritas dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Papua Tengah. Hal ini sejalan dengan pemikiran terhadap paradigma *"Money Follow Program Priority"* atau dalam terjemahan "Uang Mengikuti Program Prioritas". Perumusan program/kegiatan bagi Provinsi, Kab/Kota juga mempertimbangkan limitasi kewenangan dalam UU No 23 Tahun 2014. Pilihan penggunaan terhadap paradigma tersebut merubah paradigma sebelumnya yaitu *"Money Follow Function"* yang selama ini cenderung dilakukan oleh Kab/Kota atau SKPD/OPD Provinsi.

Dengan terumuskannya prioritas pembangunan tahun 2026, maka ketersediaan anggaran diarahkan pada pencapaian prioritas pembangunan tahun 2026. Oleh karena itu dibutuhkan kemauan dan sinergitas dari Organisasi Perangkat Daerah guna mencapai prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Provinsi menetapkan Program Super Prioritas Tahun 2025–2030 yang menjadi arah kebijakan pembangunan daerah. Program super prioritas tersebut diarahkan untuk mempercepat pembangunan pada sektor-sektor strategis yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar.

Program super prioritas dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

No	Perangkat Daerah	Program Prioritas
1	*2*	*3*
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1) Sekolah Sepanjang Hari (SSH) 2) Pendidikan Gratis (BOSDA) 3) Pembangunan Asrama Sekolah di setiap kabupaten 4) Pengembangan Kapasitas Guru 5) Program MAPEGA 6) Program PPG 7) Boarding School / Kerjasama Lembaga 8) PendidikanPendirian Universitas 9) Pembangunan Community College
2.	DINAS KESEHATAN	1) Pembangunan Rumah Sakit Provinsi 2) Program KO HARUS SEHAT 3) Pembinaan & Penguatan Rsud dan Puskesmas di 8 Kabupaten 4) Pendidikan Dokter Spesialis OAP

		5) Pembangunan Klinik Bersalin dan Bayi Tabung
3.	DINAS PUPR & KAWASAN PEMUKIMAN	1) Pembangunan dan Penataan Perkantoran Puspem + Air Bersih 2) Review Ulang Master Plan/Basic Desain (Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah) 3) Pembangunan Sumber Air Baku/ PDAM di Nabire 4) Pembangunan Jalan dan Jembatan di 8 Kabupaten 5) Pembangunan Air Bersih di 8 Kabupaten 6) Pembangunan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat (OAP)
4.	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	1) Pembangunan (UPTD Balai Pembibitan Peternakan) = Tim Percepatan 2) Pembinaan Petani Kopi (Penanaman Sejuta Pohon Kopi) = Tim Koperasi Kopi
5.	DINAS TANAMAN PANGAN, BHOLTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN	1) Pembukaan Lahan Pertanian Percontohan
6.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1) Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Waharia Nabire 2) Pembangunan UPTD BBI (Balai Benih Ikan) Budidaya Ikan Air Tawar 3) Aktivasi Cold Storage dan PPI di Nabire dan Timika
7.	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ESDM	1) Listrik Menyala 24 Jam di Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, dan Intan Jaya 2) Pembangunan Pembangkit Listrik Mikro Hidro 3) Pembangunan Pusat Panel Surya 4) Survei Potensi Pertambangan 5) Pengembangan Pertambangan Rakyat beserta Regulasinya 6) Pembangunan BLK
8.	DINAS SOSIAL	1) Pembangunan Panti Asuhan Papua Tengah 2) Program Bangkit Papua Tengah 3) Bantuan Sepeda Motor untuk usaha ojek di 8 Kabupaten
9.	DINAS PERHUBUNGAN	1) Pengembangan Bandara Nabire 2) Pembangunan Jembatan Timbang 3) Subsidi Penerbangan Perintis dari Ibu Kota Kabupaten – Timika/Nabire (PP)
10.	DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN	1) Peningkatan Bandwith 5G (Kerja sama dengan Telkomsel) 2) Pengadaan Dan Pemasangan CCTV di Kabupaten Nabire
11.	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1) Pendirian dan Pembinaan Koperasi di 8 Kabupaten
12.	SATPOL PP	1) Pelatihan PPNS 2) Pelatihan Bina Mental dan Fisik

		3) Pengadaan Seragam dan Atribut
13.	DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1) Pembangunan Gudang Buffer Stock
14.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	1) Penguatan Peran Perempuan 2) Pelatihan Usaha Kecil Untuk Perempuan
15.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTAHANAN	1) Pembentukan Satgas Merah
16.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1) Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
17.	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUMAS	1) Pembuatan Media Center (Cetak, Elektronik & Cyber)
	• BIRO TAPEM, KESRA, & OTSUS	1) Penyusunan LPPD 2) Pemetaan Hak Ulayat Tanah Adat 3) Persekutuan Gereja Se-Tanah Papua (Konfrensi)
	• BIRO EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	1) Pembentukan Pusat Analisis Perekonomian Daerah (Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Statistik, & BUMD)
	• BIRO HUKUM	1) Semiloka Peningkatan Kesadaran Anti Korupsi 2) Pendampingan Hukum
	• BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	1) Pelatihan & Sertifikasi Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah
	• BIRO ORTALA	1) Penyusunan Dokumen LKPD, SAKIP, LAKIP, & TPP
18.	DINAS KEPEMUDAHAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	1) Pembangunan Sport Centre
19.	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	1) Sensus OAP Papua Tengah (Berdasarkan Agama)
20.	SEKRETARIAT DPRD	1) Pelatihan Penyusunan LPJ Kepada Pendamping Anggota DPR
21.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	1) Pelatihan Peningkatan SDM Perencanaan 2) Tim Pendamping Peningkatan Bidang Riset & Inovasi Daerah 3) Rakor Perencanaan Pembangunan Daerah
22.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1) Pembangunan Balai Diklat 2) Pelatihan Manajemen ASN 3) Sosialisasi Pendidikan Sekolah Kedinasan & Try Out
23.	INSPEKTORAT	1) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP,Kemendagri 2) Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK

		3) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 4) Penyusunan Register Resiko 5) Monitoring Audit & Review
24.	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	1) Pelatihan Penganggaran 2) Pelatihan Penatausahaan & Pelaporan 3) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Di Bidang Barang Milik Daerah (BMD) 4) Pelatihan Peningkatan Kapasitas di Bidang Pendapatan 5) BKK (Paniai, Deiyai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya)
25.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1) Pembentukan Satgas Pengawal Pembangunan
26.	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA	1) Sosialisasi UU Otsus & Perdasi Otsus

4.4 Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Prioritas Pembangunan tahun 2026 sebagaimana tersebut diatas merupakan arahan bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2026 yang berkolerasi dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029. Adapun Sasaran Makro Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah tahun 2026 sebagai perwujudan Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Papua Tengah tahun 2025-2029, adalah:

Tabel 4. 5 Sasaran Makro Pembangunan Daerah Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target
			2024	2025	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	4,36	5,2	-21,80	6,05
2	Tingkat Kemiskinan (%)	%	27,60	26,50 - 27,00	28,90	26,50 - 27,00
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	2,75	2,65 – 3,12	3,62	2,65 – 3,12
4	Pendapatan Per Kapita (juta rupiah per kapita)	Rp/Juta	119,5	128,7	N/A	141,7
5	Indeks Modal Manusia (indeks)	Indeks	0,42	0,42	N/A	0,427
6	Ketinpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Rasio	0,383	0,380-0,383	0,340	0,380-0,383
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	%	59,28	59,28	N/A	61,22
8	Indeks kualitas lingkungan hidup Daerah	Indeks	82,56	82,56	86,78	82,72
9	Kontribusi PDRB PROVINSI (%)	%	0,8	0,8	N/A	0,8

Sumber : RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 data diolah **

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2026

Pelaksanaan pembangunan daerah otonomi baru tidak terlepas dari kerangka pendanaan pembangunan yang diproyeksikan saat ini. Terbentuknya Provinsi Papua Tengah membuat pemerintah daerah perlu membuat proyeksi pendanaan daerah demi keberlangsungan pemerintahan daerah. Untuk lebih jelas mengenai pedanaan daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1 dibawah ini:

Tabel 5. 1 Pagu Sebelum dan Pagu Perubahan Perangkat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 (rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Pagu Sebelum	Pagu Sesudah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	517,894,220,162.00	666,866,882,927.50
2	Dinas Kesehatan	193,261,897,429.00	266,066,080,948.00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	541,697,201,621.00	906,453,539,450.00
4	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	27.928.855.788,00	31,634,841,412.00
5	Dinas Penanggulangan Bencana Daerah, Kebakaran Dan Penyelamatan	16.530.790.285,00	16,720,762,662.00
6	Dinas Sosial	53.823.092.488,00	67,313,920,291.00
7	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi dan Sumber Daya Mineral	68.337.269.035,00	132,363,232,704.00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak Dan Keluarga Berencana	15.191.350.657,00	22,247,344,716.00
9	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Ketahanan Pangan	19.279.281.839,00	28,948,058,988.00
10	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan	36.305.946.955,00	47,636,817,145,00
11	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	18.011.794.482,00	14,411,101,365.00
12	Dinas Perhubungan	31.101.111.096,00	120,824,278,694.00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	17.531.677.352,00	26,654,719,814.00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	13.115.605.856,00	54,406,397,434.00
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.660.640.390,00	18,334,010,240.00
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	28.349.008.084,00	59,461,801,766.00
17	Dinas Kelautan Dan Perikanan	31.353.673.420,00	70,733,574,977.33
18	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	22.221.071.130,00	65,188,010,809.00

19	Sekretariat Daerah	115.843.528.333,00	349,614,458,456.00
20	Sekretariat DPRD	205,147,172,983.00	230,816,874,484.00
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	30.819.642.817,00	43,365,533,450.00
22	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	662,948,630,663.45	723,446,506,011.95
	UPT Pendapatan Nabire	3.000.000.000,00	3,000,000,000.00
	UPT Pendapatan Paniai	2.500.000.000,00	2,500,000,000.00
	UPT Pendapatan Mulia	2.000.000.000,00	2,000,000,000.00
	UPT Pendapatan Mimika	4.000.000.000,00	4,000,000,000.00
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	31.246.646.297,00	35,769,536,200.00
24	Inspektorat	36.490.580.078,00	37,288,406,256.00
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	51.865.700.291,00	67,672,705,510.00
26	Sekretariat MRP	85.864.218.541,00	95,033,639,117.00
TOTAL		2.902.320.608.072,45	4,210,773,035,827.78

Sumber: SIPD RI Tahun 2026

5.2. Rencana Program Pemerintah Daerah

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah, adalah bagian yang tidak terpisahkan yang penyusunannya memperhatikan batasan urusan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritahan Daerah. Sejalan dengan perubahan paradigma penganggaran "*money follow function*" kepada "*money follow program*", maka perlu dilakukan penjabaran secara operasional tentang program prioritas. Hal penting yang menjadi penekanan dalam perubahan paradigma tersebut, bahwa program prioritas wajib mendapat penguatan penganggaran, sehingga penganggaran untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 merupakan rumusan penganggaran yang memiliki korelasi terhadap pembangunan daerah yang dimana penganggaran lebih fokus dan terarah kepada target capaian pembangunan daerah. Adapun penentuan program prioritas disusun berdasarkan: (1). Merupakan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 sesuai dengan pentahapan tema RPJMD Provinsi Papua Tengah 20025-2029, (2). Merupakan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026 serta indikatornya. (3). Merupakan prioritas program ditingkat Perangkat Daerah yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah.

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun P-RKPD, dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1). Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan. (2). Menentukan keluaran/output setiap kegiatan. (3). Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program. (4). Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya. Menghitung alokasi Perangkat Daerah berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan

dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah. Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Program yang telah ditetapkan untuk P-RKPD, disampaikan ke Perangkat Daerah sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan Perangkat Daerah juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra-Perangkat Daerah sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

Dalam mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan, dirumuskan Program dan Kegiatan Prioritas P-RKPD Tahun 2026 untuk mendukung terwujudnya capaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029. Program dan Kegiatan Prioritas pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 yang telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 5.2 dibawah ini:

Tabel 5. 2 Rekapitulasi Pagu Perubahan Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2026

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	660,292,413,785.50	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23,164,710,645.00	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	40,509,120,270.00	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	595,243,230,870.50	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.375.352.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	6,574,469,142.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	5,812,829,882.00	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	289,249,060.00	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	472,390,200.00	
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	0	

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	266,066,080,948.00	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	19,885,498,878.00	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	226,378,230,452.00	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,320,000,000.00	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5,612,087,800.00	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	480,000,000.00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	12,390,263,818.00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	905,069,445,050.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	460,294,131,754.00	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	46,900,000,000.00	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3,300,000,000.00	
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2,200,000,000.00	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	6,000,000,000.00	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	0	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	20,000,000,000.00	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	950,000,000.00	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2,000,000,000.00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	361,865,646,226.00	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	559,667,670.00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	999,999,400.00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1,384,094,400.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	600.000.000,00	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	784.094.400,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	16,720,762,662.00	DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14,408,943,634.00	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	704,146,300.00	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	704,146,300.00	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1,607,672,000.00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	31,634,841,412.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17,258,159,812.00	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14,376,681,600.00	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	0	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	67,313,920,291.00	DINAS SOSIAL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13,273,412,391.00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	613,926,900.00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	644,765,000.00	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	10,506,811,000.00	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	675,005,000.00	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	41,600,000,000.00	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	0	
URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA	17,091,859,504.00	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ESDM
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7,532,247,496.00	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	6,350,000,000.00	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	0	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	0	

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	3,209,612,008.00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	115,021,373,200.00	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ESDM
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	5.550.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	0	
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	109,471,373,200.00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	250,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ESDM
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	0	
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	250.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	19,667,564,016.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5,023,064,642.00	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	11,750,954,974.00	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	991,012,500.00	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1,902,531,900.00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2,579,780,700.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	252.761.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	409.912.700,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1,917,107,000.00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	10,002,268,298.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7,341,577,698.00	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.660.690.600,00	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	0	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	0	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	18,945,790,690.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN

		KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	500.000.000,00	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	10,924,355,733.00	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3,021,434,957.00	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	4.500.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	16,700,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	15.154.324.200,00	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	187.631.800,00	
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	0	
PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	0	
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	1.358.044.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	7,533,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.506.600.000,00	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	0	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.026.400.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	23,403,817,145.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11,965,897,395.00	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	11.437.919.750,00	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8,000,700,000.00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.400.058.000,00	

PROGRAM PENCATATAN SIPIL	800.642.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	535.016.500,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	264,983,500.00	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	3,000,000,000.00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6,410,401,365.00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4,036,401,365.00	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	924.000.000,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1,450,000,000.00	
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ORANG ASLI PAPUA	0	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	120,824,278,694.00	DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	11,369,715,564.00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2,084,720,000.00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	0	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	5,514,043,130.00	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	0	
PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	101,855,800,000.00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	24,662,500,214.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7,118,161,349.00	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2,898,353,000.00	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	14,645,985,865.00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1,473,141,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1,473,141,000.00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	519,078,600.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK

		DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	519.078.600,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	32,806,373,434.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9,508,734,130.00	
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	4,673,112,100.00	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMEERIKSANAAN KOPERASI	0	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	0	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	374,527,204.00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	18,250,000,000.00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	0	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	0	
URUSAN PEMERINTAN BIDANG PERDANGAN	17,300,012,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	0	
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	0	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	10,000,000,000.00	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	7,000,000,000.00	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	0	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	300,012,000.00	
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	0	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	4,300,012,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2,300,012,000.00	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2,000,000,000.00	
PRPGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	0	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	18,334,010,240.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	14,759,580,640.00	

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	0	
PRORAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	830.299.000,00	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	768.545.900,00	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1,254,193,200.00	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	721.391.500,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	42,318,913,892.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7,867,254,460.00	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	3,238,000,000.00	
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	30,963,659,432.00	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	250.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAN BIDANG PARIWISATA	17,142,887,874.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI WISATA	1,292,887,874.00	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	11,100,000,000.00	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	2,250,000,000.00	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2,500,000,000.00	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	0	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	70,733,574,977.33	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9,406,281,914.00	
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PILAU-PULAU KECIL	1.493.199.300,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	29,590,815,538.00	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	0	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	25,467,631,428.00	
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER	78.213.760,00	

DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	4,697,433,037.33	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	65,188,010,809.00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6,310,830,044.00	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	49,523,116,598.00	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASRANA PERTANIAAN	7,383,308,100.00	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	720.756.067,00	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1,250,000,000.00	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
SEKRETARIAT DAERAH	349,614,458,442.00	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	275,524,345,530.00	
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	3,744,652,400.00	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	3.557.328.100,00	
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	49,437,693,100.00	
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	6.499.618.900,00	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	5,550,779,600.00	
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	3.499.942.012,00	
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.700.000.000,00	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA	100.098.800,00	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
PERENCANAAN	39,465,533,450.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	18,390,923,450.00	
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	12,524,540,000.00	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8,550,070,000.00	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3,900,000,000.00	BADAN PERENCANAAN

		PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	3,900,000,000.00	
KEUANGAN	725,501,506,011.95	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	375,597,736,891.95	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	344,101,828,520.00	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.160.444.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3,641,496,600.00	
UPT PENDAPATAN PANIAI	2,500,000,000.00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.635.243.500,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	864.756.500,00	
UPT PENDAPATAN MULIA	1,998,003,000.00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1,441,978,000.00	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	556,025,000.00	
UPT PENDAPATAN TIMIKA	4,000,000,000.00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.744.105.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.255.895.000,00	
UPT PENDAPATAN NABIRE	3,000,000,000.00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2,456,606,000.00	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	543.394.000,00	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEPEGAWAIAN	16,619,536,200.00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7,824,595,200.00	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	8.794.941.000,00	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	19,150,000,000.00	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	19.150.000.000,00	
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
INSPEKTORAT DAERAH	37,288,406,256.00	INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	24,412,723,256.00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	9.620.683.000,00	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN	3.255.000.000,00	

ASISTENSI		
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	67,672,705,510.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8,700,763,710.00	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	7.200.000.000,00	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI DAN LEMBAGA PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.705.724.800,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	26,150,000,000.00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	650.000.000,00	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	22,266,217,000.00	
UNSUR URUSAN PENDUDKUNG PEMERINTAHAN		
SEKRETARIAT DPRD	230,816,874,484.00	SEKRETARIAT DPRD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	92,885,029,284.00	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	128,245,029,700.00	
PROGRAM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA	9,686,815,500.00	
UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAHAN	95,033,639,117.00	MAJELIS RAKYAT PAPUA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	31,104,253,351.00	
PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROVINSI PAPUA	63,929,385,766.00	

Sumber: SIPD RI Tahun 2026

Tabel 5.3

Usulan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

DATA TERLAMPIR

Tabel 5. 1 Usulan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							369.875.869.150,00	517.894.220.162,00	666.866.882.927,50	296.991.013.777,50							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							339.580.359.889,00	512.682.522.687,00	660.292.413.785,50	320.712.053.896,50							0,00	
	1	NON URUSAN							25.083.811.786,00	0,00	0,00	-25.083.811.786,00							0,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							25.083.811.786,00	0,00	0,00	-25.083.811.786,00							0,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							339.580.359.889,00	512.682.522.687,00	660.292.413.785,50	320.712.053.896,50							0,00	
1,	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Tersedianya Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Penunjang Administrasi Pemerintah				-	100 %	25.083.811.786,00	22.782.339.786,00	23.164.710.645,00	-1.919.101.141,00					Aparatur OPD		0,00	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	121.200.000,00	121.200.000,00	280.046.000,00	158.846.000,00							0,00	
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	40.400.000,00	0,00	0,00	-40.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SUMBANGAN PIHAK KETIGA/ SEJENIS	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	40.400.000,00	40.400.000,00	40.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SUMBANGAN PIHAK KETIGA/ SEJENIS	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	40.400.000,00	40.400.000,00	40.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SUMBANGAN PIHAK KETIGA/ SEJENIS	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	40.400.000,00	0,00	0,00	-40.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SUMBANGAN PIHAK KETIGA/ SEJENIS	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	35.900.000,00	35.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SUMBANGAN PIHAK KETIGA/ SEJENIS	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan*				1 Dokumen	1 Dokumen	40.400.000,00	0,00	0,00	-40.400.000,00	Semua Kota/Kab,	SUMBANGAN PIHAK	-	Penguatan Kualitas Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN

			Dokumen DPA-SKPD									Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	KETIGA/ SEJENIS		dan Keterampilan SDM				KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	40.400.000,00	40.400.000,00	40.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SUMBANGAN PIHAK KETIGA/ SEJENIS	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	43.523.000,00	43.523.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	43.523.000,00	43.523.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	35.900.000,00	35.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	11.154.235.026,00	11.154.235.026,00	10.239.917.685,00	-914.317.341,00							0,00	
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				121 Orang/ Bulan	121 Orang/ Bulan	0,00	11.113.835.026,00	10.055.917.685,00	10.055.917.685,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAERAH-TUNJANGAN PROFESI GURU SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeluduan.	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				121 Orang/ Bulan	121 Orang/ Bulan	11.113.835.026,00	0,00	0,00	-11.113.835.026,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAERAH-TUNJANGAN PROFESI GURU SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeluduan.	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	40.400.000,00	0,00	0,00	-40.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SUMBANGAN PIHAK KETIGA/ SEJENIS	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	40.400.000,00	40.400.000,00	40.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecama	SUMBANGAN PIHAK KETIGA/ SEJENIS	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

													tan, Semua Kel/Desa			Keterampilan SDM			
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	35.900.000,00	35.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	35.900.000,00	35.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	35.900.000,00	35.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	35.900.000,00	35.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	40.400.000,00	40.400.000,00	148.100.000,00	107.700.000,00							0,00	
	1.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	40.400.000,00	40.400.000,00	40.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SUMBANGAN PIHAK KETIGA/ SEJENIS	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeluduan.	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	40.400.000,00	0,00	0,00	-40.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SUMBANGAN PIHAK KETIGA/ SEJENIS	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeluduan.	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	35.900.000,00	35.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SUMBANGAN PIHAK KETIGA/ SEJENIS	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	35.900.000,00	35.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SUMBANGAN PIHAK KETIGA/ SEJENIS	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	35.900.000,00	35.900.000,00	Semua Kota/Kab,	SUMBANGAN PIHAK	-	Penguatan Kualitas Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN

												Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	KETIGA/ SEJENIS		dan Keterampilan SDM				KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	611.512.800,00	611.512.800,00	826.449.000,00	214.936.200,00							0,00	
	1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				150 Orang	150 Orang	69.574.200,00	0,00	0,00	-69.574.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				150 Orang	150 Orang	0,00	69.574.200,00	284.510.400,00	284.510.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				50 Orang	50 Orang	0,00	541.938.600,00	541.938.600,00	541.938.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				50 Orang	50 Orang	541.938.600,00	0,00	0,00	-541.938.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	11.225.877.960,00	7.593.905.960,00	7.548.901.960,00	-3.676.976.000,00							0,00	
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				35 Paket	35 Paket	0,00	0,00	74.267.000,00	74.267.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				20 Paket	20 Paket	0,00	340.509.460,00	371.229.460,00	371.229.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SUMBANGAN PIHAK KETIGA/ SEJENIS PAJAK AIR PERMUKAAN PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PAJAK BAHAN	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

														BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA BAGI HASIL (DBH) LAIN-LAIN PAD YANG SAH						
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				20 Paket	20 Paket	340.509.460,00	0,00	0,00	-340.509.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SUMBANGAN PIHAK KETIGA/ SEJENIS PAJAK AIR PERMUKAAN PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA BAGI HASIL (DBH) LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				20 Paket	20 Paket	764.773.500,00	0,00	0,00	-764.773.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) PAJAK AIR PERMUKAAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH SUMBANGAN PIHAK KETIGA/ SEJENIS SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PAJAK KENDARA	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

													AN BERMOTOR (PKB) PAJAK ALAT BERAT DANA BAGI HASIL (DBH) PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA						
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				20 Paket	20 Paket	0,00	764.773.500,00	764.773.500,00	764.773.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) PAJAK AIR PERMUKAAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH SUMBANGAN PIHAK KETIGA/ SEJENIS SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PAJAK ALAT BERAT DANA BAGI HASIL (DBH) PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				1 Laporan	1 Laporan	4.431.966.000,00	0,00	0,00	-4.431.966.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

													BATU BARA BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)						
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	2.564.466.000,00	2.564.466.000,00	2.564.466.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	5.688.629.000,00	0,00	0,00	-5.688.629.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SUMBANGAN PIHAK KETIGA/ SEJENIS PAJAK ALAT BERAT PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) PAJAK AIR PERMUKAAN DANA BAGI HASIL (DBH) PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	3.924.157.000,00	3.774.166.000,00	3.774.166.000,00	Semua Kota/Kab,	SUMBANGAN PIHAK	-	Penguatan Kualitas Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN

			Koordinasi dan Konsultasi SKPD									Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	KETIGA/ SEJENIS PAJAK ALAT BERAT PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) PAJAK AIR PERMUKAAN DANA BAGI HASIL (DBH) PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA LAIN-LAIN PAD YANG SAH		dan Keterampilan SDM				KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	1.230.000.000,00	1.230.000.000,00	1.230.000.000,00							0,00	
	1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	0,00	1.230.000.000,00	1.230.000.000,00	1.230.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA SUMBANGAN PIHAK KETIGA/ SEJENIS	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.866.216.000,00	1.966.716.000,00	2.619.996.000,00	753.780.000,00							0,00	
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	248.700.000,00	0,00	0,00	-248.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA SISA LEBIH PERHITUNGAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

														ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	penyeludupan.				
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	349.200.000,00	349.200.000,00	349.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	1.617.516.000,00	0,00	0,00	-1.617.516.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.617.516.000,00	2.270.796.000,00	2.270.796.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	64.370.000,00	64.370.000,00	271.300.000,00	206.930.000,00							0,00	
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	0,00	49.730.000,00	106.660.000,00	106.660.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	49.730.000,00	0,00	0,00	-49.730.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				2 Unit	2 Unit	14.640.000,00	0,00	0,00	-14.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				2 Unit	2 Unit	0,00	14.640.000,00	14.640.000,00	14.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Presentase Anak Usia dini 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) Presentase Anak Usia 4-18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS)				-	68 68 % %	338.205.007.889,00	488.524.830.901,00	635.752.351.140,50	297.547.343.251,50					Peserta Didik Peserta Didik dan Lembaga Pendidikan Peserta Didik OAP Peserta Didik Pendidikan Khusus		0,00	
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-				-	-	20.975.384.100,00	22.935.384.100,00	40.509.120.270,00	19.533.736.170,00							0,00	
	1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	*Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun*				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	5.149.200.000,00	5.149.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-PENDIDIKA N PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia*				3 Paket	3 Paket	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	9.735.204.356,00	7.535.204.356,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOT	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

												Semua Kel/Desa	OR (BBNKB) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) SISA DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PENDIDIKAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA BAGI HASIL (DBH)						
	1.01.02.1.03.0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia*				3 Paket	3 Paket	0,00	0,00	544.800.000,00	544.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PENDIDIKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*				500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	3.409.197.500,00	3.409.197.500,00	3.529.491.700,00	120.294.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PAJAK AIR PERMUKAAN	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus*				50 Orang	50 Orang	0,00	960.000.000,00	1.752.000.000,00	1.752.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*				500 Orang	500 Orang	792.737.100,00	792.737.100,00	2.450.657.100,00	1.657.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN SISA DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PENDIDIKAN DANA BAGI HASIL (DBH) PENDAPATAN BAGI	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

													HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA PAJAK AIR PERMUKAAN						
	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	*Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS*				4 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan	4.922.030.000,00	4.922.030.000,00	4.922.030.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus*				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	149.259.400,00	149.259.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*				2 Dokumen	2 Dokumen	5.277.166.000,00	6.277.166.000,00	3.614.959.400,00	-1.662.206.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA PAJAK AIR PERMUKAAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*				2 Dokumen	2 Dokumen	1.111.197.500,00	1.111.197.500,00	1.472.170.860,00	360.973.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah*				6 Ruang	6 Ruang	0,00	0,00	2.380.000.000,00	2.380.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN SISA DANA OTONOMI	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

													KHUSUS 1%-PA PUA-PENDIDIKA N DANA ALOKASI UMUM (DAU)						
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	3.263.056.000,00	3.263.056.000,00	3.665.347.454,00	402.291.454,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat*				5 Ruang	5 Ruang	0,00	0,00	322.000.000,00	322.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-PENDIDIKA N PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0083	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	*Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik*				1000 Buku	1000 Buku	0,00	0,00	822.000.000,00	822.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.04	Pengelolaan Akademi Komunitas	-				-	-	11.757.233.400,00	11.757.233.400,00	11.929.251.600,00	172.018.200,00							0,00	
	1.01.02.3.04.0001	Pembangunan Gedung Akademi Komunitas	*Jumlah Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi yang Dibangun*				1 Unit	1 Unit	5.350.000.000,00	5.350.000.000,00	5.350.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.04.0020	Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas	*Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas yang Tersedia*				50 Orang	50 Orang	2.421.156.000,00	2.421.156.000,00	2.421.156.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.04.0022	Pembinaan Kelembagaan dan ManajemenAkademi Komunitas	*Jumlah Akademi KomunitasDilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Satuan*				1 Pendidikan	1 Pendidikan	259.362.500,00	259.362.500,00	259.362.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.04.0024	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas	*Jumlah Mahasiswa/i yang Mengikuti AjangKompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	506.522.000,00	506.522.000,00	506.522.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1.01.02.3.04.0026	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Akademi Komunitas	*Jumlah Satuan Pendidikan Akademi Komunitas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi*				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.04.0028	Pengadaan Perlengkapan Akademi Komunitas	*Jumlah perlengkapan Akademi Komunitas yang Tersedia*				2 Paket	2 Paket	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA PAJAK AIR PERMUKAAN	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.04.0041	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Akademi Komunitas	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	357.072.500,00	357.072.500,00	529.090.700,00	172.018.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.04.0042	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Akademi Komunitas	*Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan*				100 Orang	100 Orang	113.120.400,00	113.120.400,00	113.120.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.06	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi OAP	-				-	-	181.845.028.789,00	181.845.028.789,00	165.910.312.694,50	-15.934.716.094,50							0,00	
	1.01.02.3.06.0002	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Siswa Nonformal/Kesetaraan Yang Menerima Biaya Pendidikan*				662 Orang	662 Orang	1.533.000.000,00	1.533.000.000,00	12.543.000.000,00	11.010.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-PENDIDIKAN DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.06.0003	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Dasar	*Jumlah Siswa Sekolah Dasar Yang Menerima Biaya Pendidikan*				2000 Orang	2000 Orang	75.021.432.189,00	75.021.432.189,00	37.510.716.094,50	-37.510.716.094,50	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.06.0004	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Yang Menerima Biaya Pendidikan*				41690 Orang	41690 Orang	25.763.600.000,00	25.763.600.000,00	28.195.500.000,00	2.431.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-PENDIDIKAN DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1.01.02.3.06.0005	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas	*Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas Yang Menerima Biaya Pendidikan*				18852 Orang	18852 Orang	17.312.100.000,00	17.312.100.000,00	17.312.100.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.06.0006	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan	*Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Yang Menerima Biaya Pendidikan*				11606 Orang	11606 Orang	11.656.500.000,00	11.656.500.000,00	19.790.600.000,00	8.134.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) SISA DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PENDIDIKAN	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.06.0007	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Pendidikan Tinggi	*Jumlah Mahsiswa Pendidikan Tinggi Yang Menerima Biaya Pendidikan*				151 Orang	151 Orang	50.558.396.600,00	50.558.396.600,00	50.558.396.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.07	Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan	-				-	-	120.247.361.600,00	268.607.184.612,00	414.023.666.576,00	293.776.304.976,00							0,00	
	1.01.02.3.07.0001	Penyediaan Bantuan fasilitas bagi pendidikan	*Jumlah Bantuan fasilitas bagi pendidikan yang Tersedia*				50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	64.024.644.000,00	179.832.592.569,00	247.026.199.369,00	183.001.555.369,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN SISA DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PENDIDIKAN SISA DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN DANA BAGI HASIL (DBH) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.07.0002	Penyediaan Bantuan pembiayaan bagi pendidikan	*Jumlah Bantuan pembiayaan bagi pendidikan yang Tersedia*				50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	56.222.717.600,00	88.774.592.043,00	166.997.467.207,00	110.774.749.607,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecama	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

													tan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) SISA DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PENDIDIKAN SISA DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN PAJAK AIR PERMUKAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)		Keterampilan SDM				
	1.01.02.3.08	Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Tambahan	-				-	-	3.380.000.000,00	3.380.000.000,00	3.380.000.000,00	0,00							0,00	
	1.01.02.3.08.0001	Pelaksanaan Layanan Pendidikan Tambahan yang diprioritaskan bagi OAP Untuk Membantu Penyiapan Memasuki Perguruan Tinggi dan/atau Pendidikan Kedinasan	*Jumlah Layanan Pendidikan Tambahan yang diprioritaskan bagi OAP Untuk Membantu Penyiapan Memasuki Perguruan Tinggi dan/atau Pendidikan Kedinasan Yang Dilaksanakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	3.380.000.000,00	3.380.000.000,00	3.380.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3,	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Pemerataan Guru Presentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidikan				-	68 68 % %	1.375.352.000,00	1.375.352.000,00	1.375.352.000,00	0,00					Pendidik dan Tenaga Kependidikan		0,00	
	1.01.04.3.03	Penjaminan keamanan bagi pendidik dan tenaga	-				-	-	1.375.352.000,00	1.375.352.000,00	1.375.352.000,00	0,00							0,00	

		kependidikan di Provinsi Sesuai dengan kewenangannya																	
	1.01.04.3.03.0001	Penjaminan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Sesuai dengan kewenangannya	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan di Provinsi Yang Mendapatkan Jaminan Kemanan*				500 Orang	500 Orang	1.375.352.000,00	1.375.352.000,00	1.375.352.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.211.697.475,00	5.211.697.475,00	6.574.469.142,00	1.362.771.667,00							0,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							5.211.697.475,00	5.211.697.475,00	6.574.469.142,00	1.362.771.667,00							0,00	
4,	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Masyarakat Terhadap Pengembangan Bebudayaan Masyarakat Terhadap Pengembangan Bebudayaan				-	100 % 64 %	4.533.973.575,00	4.533.973.575,00	5.812.829.882,00	1.278.856.307,00					Pegiata Kebudayaan Pegiat Kebudayaan		0,00	
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	3.914.514.175,00	3.914.514.175,00	5.193.370.482,00	1.278.856.307,00							0,00	
	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	*Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan*				100 Orang	100 Orang	3.914.514.175,00	3.914.514.175,00	5.193.370.482,00	1.278.856.307,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-				-	-	228.213.600,00	228.213.600,00	228.213.600,00	0,00							0,00	
	2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional*				1 Laporan	1 Laporan	228.213.600,00	228.213.600,00	228.213.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

														peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.					
	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	391.245.800,00	391.245.800,00	391.245.800,00	0,00							0,00	
	2.22.02.1.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	*Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina*				100 Orang	100 Orang	391.245.800,00	391.245.800,00	391.245.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5,	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Penguatan Lembaga budaya,sangar seni,dan komonitas kreatifguna memperluas ruang ekpresi dan inovasi budaya				-	56 %	205.333.700,00	205.333.700,00	289.249.060,00	83.915.360,00					Pegiat Budaya dan Seni		0,00	
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	205.333.700,00	205.333.700,00	289.249.060,00	83.915.360,00							0,00	
	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)*				50 Orang	50 Orang	205.333.700,00	205.333.700,00	289.249.060,00	83.915.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA PAJAK AIR PERMUKAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6,	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pelestarian dan revitalitasi budaya Lokal Papua tengah melalui dukungan terhadap seni, Bahasa,tradisi,dan kearifan lokal				-	54 %	472.390.200,00	472.390.200,00	472.390.200,00	0,00					Pegiat Budaya		0,00	
	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-				-	-	472.390.200,00	472.390.200,00	472.390.200,00	0,00							0,00	
	2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi*				1 Objek	1 Objek	472.390.200,00	472.390.200,00	472.390.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

														masyarakat yang adil dan makmur.					
	1.02.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN						191.261.897.429,00	193.261.897.429,00	266.066.080.948,00	74.804.183.519,00							124.611.608.626,89	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						191.261.897.429,00	193.261.897.429,00	266.066.080.948,00	74.804.183.519,00							124.611.608.626,89	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						191.261.897.429,00	193.261.897.429,00	266.066.080.948,00	74.804.183.519,00							124.611.608.626,89	
7,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Tersedianya Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	20.127.543.916,00	20.127.544.116,00	19.885.498.878,00	-242.045.038,00					Administrasi Keuangan Adminstrasi Umum Jasa Penunjang Pemeliharaan Barang		0,00	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	85 Orang	9.541.658.816,00	9.174.426.616,00	8.201.661.378,00	-1.339.997.438,00							0,00	
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				85 Orang/ Bulan	85 Orang/ Bulan	9.541.658.816,00	9.174.426.616,00	8.201.661.378,00	-1.339.997.438,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA PAJAK ROKOK SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	10 Paket 12 Laporan 12 Paket 250 Laporan 8 Paket	9.221.437.100,00	8.076.349.500,00	8.100.965.500,00	-1.120.471.600,00							0,00	
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				10 Paket	10 Paket	1.072.863.000,00	334.617.000,00	334.617.000,00	-738.246.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi	-			0,00	DINAS KESEHATAN

														Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	249.984.000,00	249.984.000,00	249.984.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Penguatan Layanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				8 Paket	8 Paket	146.665.500,00	154.651.500,00	154.651.500,00	7.986.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				250 Laporan	250 Laporan	5.559.442.600,00	3.797.315.000,00	3.528.035.000,00	-2.031.407.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	2.192.482.000,00	3.539.782.000,00	3.833.678.000,00	1.641.196.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Penguatan Layanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	12 Laporan 20 Laporan	1.364.448.000,00	2.526.768.000,00	3.232.872.000,00	1.868.424.000,00							0,00	
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	440.376.000,00	440.376.000,00	440.376.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				20 Laporan	20 Laporan	924.072.000,00	2.086.392.000,00	2.792.496.000,00	1.868.424.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Penguatan Layanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				-	1 Unit	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00							0,00	

	1.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	*Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara*				1 Unit	1 Unit	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Penguatan Layanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
8,	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita Angka Kematian Ibu				-	30,67 410 % % 30,67 410 % Per 100.000 Lahir	161.714.265.495,00	161.867.801.695,00	227.698.230.452,00	65.983.964.957,00					Fasilitas Layanan Layanan Kesehatan		122.111.608.626,89	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				-	100 Unit 1 Paket 1 Unit 2 Unit 8 Dokumen 8 Unit	75.805.898.709,00	75.805.914.909,00	139.886.343.666,00	64.080.444.957,00							116.812.538.786,89	
	1.02.02.1.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	*Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000*				1 Unit	1 Unit	27.800.000.000,00	27.800.000.000,00	27.800.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-KESEHATA N	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Layanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun*				-	2 Unit	0,00	0,00	8.400.000.000,00	8.400.000.000,00	Kab. Nabire, Teluk Kimi, Kimi Kab. Puncak, Ilaga, Kago	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Layanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat			8.652.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan*				8 Unit	8 Unit	1.323.888.166,00	1.323.888.166,00	20.275.601.781,00	18.951.713.615,00	Kab. Puncak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Puncak Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paniai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mimika, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dogiyai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Intan Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Deiyai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA SISA DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Penguatan Layanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat			22.247.474.645,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan*				8 Unit	8 Unit	12.348.853.463,00	12.348.853.463,00	46.148.853.463,00	33.800.000.000,00	Kab. Puncak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Puncak Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paniai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mimika, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dogiyai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.	SISA DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN DANA BAGI HASIL (DBH) DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Penguatan Layanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat			47.533.319.066,89	DINAS KESEHATAN

												Intan Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Deiyai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar*				100 Unit	100 Unit	5.900.000.000,00	5.900.000.000,00	5.900.000.000,00	0,00	Kab. Puncak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Puncak Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paniai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mimika, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dogiyai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Intan Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Deiyai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-KESEHATAN DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Layanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat			6.077.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	*Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan*				8 Dokumen	8 Dokumen	1.500.287.561,00	1.517.491.061,00	4.446.206.203,00	2.945.918.642,00	Kab. Puncak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Puncak Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paniai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM	-	Penguatan Layanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat			4.579.592.389,00	DINAS KESEHATAN

												a Kab. Mimika, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dogiyai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Intan Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Deiyai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	NYA PAJAK ROKOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI						
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan*				1 Paket	1 Paket	26.932.869.519,00	26.915.682.219,00	26.915.682.219,00	-17.187.300,00	Kab. Puncak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Puncak Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paniai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mimika, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dogiyai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Intan Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Deiyai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PAJAK ROKOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Penguatan Layanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat			27.723.152.686,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Jumlah Dokumen Hasil				-	120 Dokumen 15000 Orang 1 Dokumen 3 Dokumen 40 Dokumen 8 Dokumen	83.588.366.786,00	83.741.886.786,00	85.491.886.786,00	1.903.520.000,00							5.299.069.840,00	

			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar																	
	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	*Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar*				1346685 Orang	1346685 Orang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Puncak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Puncak Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paniai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mimika, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dogiyai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Intan Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Deiyai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.287.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	*Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				1346685 Orang	1346685 Orang	1.056.000.000,00	1.056.000.000,00	1.056.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-KESEHATA N	-	Penguatan Layanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak*				120 Dokumen	8 Dokumen	394.740.000,00	2.394.728.000,00	3.894.728.000,00	3.499.988.000,00	Kab. Puncak, Semua Kecamatan,	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-	-	Penguatan Layanan Kesehatan dan Peningkatan			4.011.569.840,00	DINAS KESEHATAN

													Semua Kel/Desa Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Puncak Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paniai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mimika, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dogiyai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Intan Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Deiyai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI DANA BAGI HASIL (DBH)		Kesejahteraan Masyarakat				
	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				120 Dokumen	120 Dokumen	1.466.260.000,00	1.494.671.800,00	1.494.671.800,00	28.411.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Layanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN

	1.02.02. 1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*				8 Dokumen	8 Dokumen	149.742.000,00	0,00	0,00	-149.742.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Penguatan Layanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02. 1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan*				3 Dokumen	3 Dokumen	1.000.000.000,00	47.024.000,00	47.024.000,00	-952.976.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Penguatan Layanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02. 1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				120 Dokumen	120 Dokumen	5.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	-1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Penguatan Layanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02. 1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji*				-	1 Dokumen	0,00	78.096.200,00	78.096.200,00	78.096.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Penguatan Layanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02. 1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*				40 Dokumen	40 Dokumen	72.178.526.086,00	72.178.526.086,00	72.178.526.086,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PAJAK ROKOK DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA PAJAK ROKOK	-	Penguatan Layanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN

	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				120 Dokumen	120 Dokumen	843.098.700,00	992.840.700,00	992.840.700,00	149.742.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Layanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				-	120 Unit	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00							0,00	
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan*				120 Unit	120 Unit	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan berbasis pelayanan pelayanan kesehatan bergerak/ pelayanan kesehatan berbasi masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lain dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan spesialistik pada daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan lintas kabupaten/kota di wilayahnya.				-	8 Kabupaten	1.320.000.000,00	1.320.000.000,00	1.320.000.000,00	0,00							0,00	
	1.02.02.3.01.0042	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis pelayanan pelayanan kesehatan bergerak/ pelayanan kesehatan berbasi masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lain dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan spesialistik pada daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan lintas kabupaten/kota di wilayahnya.	*Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan berbasis pelayanan pelayanan kesehatan bergerak/ pelayanan kesehatan berbasi masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lain dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan spesialistik pada daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan lintas kabupaten/kota di wilayahnya.*				8 Kabupaten/Kota	8 Kabupaten/Kota	1.320.000.000,00	1.320.000.000,00	1.320.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Layanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
9,	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita Angka Kematian Ibu				-	30,67 410 % Per 100.000 Lahir 70 %	5.245.624.200,00	7.092.087.800,00	6.092.087.800,00	846.463.600,00					Masyarakat Sumber Daya Manusia Kesehatan		2.500.000.000,00	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				-	129 Orang 8 Dokumen	4.765.624.200,00	6.612.087.800,00	5.612.087.800,00	846.463.600,00							2.500.000.000,00	

	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat*				120 Orang	120 Orang	4.765.624.200,00	5.612.058.800,00	4.612.058.800,00	-153.565.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA PAJAK AIR PERMUKAAN PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan*				8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	1.000.029.000,00	1.000.029.000,00	1.000.029.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Penguatan Layanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.3.08	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,Peningkatan Peran Serta OAP	Jumlah stimulan bagi kader kesehatan kampung yang berasal dari OAP yang diberikan				-	8 Dokumen	480.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00							0,00	
	1.02.03.3.08.0001	Pemberian stimulan bagi kader kesehatan Kampung yang berasal dari OAP	*Jumlah stimulan bagi kader kesehatan kampung yang berasal dari OAP yang diberikan*				8 Dokumen	8 Dokumen	480.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Layanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
10,	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan				undefined undefined	60 %	4.174.463.818,00	4.174.463.818,00	12.390.263.818,00	8.215.800.000,00					Masyarakat Lintas Sektor		0,00	
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				undefined undefined	120 Dokumen	4.174.463.818,00	4.174.463.818,00	12.390.263.818,00	8.215.800.000,00							0,00	
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi*				120 Dokumen	120 Dokumen	4.174.463.818,00	4.174.463.818,00	12.390.263.818,00	8.215.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK PAJAK ROKOK SISA DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidika	Penguatan Layanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN

													TAN PAJAK AIR PERMUKAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-KESEHATAN DANA BAGI HASIL (DBH)	n, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.03.1.04.0.00.03.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							539.267.892.921,00	541.697.201.621,00	906.453.539.450,00	367.185.646.529,00							884.425.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							539.267.892.921,00	541.697.201.621,00	906.453.539.450,00	367.185.646.529,00							884.425.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							537.667.893.521,00	540.313.107.221,00	905.069.445.050,00	367.401.551.529,00							883.425.000.000,00	
11,	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	418.989.989.921,00	421.635.203.351,00	462.444.131.754,00	43.454.141.833,00							521.675.000.000,00	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	31.675.000,00	31.675.000,00	431.675.000,00	400.000.000,00							175.000.000,00	
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	4.525.000,00	4.525.000,00	4.525.000,00	0,00	Kab. Nabire, Nabire, Karang Mulia	PAJAK AIR PERMUKAAN	-	-			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	4.525.000,00	4.525.000,00	4.525.000,00	0,00	Kab. Nabire, Nabire, Karang Mulia	PAJAK AIR PERMUKAAN	-	-			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	4.525.000,00	4.525.000,00	104.525.000,00	100.000.000,00	Kab. Nabire, Nabire, Karang Mulia	PAJAK AIR PERMUKAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	4.525.000,00	4.525.000,00	4.525.000,00	0,00	Kab. Nabire, Nabire, Karang Mulia	PAJAK AIR PERMUKAAN	-	-			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	4.525.000,00	4.525.000,00	104.525.000,00	100.000.000,00	Kab. Nabire, Nabire, Karang Mulia	PAJAK AIR PERMUKAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja*				1 Laporan	1 Laporan	4.525.000,00	4.525.000,00	104.525.000,00	100.000.000,00	Kab. Nabire, Nabire, Karang Mulia	PAJAK AIR PERMUKAAN SISA LEBIH PERHITU	-	-			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN

			dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										NGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA						RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	4.525.000,00	4.525.000,00	104.525.000,00	100.000.000,00	Kab. Nabire, Nabire, Karang Mulia	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PAJAK AIR PERMUKAAN	-	-			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	10.042.297.591,00	9.424.189.039,00	11.368.663.269,00	1.326.365.678,00							6.650.000.000,00	
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				206 Orang/ Bulan	206 Orang/ Bulan	10.028.722.591,00	9.410.614.039,00	11.055.088.269,00	1.026.365.678,00	Kab. Nabire, Nabire, Karang Mulia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	4.525.000,00	4.525.000,00	104.525.000,00	100.000.000,00	Kab. Nabire, Nabire, Karang Mulia	PAJAK AIR PERMUKAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*				16 Laporan	16 Laporan	4.525.000,00	4.525.000,00	104.525.000,00	100.000.000,00	Kab. Nabire, Nabire, Karang Mulia	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PAJAK AIR PERMUKAAN	-	-			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*				1 Dokumen	1 Dokumen	4.525.000,00	4.525.000,00	104.525.000,00	100.000.000,00	Kab. Nabire, Nabire, Karang Mulia	PAJAK AIR PERMUKAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.910.160.000,00	2.173.065.000,00	2.173.065.000,00	262.905.000,00							3.250.000.000,00	
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*				240 Paket	240 Paket	432.600.000,00	432.600.000,00	432.600.000,00	0,00	Kab. Nabire, Nabire, Karang Mulia	PAJAK AIR PERMUKAAN	-	-			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				80 Orang	80 Orang	1.222.060.000,00	1.253.670.000,00	1.253.670.000,00	31.610.000,00	Kab. Nabire, Nabire, Karang Mulia	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				40 Orang	40 Orang	255.500.000,00	486.795.000,00	486.795.000,00	231.295.000,00	Kab. Nabire, Nabire, Karang Mulia	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.860.660.500,00	4.735.825.500,00	4.735.825.500,00	-124.835.000,00							7.500.000.000,00	
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				25 Paket	25 Paket	13.602.000,00	13.602.000,00	13.602.000,00	0,00	Kab. Nabire, Nabire, Kalisusu	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN	-	-			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,

													BERMOTOR (PBBKB)						PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				5 Paket	5 Paket	185.230.700,00	185.230.700,00	185.230.700,00	0,00	Kab. Nabire, Nabire, Karang Mulia	PAJAK AIR PERMUKAAN	-	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				20 Paket	20 Paket	29.803.500,00	29.803.500,00	29.803.500,00	0,00	Kab. Nabire, Nabire, Karang Mulia	PAJAK AIR PERMUKAAN	-	-			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	437.425.000,00	637.490.000,00	637.490.000,00	200.065.000,00	Kab. Nabire, Nabire, Karang Mulia	PAJAK AIR PERMUKAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	296.644.000,00	449.644.000,00	449.644.000,00	153.000.000,00	Kab. Nabire, Nabire, Karang Mulia	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PAJAK AIR PERMUKAAN	-	-			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	232.442.700,00	232.442.700,00	232.442.700,00	0,00	Kab. Nabire, Nabire, Karang Mulia	PAJAK AIR PERMUKAAN	-	-			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				10000 Laporan	10000 Laporan	381.000.000,00	381.000.000,00	381.000.000,00	0,00	Kab. Nabire, Nabire, Karang Mulia	PAJAK AIR PERMUKAAN	-	-			750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	3.284.512.600,00	2.806.612.600,00	2.806.612.600,00	-477.900.000,00	Kab. Nabire, Nabire, Karang Mulia	PAJAK AIR PERMUKAAN	-	-			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	400.839.324.530,00	403.268.632.960,00	441.733.087.133,00	40.893.762.603,00							501.500.000.000,00	
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				10 Unit	10 Unit	17.815.500,00	17.815.500,00	14.087.515.500,00	14.069.700.000,00	Kab. Nabire, Nabire, Karang Mulia	PAJAK AIR PERMUKAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				4 Unit	5 Unit	400.821.509.030,00	403.250.817.460,00	426.750.817.460,00	25.929.308.430,00	Kab. Nabire, Wanggar, Karadiri	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA BAGI	-	-			500.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

													HASIL (DBH) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA						
	1.03.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	894.754.173,00	894.754.173,00	Kab. Nabire, Nabire, Karang Mulia	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA SUMBANGAN PIHAK KETIGA/ SEJENIS	-	-			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	827.896.000,00	1.523.839.552,00	1.523.839.552,00	695.943.552,00							1.975.000.000,00	
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	7.930.000,00	7.930.000,00	7.930.000,00	0,00	Kab. Nabire, Nabire, Karang Mulia	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	191.070.000,00	191.070.000,00	191.070.000,00	0,00	Kab. Nabire, Nabire, Karang Mulia	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	628.896.000,00	1.324.839.552,00	1.324.839.552,00	695.943.552,00	Kab. Nabire, Nabire, Karang Mulia	PAJAK AIR PERMUKAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			1.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	477.976.300,00	477.976.300,00	477.976.300,00	0,00							625.000.000,00	
	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	46.130.000,00	46.130.000,00	46.130.000,00	0,00	Kab. Nabire, Nabire, Karang Mulia	PAJAK AIR PERMUKAAN	-	-			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				10 Unit	10 Unit	29.250.000,00	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	Kab. Nabire, Nabire, Karang Mulia	PAJAK AIR PERMUKAAN	-	-			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	402.596.300,00	402.596.300,00	402.596.300,00	0,00	Kab. Nabire, Nabire, Karang Mulia	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
12,	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan Pemukiman Rawan Banjir Presentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomunikasi				-	10 10 10 % % %	34.750.000.000,00	34.750.000.000,00	44.750.000.000,00	10.000.000.000,00							21.000.000.000,00	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	34.750.000.000,00	34.750.000.000,00	44.750.000.000,00	10.000.000.000,00							21.000.000.000,00	
	1.03.02.1.01.0074	Revitalisasi Danau	*Jumlah Danau yang Direvitalisasi*				1 Danau	1 Danau	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kab. Paniai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Layanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0123	Pembangunan Unit Air Baku	*Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun*				2 Unit	3 Unit	23.750.000.000,00	23.750.000.000,00	23.750.000.000,00	0,00	Kab. Nabire, Wanggar, Karadiri	DTI-PAPUA-AIR BERSIH DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Layanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		[Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan Pemukiman Rawan Banjir] [Prsentase luas layanan irigasi multikomuditas]	*Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir*	*30.00*	*3.00*	*5.00*			*10.600.000.000,00*	*10.600.000.000,00*	*20.600.000.000,00*	*10.000.000.000,00*						*10.00*	*20.000.000.000,00*	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	34.750.000.000,00	34.750.000.000,00	44.750.000.000,00	10.000.000.000,00							21.000.000.000,00	
	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai	*Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun*				2.5 KM	2.5 KM	10.600.000.000,00	10.600.000.000,00	20.600.000.000,00	10.000.000.000,00	Kab. Nabire, Nabire, Kali Harapan	SISA DTI-PAPUA -SANITASI LINGKUNGAN DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
13,	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Kapaasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah Lintas kabupaten kota				-	30 %	300.000.000,00	300.000.000,00	3.300.000.000,00	3.000.000.000,00							30.000.000.000,00	
		[Persentase Peningkatan Kapaasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah Lintas kabupaten kota]	*Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota*	*45.00*	*15.00*	*20.00*			*300.000.000,00*	*300.000.000,00*	*3.300.000.000,00*	*3.000.000.000,00*						*25.00*	*30.000.000.000,00*	
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	-				-	-	300.000.000,00	300.000.000,00	3.300.000.000,00	3.000.000.000,00							30.000.000.000,00	
	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	*Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun*				3 Liter/Detik	3 Liter/Detik	0,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Puncak, Gome, Gome	SISA DTI-PAPUA-AIR BERSIH	-	-			30.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	*Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara*				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTI-PAPUA-AIR BERSIH	-	Penguatan Layanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

14,	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase peningkatan rumah t5angga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestic layak dan aman)				-	47 %	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00							10.500.000.000,00	
		[Persentase peningkatan rumah t5angga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestic layak dan aman)]	*Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)*	*59*	*41.44*	*44*			*2.200.000.000,00*	*2.200.000.000,00*	*2.200.000.000,00*	*0,00*						*47*	*10.500.000.000,00*	
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	-				-	-	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00							10.500.000.000,00	
	1.03.05.1.01.0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	*Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun*				50 M³/Hari	50 M³/Hari	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00	Kab. Nabire, Nabire, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DTI-PAPUA-AIR BERSIH PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
15,	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik				-	9 %	0,00	0,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00							40.000.000.000,00	
		[Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik]	*Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik*	*17*	*5*	*7*			*0,00*	*0,00*	*8.000.000.000,00*	*8.000.000.000,00*						*9*	*40.000.000.000,00*	
	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	-				-	-	0,00	0,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00							40.000.000.000,00	
	1.03.06.1.01.0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	*Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun*				1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			40.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
16,	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase cakupan infrastruktur pemukiman dalam kondisi baik				-	33 %	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00							55.000.000.000,00	
		[Persentase cakupan infrastruktur pemukiman dalam kondisi baik]	*Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik*	*45*	*27.6*	*30*			*20.000.000.000,00*	*20.000.000.000,00*	*20.000.000.000,00*	*0,00*						*33*	*55.000.000.000,00*	
	1.03.07.3.02	Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemberian bantuan untuk pembangunan layak huni dan kawasan permukiman layak terutama bagi OAP	-				-	-	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00							55.000.000.000,00	
	1.03.07.3.02.0001	Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar	*Jumlah rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar*				90 Unit	90 Unit	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nabire, Siriwo, Ugida Kab. Puncak, Gome,	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-			55.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

													Yenggernok							
17,	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bamgunan Gedung dalam kondisi baik				-	4,5 %	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00							500.000.000,00	
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-				-	-	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00							500.000.000,00	
	1.03.08.1.01.0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	*Jumlah Rumah Negara yang Dikelola*				2 Rumah Negara	2 Rumah Negara	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	Kab. Nabire, Wanggar, Karadiri	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
18,	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungan				-	4,5 %	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00							750.000.000,00	
		[Persentase penataan bangunan dan lingkungan]	*Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan*	*30*	*0*	*0*			*2.000.000.000,00*	*2.000.000.000,00*	*2.000.000.000,00*	*0,00*						*4.5*	*750.000.000,00*	
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00							750.000.000,00	
	1.03.09.1.01.0017	Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	Kab. Nabire, Wanggar, Karadiri	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
19,	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan Jalan				-	23 %	56.918.236.800,00	56.918.236.800,00	359.865.646.226,00	302.947.409.426,00							200.000.000.000,00	
		[Tingkat kemantapan Jalan]	*Tingkat Kemantapan Jalan*	*35*	*17.5*	*20*			*56.918.236.800,00*	*56.918.236.800,00*	*359.865.646.226,00*	*302.947.409.426,00*						*23*	*200.000.000.000,00*	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-				-	-	56.918.236.800,00	56.918.236.800,00	359.865.646.226,00	302.947.409.426,00							200.000.000.000,00	
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	*Panjang Jalan yang Direhabilitasi*				20 KM	20 KM	664.123.000,00	664.123.000,00	9.446.648.412,00	8.782.525.412,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DBH SAWIT	-	-			20.000.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	*Panjang Jalan yang Direkonstruksi*				40 KM	13,5 KM	56.054.113.800,00	56.054.113.800,00	269.218.997.814,00	213.164.884.014,00	Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paniai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mimika, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DTI-PAPUA - PENDANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNG AN DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN DBH SAWIT DTI-PAPUA-PENDANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PKB DANA BAGI	-	-			100.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

														HASIL (DBH)						
	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	800.000.000,00	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0054	Pembangunan Jembatan	*Panjang jembatan yang dibangun*				150 Meter	150 Meter	0,00	0,00	18.900.000.000,00	18.900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DTI-PAPUA - PENDANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN	-	-			80.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0058	Pembangunan Jalan	*Panjang Jalan yang Dibangun*				-	240.0 KM	0,00	0,00	61.500.000.000,00	61.500.000.000,00	-	SISA DTI-PAPUA - PENDANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
20,	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja kontruksi kualifikasi Ahli				-	4 %	559.667.400,00	559.667.670,00	559.667.670,00	270,00							3.000.000.000,00	
		[Persentase tenaga kerja kontruksi kualifikasi Ahli]	*Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli*	*12*	*0*	*2*			*559.667.400,00*	*559.667.670,00*	*559.667.670,00*	*270,00*						*4*	*3.000.000.000,00*	
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	-				-	-	559.667.400,00	559.667.670,00	559.667.670,00	270,00							3.000.000.000,00	
	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	*Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih*				50 Orang	50 Orang	559.667.400,00	559.667.670,00	559.667.670,00	270,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Penguatan Layanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
21,	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaattan ruang di daerah provinsi				-	4 %	999.999.400,00	999.999.400,00	999.999.400,00	0,00							1.000.000.000,00	
		[Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaattan ruang di daerah provinsi]	*Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi*	*12*	*0*	*2.5*			*999.999.400,00*	*999.999.400,00*	*999.999.400,00*	*0,00*						*4*	*1.000.000.000,00*	
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	-				-	-	999.999.400,00	999.999.400,00	999.999.400,00	0,00							1.000.000.000,00	
	1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	*Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi*				40 Orang	40 Orang	999.999.400,00	999.999.400,00	999.999.400,00	0,00	Kab. Nabire, Nabire, Karang Mulia	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							1.599.999.400,00	1.384.094.400,00	1.384.094.400,00	-215.905.000,00							1.000.000.000,00	
22,	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Presentase warga negara korban berencana yang memperoleh rumah layak huni				-	14 %	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00							1.000.000.000,00	
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-				-	-	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00							1.000.000.000,00	
	1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	*Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi*				10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Penguatan Layanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
23,	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Presentase luas Kawasan kumuh 10-15 ha yang ditangani				-	10 %	999.999.400,00	784.094.400,00	784.094.400,00	-215.905.000,00							0,00	
		[Presentase luas Kawasan kumuh 10-15 ha yang ditangani]	*Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani*	*30*	*0*	*0*			*999.999.400,00*	*784.094.400,00*	*784.094.400,00*	*-215.905.000,00*						*10*	*0,00*	
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha	-				-	-	999.999.400,00	784.094.400,00	784.094.400,00	-215.905.000,00							0,00	

		sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha																		
	1.04.03.1.01.0008	Penyusunan/Review/Legalisa si Kebijakan Bidang PKP	*Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi*				1 Dokumen	1 Dokumen	999.999.400,00	784.094.400,00	784.094.400,00	-215.905.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Penguatan Layanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.05.0.00.0.00.04.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							27.928.855.788,00	27.928.855.788,00	31.634.841.412,00	3.705.985.624,00							22.600.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							27.921.585.788,00	27.928.855.788,00	31.634.841.412,00	3.713.255.624,00							22.600.000.000,00	
	1	NON URUSAN							7.270.000,00	0,00	0,00	-7.270.000,00							0,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							27.921.585.788,00	27.928.855.788,00	31.634.841.412,00	3.713.255.624,00							22.600.000.000,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							7.270.000,00	0,00	0,00	-7.270.000,00							0,00	
24,	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan faasilitasi kebutuhan operasional perkantoran Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran				-	100 %	11.466.538.188,00	11.466.782.188,00	17.258.159.812,00	5.791.621.624,00					ASN OPD		15.700.000.000,00	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja				-	100 %	171.181.900,00	178.225.900,00	220.025.000,00	48.843.100,00							450.000.000,00	
	1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	47.292.500,00	47.292.500,00	47.292.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	74.056.900,00	73.764.500,00	73.764.500,00	-292.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	49.832.500,00	57.168.900,00	98.968.000,00	49.135.500,00	Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 %	4.702.994.288,00	4.702.994.288,00	8.449.590.912,00	3.746.596.624,00							4.950.000.000,00	
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				80 Orang/ Bulan	80 Orang/ Bulan	4.535.763.688,00	4.535.763.688,00	8.241.749.312,00	3.705.985.624,00	Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	54.617.200,00	54.617.200,00	54.617.200,00	0,00	Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*				4 Laporan	4 Laporan	55.337.200,00	55.337.200,00	95.948.200,00	40.611.000,00	Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*				1 Dokumen	1 Dokumen	57.276.200,00	57.276.200,00	57.276.200,00	0,00	Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	100 %	1.071.324.000,00	1.071.324.000,00	1.561.468.000,00	490.144.000,00							900.000.000,00	
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*				1 Paket	1 Paket	746.928.000,00	746.928.000,00	1.561.468.000,00	814.540.000,00	Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				15 Orang	15 Orang	324.396.000,00	324.396.000,00	0,00	-324.396.000,00	Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	4.594.443.000,00	4.587.643.000,00	5.727.507.400,00	1.133.064.400,00							7.850.000.000,00	
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	25.393.000,00	25.393.000,00	25.393.000,00	0,00	Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	7.270.000,00	7.270.000,00	7.270.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Penguatan Demokrasi dan Penegakan Hukum yang berkeadilan			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	7.270.000,00	0,00	0,00	-7.270.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Penguatan Demokrasi dan Penegakan Hukum yang berkeadilan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	876.800.000,00	876.800.000,00	1.648.800.000,00	772.000.000,00	Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	93.200.000,00	153.200.000,00	53.200.000,00	Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PAJAK AIR PERMUKAAN	-	-			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	62.400.000,00	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				1 Laporan	1 Laporan	1.700.580.000,00	1.700.580.000,00	2.274.469.400,00	573.889.400,00	Kab. Nabire,	SISA LEBIH	-	-			3.500.000.000,00	SATUAN POLISI

												Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA						PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	1.822.000.000,00	1.822.000.000,00	1.555.975.000,00	-266.025.000,00	Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			2.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah				-	100 %	7.920.000,00	7.920.000,00	314.675.600,00	306.755.600,00							300.000.000,00	
	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				10 Unit	10 Unit	7.920.000,00	7.920.000,00	226.507.600,00	218.587.600,00	Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan*				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	88.168.000,00	88.168.000,00	Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi jasa penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %	466.755.000,00	466.755.000,00	496.755.000,00	30.000.000,00							540.000.000,00	
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) PAJAK AIR PERMUKAAN	-	-			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	73.155.000,00	73.155.000,00	73.155.000,00	0,00	Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			90.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	363.600.000,00	363.600.000,00	363.600.000,00	0,00	Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah				-	100 %	451.920.000,00	451.920.000,00	488.137.900,00	36.217.900,00							710.000.000,00	
	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*				4 Unit	4 Unit	38.700.000,00	38.700.000,00	38.700.000,00	0,00	Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				7 Unit	7 Unit	380.930.000,00	380.930.000,00	380.930.000,00	0,00	Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				20 Unit	20 Unit	32.290.000,00	32.290.000,00	32.290.000,00	0,00	Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	36.217.900,00	36.217.900,00	Kab. Nabire, Semua	DANA BAGI	-	Reformasi Birokrasi dan Tata			0,00	SATUAN POLISI

			yang Dipelihara/Direhabilitasi									Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL (DBH)		Kelola Pemerintahan				PAMONG PRAJA
25,	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan petugas satuan polisi pamong praja Cakupan petugas satuan polisi pamong praja				-	35 %	16.462.317.600,00	16.462.073.600,00	14.376.681.600,00	-2.085.636.000,00					anggota PPNS masyarakat		6.900.000.000,00	
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan penanganan pelanggaran gangguan trantibum				-	100 %	15.926.329.500,00	15.926.329.500,00	14.324.137.500,00	-1.602.192.000,00							6.450.000.000,00	
	1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi*				1 Dokumen	1 Dokumen	363.777.000,00	363.777.000,00	363.777.000,00	0,00	Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0020	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan*				1 Laporan	1 Laporan	346.490.000,00	346.490.000,00	346.490.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Demokrasi dan Penegakan Hukum yang berkeadilan			450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0021	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan*				1 laporan	1 laporan	386.672.500,00	14.032.928.500,00	12.430.736.500,00	12.044.064.000,00	Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0023	Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi	*Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah*				0 Laporan	0 Laporan	183.134.000,00	183.134.000,00	183.134.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0030	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	*Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya*				200 Orang	200 Orang	14.646.256.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-13.646.256.000,00	Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			4.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang terbina				-	100 %	535.988.100,00	535.744.100,00	52.544.100,00	-483.444.000,00							450.000.000,00	
	1.05.02.1.03.0003	Pembentukan Sekretariat PPNS	*Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS*				1 Dokumen	1 Dokumen	52.788.100,00	52.544.100,00	52.544.100,00	-244.000,00	Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03.0007	Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda*				1 Laporan	1 Laporan	483.200.000,00	483.200.000,00	0,00	-483.200.000,00	Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.0.00.0.00.05.0000	DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN							16.530.790.285,00	16.530.790.285,00	16.720.762.662,00	189.972.377,00							14.382.500.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							16.530.790.285,00	16.530.790.285,00	16.720.762.662,00	189.972.377,00							14.382.500.000,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							16.530.790.285,00	16.530.790.285,00	16.720.762.662,00	189.972.377,00							14.382.500.000,00	

26,	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah di Provinsi Papua Tengah Nilai/Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah di Provinsi Papua Tengah Nilai/Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah				-	100 70 Persen Nilai	13.843.321.785,00	13.843.683.785,00	14.189.344.362,00	346.022.577,00							11.002.500.000,00	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun (LKjIP, LKPJ, LPPD, dan Laporan Evaluasi Renja) Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yang disusun (Renstra, Renja, RKA, DPA, dan Perubahannya)				-	4 Dokumen 6 Dokumen	556.784.800,00	556.784.800,00	268.609.800,00	-288.175.000,00							350.000.000,00	
	1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	233.940.500,00	233.940.500,00	55.495.500,00	-178.445.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			150.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	171.496.800,00	171.496.800,00	156.621.800,00	-14.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			100.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	151.347.500,00	151.347.500,00	56.492.500,00	-94.855.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			100.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun (Laporan Bulanan/Semesteran/Prognosis dan Laporan Keuangan Akhir Tahun) Jumlah orang yang menerima gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan ASN Perangkat Daerah				-	12 Bulan 4 Dokumen	4.064.433.885,00	4.064.795.885,00	3.985.805.462,00	-78.628.423,00							500.000.000,00	
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				12 Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan	3.714.129.285,00	3.714.491.285,00	3.404.463.962,00	-309.665.323,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Tata Kelola Keuangan Daerah dan Efisiensi Anggaran			0,00	DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	134.350.200,00	134.350.200,00	183.514.700,00	49.164.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			150.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	92.728.200,00	92.728.200,00	234.122.000,00	141.393.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			250.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

	1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*				1 Dokumen	1 Dokumen	123.226.200,00	123.226.200,00	163.704.800,00	40.478.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			100.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai (ASN dan Non ASN) Daerah yang terlayani administrasi kepegawaiannya (kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, KGB, dan pembinaan disiplin) Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis peningkatan kompetensi aparatur	Pera	ngkat		-	15 Orang 50 Orang	882.463.000,00	882.463.000,00	857.492.000,00	-24.971.000,00							950.000.000,00	
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*				3 Paket	3 Paket	565.136.000,00	565.136.000,00	565.136.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			600.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				13 Orang	13 Orang	317.327.000,00	317.327.000,00	292.356.000,00	-24.971.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			350.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi serta perjalanan dinas dalam dan luar daerah Jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, bahan logistik, serta barang cetakan dan penggandaan Perangkat Daerah				-	12 Bulan 12 Laporan	1.090.855.900,00	1.090.855.900,00	1.672.964.900,00	582.109.000,00							1.354.500.000,00	
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	2.893.200,00	2.893.200,00	2.893.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			4.500.000,00	DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	184.547.000,00	184.547.000,00	184.547.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			200.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	339.000.000,00	339.000.000,00	339.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			350.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	53.338.700,00	53.338.700,00	53.338.700,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU) SISA LEBIH PERHITUNGAN	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			55.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEBAKARAN DAN

													Kel/Desa	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA					PENYELAMATAN
	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				2 Dokumen	2 Dokumen	42.400.000,00	42.400.000,00	42.400.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			45.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				1 Laporan	1 Laporan	110.500.000,00	110.500.000,00	110.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			130.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	358.177.000,00	358.177.000,00	940.286.000,00	582.109.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			570.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan untuk menunjang tugas Perangkat Daerah				-	3 Unit	2.339.597.200,00	2.339.597.200,00	2.485.127.200,00	145.530.000,00							2.700.000.000,00	
	1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	2.079.000.000,00	2.079.000.000,00	2.224.530.000,00	145.530.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			2.500.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	260.597.200,00	260.597.200,00	260.597.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA DANA BAGI HASIL (DBH) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			200.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor (kebersihan, keamanan, dan tenaga penunjang lainnya) Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta jasa surat menyurat Perangkat Daerah				-	12 Bulan 12 Laporan	3.109.908.000,00	3.109.908.000,00	3.315.816.000,00	205.908.000,00							3.235.000.000,00	
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			35.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

														SEBELUMNYA					
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				3 Laporan	3 Laporan	190.593.000,00	190.593.000,00	190.593.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			200.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	2.889.315.000,00	2.889.315.000,00	3.095.223.000,00	205.908.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			3.000.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara serta dibayarkan pajak dan perizinannya Jumlah peralatan, mesin, mebel, dan gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				-	3 Unit 5 Unit	1.799.279.000,00	1.799.279.000,00	1.603.529.000,00	-195.750.000,00							1.913.000.000,00	
	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*				2 Unit	2 Unit	202.900.000,00	202.900.000,00	202.900.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			220.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				1 Unit	1 Unit	268.130.000,00	268.130.000,00	268.130.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			270.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				1 Unit	1 Unit	19.990.000,00	19.990.000,00	19.990.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			23.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	1.308.259.000,00	1.308.259.000,00	1.112.509.000,00	-195.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			1.400.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
27,	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Persentase warga negara yang				-	100 100 100 100 150 Persen	1.982.960.000,00	1.982.960.000,00	1.827.272.000,00	-155.688.000,00							2.550.000.000,00	

			memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Persentase penanganan kejadian bencana secara cepat dan tepat (respon time) Indeks Risiko Bencana (IRB) Daerah Persentase warga negara yang memperoleh layanan penanggulangan bencana sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana di Provinsi Papua Tengah Persentase kejadian bencana di wilayah Provinsi Papua Tengah yang tertangani secara cepat dan tepat Persentase warga negara yang memperoleh layanan penanggulangan bencana sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana di Provinsi Papua Tengah Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Papua Tengah					Persen Persen Persen Indeks 100 100 Persen Persen 100 5 Persen Persen											
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi yang disusun Jumlah kabupaten/kota yang terlayani informasi rawan bencana Jumlah media/sarana penyebarluasan informasi rawan bencana (leaflet, banner, videotron, medsos) Jumlah pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana per jenis bencana Jumlah peta rawan/risiko bencana yang tersedia dan termutakhirkan Jumlah warga negara/peserta yang memperoleh sosialisasi informasi rawan bencana				-	12 Kali 1 Dokumen 3 Jenis/Media 4 Dokumen 500 Orang 8 Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	844.312.000,00	-155.688.000,00							1.500.000.000,00	
	1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	*Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	*Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan*				-	0 Dokumen	0,00	1.000.000.000,00	844.312.000,00	844.312.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Penguatan Demokrasi dan Penegakan Hukum yang berkeadilan			1.500.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah pelaksanaan operasi pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada wilayah Provinsi Papua Tengah Jumlah personel Tim Reaksi Cepat (TRC)/petugas yang disiagakan dan dilengkapi sarana penyelamatan serta evakuasi korban bencana				-	120 Orang 8 Kabupaten/Kota	482.960.000,00	482.960.000,00	482.960.000,00	0,00							500.000.000,00	
	1.05.03.1.03.0009	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	*Jumlah dokumen rencana operasi kedaruratan yang sah/legal*				4 Dokumen	4 Dokumen	482.960.000,00	482.960.000,00	482.960.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecama	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARA	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola			500.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,

												tan, Semua Kel/Desa	N TAHUN SEBELUMNYA		Pemerintahan				KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen sistem dasar penanggulangan bencana (Kajian Risiko Bencana/Rencana Penanggulangan Bencana/Rencana Kontinjensi) Provinsi Papua Tengah yang disusun dan ditetapkan Jumlah pelaksanaan penyusunan regulasi, kelembagaan dan penguatan kapasitas sistem dasar penanggulangan bencana yang difasilitasi				-	2 Dokumen 8 Kabupaten/Kota	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00							550.000.000,00	
	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	*Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			550.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

BAB VI
PENUTUP

Berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, P-RKPD tahun 2026 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2026, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2026. Penetapan perubahan prioritas rencana pembangunan tahun 2026, mengacu pada isu-isu strategis serta melalui pendekatan kewilayahan, yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Papua Tengah dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh pelaku pembangunan di Provinsi Papua Tengah berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam P-RKPD Tahun 2026, secara sinergitas dan terintegrasi. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan;
2. Sebagai langkah awai dalam menyusun RAPBD Tahun 2026, P-RKPD Tahun 2026 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026;
3. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program- program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi Papua Tengah sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun dan membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2026;
4. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar difasilitasi melalui Forum Perangkat Daerah serta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, dapat terakomodasi secara baik;
5. Secara proaktif, BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah wajib melakukan monitoring pengkajian pelaksanaan P-RKPD Tahun 2026 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari masing-masing PD dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur;
6. Pada akhir tahun anggaran 2026, setiap kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan P-RKPD Tahun 2026, sesuai dengan TUPOKSI masing- masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah;
7. P-RKPD Tahun 2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip- prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan P-RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, mengawal, dan melaksanakan P-RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 ini dengan sebaik-baiknya.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002